Jakarta, 15 Desember 2018

Perihal : **Hasil Assessment Penerapan Good Corporate Governance**

Kepada Yth.:
Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi PT Sarinah (Persero)
Jl. MH Thamrin 11
Jakarta 10350

Dengan hormat,
Kami telah melakukan penilaian terhadap penerapan GCG PT Sarinah (Persero) periode tahun 2017. Penilaian kami lakukan dengan menggunakan metodologi assessment sesuai Kerangka Acuan Pelaksanaan Assessment GCG yang digunakan oleh Kementerian BUMN.

Berdasarkan metodologi assessment tersebut, kami mendapatkan keyakinan, bahwa PT Sarinah (Persero) telah memiliki kecukupan sistem dan infrastruktur yang mendukung implementasi prinsip-prinsio GCG. Pencapaian nilai PT Sarinah (Persero) adalah 88,5 atau mencapai kualifikasi **SANGAT BAIK**. Namun demikian, upaya yang sungguh-sungguh dalam menindaklanjuti rekomendasi yang kami sajikan, diharapkan akan dapat semakin memperkecil gap dengan standar atau praktek terbaik (best practice) penerapan GCG.

1	Komitmen terhadap penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik secara berkelanjutan	6.48
2	Pemegang Saham dan RUPS / Pemilik Modal	8.81
3	Dewan Komisaris	32.80
4	Direksi	33.23
5	Pengungkapan informasi dan transparansi	7.19
6	Aspek lainnya	0.00
	Total Nilai	88.50

Secara lengkap, hasil assessment kami sajikan dalam Laporan Assessment Penerapan GCG PT Sarinah (Persero) tahun 2017.

Tim Self Assessment GCG PT Sarinah (Persero)

Yesaya Christian Oenas
Ketua

DAFTAR ISI

	Hal
Ringkasan Eksekutif	1
Simpulan dan Rekomendasi	3
Profil Perusahaan	16
Kertas Kerja Penilaian/Evaluasi Implementasi GCG	
Daftar Capaian Implementasi GCG Per Indikator	

Ringkasan Eksekutif

Unit GCG dari Divisi Hukum dan Manajemen Resiko telah melakukan penilaian implementasi GCG di PT Sarinah (Persero) sesuai Kerangka Acuan Pelaksanaan *Assessment* GCG yang dikembangkan oleh Kementerian BUMN. Ruang lingkup penilaian meliputi aspek-aspek GCG dalam pengelolaan Perusahaan periode tahun 2017.
Tujuan pelaksanaan *assessment* implementasi GCG ini adalah untuk:

a. Mengukur kualitas implementasi GCG di PT Sarinah (Persero) melalui penilaian/evaluasi tingkat pemenuhan kriteria GCG dibandingkan dengan kondisi sesungguhnya yang diterapkan di PT Sarinah (Persero), melalui pemberian skor atas implementasi GCG dan kategori kualitas implementasi GCG-nya;
b. Mencari dan memetakan kekuatan dan kelemahan implementasi GCG di PT Sarinah (Persero), serta mengusulkan rekomendasi perbaikan untuk mengurangi celah (*gap*) antara kriteria GCG dengan implementasi GCG di PT Sarinah (Persero);
c. Memonitor keajegan implementasi GCG di PT Sarinah (Persero) dan memperoleh masukan untuk penyempurnaan dan pengembangan kebijakan *Corporate Governance* di lingkungan PT Sarinah (Persero).

Periode implementasi GCG yang dinilai dalam *assessment* ini adalah periode tahun 2017. *Self Assessment* dilaksanakan mulai tanggal 1 Agustus 2018 – 15 Desember 2018.

Pelaksanaan prinsip-prinsip GCG dan infrastruktur GCG yang ada merupakan tanggung jawab Manajemen Perusahaan. Tanggung jawab assesor terletak pada hasil penilaian atas implementasi GCG tersebut sesuai ketentuan yang ada.

Pelaksanaan *self assessment* implementasi GCG ini merupakan bagian dari proses implementasi GCG yang berkelanjutan di PT Sarinah (Persero), sehingga hasil *assessment* ini sekaligus penilaian atas kemajuan pelaksanaan GCG selama ini. Secara metodologis, pelaksanaan *assessment* GCG di Perusahaan mengacu pada Kerangka Acuan Pelaksanaan *Assessment* dan *Re-assessment* Implementasi *Good Corporate Governance* di BUMN yang dikembangkan Kementerian BUMN tahun 2012.

Aspek atau faktor pengujian implementasi GCG di PT Sarinah (Persero), meliputi: (a) Komitmen Terhadap Implementasi Tata Kelola Perusahaan yang Baik Secara Berkelanjutan; (b) Pemegang Saham dan RUPS/Pemegang Saham; (c) Dewan Komisaris/Dewan Pengawas*;* (d) Direksi; (e) Pengungkapan Informasi dan Transparansi, serta (f) Aspek Lain. Sedangkan, jumlah indikator pengujian implementasi GCG adalah sebanyak 43 indikator dengan 153 parameter pengujian.

Hasil *self assessment* implementasi GCG di PT Sarinah (Persero) tahun 2017 mencapai total skor sebesar **88,5** Hal ini menunjukkan bahwa implementasi GCG di PT Sarinah (Persero) pada tahun 2017 telah mencapai kualifikasi **SANGAT BAIK.**

Selanjutnya hasil *self assessment* implementasi GCG di PT Sarinah (Persero) tahun 2017 dapat diikhtisarkan sebagai berikut.

ASPEK		BOBOT	SKOR	% CAPAIAN
I.	Komitmen Terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Secara Berkelanjutan	7,000	6,48	92,57%
II.	Pemegang Saham dan RUPS/Pemegang Saham	9,000	8,81	97,92%
III.	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas	35,000	32,63	93,23%
IV.	Direksi	35,000	33,40	95,42%
V.	Pengungkapan Informasi dan Transparansi	9,000	7,18	79,77%
VI.	Aspek Lain	5,000	0,000	0,00%
	Skor Keseluruhan	**100,000**	**88,5**	**88,5%**
Peringkat Kualitas Penerapan GCG		**SANGAT BAIK**		

Tabel di atas menggambarkan perbandingan antara kondisi implementasi GCG di PT Sarinah (Persero) dengan praktik terbaik implementasi GCG. Beberapa aspek penilaian telah mendekati standar dan *best practice*, namun pada area tertentu masih memerlukan peningkatan.

Secara lengkap, hasil *asessment* kami sajikan dalam Self Assessment Implementasi GCG di PT Sarinah (Persero) Tahun 2017.

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. SIMPULAN

Kami telah melakukan *asssessment* implementasi GCG di PT Sarinah (Persero) sesuai Kerangka Acuan Pelaksanaan *Assessment* GCG yang dikembangkan oleh Kementerian BUMN. Ruang lingkup *assessment* meliputi aspek-aspek GCG dalam pengelolaan Perusahaan untuk periode tahun 2017.

Hasil *assessment* implementasi GCG di PT Sarinah (Persero) periode tahun 2017 mencapai Total Skor sebesar **88,5.** Hal ini menunjukkan bahwa implementasi GCG di PT Sarinah (Persero) periode tahun 2017 telah mencapai kualifikasi **SANGAT BAIK.**

Berikut ini disajikan simpulan hasil *assessment*, yang diuraikan untuk setiap aspek pengujian sebagai berikut.

1. Komitmen Terhadap Implementasi Tata Kelola Perusahan yang Baik Secara Berkelanjutan

Berdasarkan hasil *assessment* yang telah dilakukan pada Aspek Komitmen Terhadap Implementasi Tata Kelola Perusahaan yang Baik Secara Berkelanjutan, skor yang dicapai adalah **6,48** dari bobot sebesar **7,000** atau setara dengan prosentase pencapaian sebesar **92,57%.** Hal ini berarti bahwa secara umum implementasi GCG untuk Aspek Komitmen Terhadap Implementasi Tata Kelola Perusahan yang Baik Secara Berkelanjutan telah berjalan dengan sangat baik. Beberapa praktik yang telah berjalan adalah sebagai berikut.

1. Perusahaan telah membuat Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*GCG Code*) dan Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*) yang ditandatangani oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama.
2. Perusahaan melaksanakan Pedoman Tata Kelola Perusahaan dan Pedoman Perilaku secara konsisten, yang ditunjukkan melalui:
   a. Telah ditetapkan seorang anggota Direksi yang *in charge* dalam implementasi dan pemantauan GCG yang melaporkan pelaksanaan GCG tersebut kepada Pemegang Saham dan Dewan Komisaris;
   b. Perusahaan menciptakan situasi kondusif untuk melaksanakan Pedoman Tata Kelola Perusahaan dan Pedoman Perilaku.
3. Perusahaan melakukan pengukuran terhadap implementasi GCG yang di*review* secara berkala dan menjadi salah satu unsur *Key Performance Indicator* (KPI) yang dituangkan dalam Kontrak Manajemen.
4. Perusahaan melakukan koordinasi pengelolaan dan administrasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Hal ini ditunjukkan melalui kebijakan perusahaan tentang kepatuhan pelaporan harta kekayaan Penyelenggara Negara bagi Dewan Komisaris, Direksi dan pejabat satu tingkat di bawah Direksi;
5. Perusahaan melaksanakan program pengendalian gratifikasi sesuai ketentuan yang berlaku. Hal ini ditunjukkan melalui:
   a. Perusahaan memiliki ketentuan/kebijakan tentang Pengendalian Gratifikasi;
   b. Perusahaan melaksanakan upaya untuk meningkatkan pemahaman terhadap kebijakan/ketentuan pengendalian gratifikasi;

c. Perusahaan mengimplementasikan pengendalian gratifikasi.

6. Perusahaan melaksanakan kebijakan atas sistem pelaporan atas dugaan penyimpangan pada Perusahaan (*whistleblowing system*). Hal ini ditunjukkan melalui:
   a. Perusahaan memiliki kebijakan tentang pelaporan atas dugaan penyimpangan pada Perusahaan (*whistleblowing system*);
   b. Perusahaan melaksanakan kegiatan untuk memberikan pemahaman atas kebijakan pelaporan atas dugaan penyimpangan (*whistleblowing system*);
   c. Perusahaan melaksanakan kebijakan tentang pelaporan atas dugaan penyimpangan pada Perusahaan (*whistleblowing system*).

Namun demikian masih terdapat kondisi implementasi GCG untuk Aspek Komitmen Terhadap Implementasi Tata Kelola Perusahaan yang Baik Secara Berkelanjutan yang dapat dengan mudah ditingkatkan lagi, yaitu:

Tingkat kepatuhan Penyelenggara Negara dalam menyampaikan LHKPN masih belum 100%. Berdasarkan Ringkasan Pelaporan Kekayaan Penyelenggara Negara PT Sarinah (Persero) sampai dengan akhir Maret 2018 sebanyak 95,23% dari jumlah yang wajib lapor sudah melaporkan LHKPN.

2. Aspek Pemegang Saham dan RUPS/Pemegang Saham

Berdasarkan hasil *assessment* yang telah dilakukan pada Aspek Pemegang Saham dan RUPS/Pemegang Saham, skor yang dicapai adalah **8,81** dari bobot sebesar **9,000** atau setara dengan prosentase pencapaian sebesar **97,92%** yang berarti bahwa secara umum implementasi GCG untuk Aspek Pemegang Saham dan RUPS/Pemegang Saham telah berjalan dengan sangat baik. Hal ini dapat diketahui dari beberapa praktik yang telah berjalan sebagai berikut.

1. Pemegang Saham telah menetapkan hal-hal sebagai berikut:
   a. Pedoman pengangkatan dan pemberhentian Direksi;
   b. Pengangkatan anggota dan komposisi Direksi;
   c. Pengaturan mengenai rangkap jabatan bagi anggota Direksi.
2. Pemegang Saham telah melaksanakan penilaian terhadap calon anggota Direksi.
3. Pemegang Saham telah memiliki mekanisme pemberhentian anggota Direksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Pemegang Saham telah memberikan respon terhadap lowongan jabatan dan/atau pemberhentian sementara Direksi oleh Dewan Komisaris.
5. Pemegang Saham telah melaksanakan penilaian terhadap calon anggota Dewan Komisaris.
6. Pemegang Saham telah menetapkan pengaturan mengenai rangkap jabatan bagi anggota Dewan Komisaris.
7. Pemegang Saham telah memiliki mekanisme pemberhentian anggota Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Pemegang Saham telah memberikan pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP).

11. Pemegang Saham telah memberikan persetujuan atas usulan aksi korporasi yang perlu mendapatkan persetujuan Pemegang Saham.
12. RUPS/Pemegang Saham telah menetapkan hal-hal sebagai berikut:
    a. Gaji/honorarium, tunjangan, fasilitas dan tantiem/insentif kinerja untuk Direksi dan Dewan Komisaris;
    b. Auditor eksternal yang mengaudit Laporan Keuangan Perusahaan;
    c. Penggunaan laba bersih
13. Pemegang Saham telah memberikan:
    a. Persetujuan Laporan Tahunan termasuk pengesahan Laporan Keuangan, serta tugas pengawasan Dewan Komisaris.
    b. Arahan/pembinaan implementasi Tata Kelola Perusahaan yang Baik kepada Direksi dan Dewan Komisaris.
14. RUPS telah melakukan pengesahan terhadap Laporan Tahunan dan persetujuan terhadap Laporan Keuangan dilaksanakan tepat waktu.
15. RUPS telah mengambil keputusan sesuai dengan Undang Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan/atau Anggaran Dasar Perusahaan sehingga menghasilkan keputusan yang sah.
16. RUPS telah mengambil keputusan melalui proses yang terbuka dan adil.
17. Pemegang Saham tidak mencampuri kegiatan operasional Perusahaan yang menjadi tanggung jawab Direksi.
18. Pemegang Saham merespon informasi yang diterima dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris mengenai gejala penurunan kinerja dan kerugian Perusahaan yang signifikan.

Namun demikian masih terdapat kondisi implementasi GCG untuk Aspek Pemegang Saham dan RUPS/Pemegang Saham yang masih memerlukan perhatian sebagai *area of improvement* yaitu:

1. RUPS/Pemegang Saham belum menetapkan anggota Dewan Komisaris Independen.
2. RUPS/Pemegang Saham belum memiliki sistem/pedoman penilaian kinerja Direksi secara individual yang memuat sekurang-kurangnya indikator kinerja utama dan kriteria keberhasilan.
3. Kontrak Manajemen belum memuat target kinerja Direksi secara individu yang disahkan/disetujui Pemegang Saham/RUPS/Pemegang Saham.
4. RUPS/Pemegang Saham belum memberikan (penilaian) Kinerja Direksi secara individu berdasarkan laporan kinerja Direksi.

3. Aspek Dewan Komisaris/Dewan Pengawas

Berdasarkan hasil *assessment* yang telah dilakukan pada Aspek Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, skor yang dicapai adalah **32,8** dari bobot sebesar **35,000** atau setara dengan prosentase pencapaian sebesar **93,71%.** Hal ini berarti bahwa secara umum implementasi GCG untuk Aspek Dewan Komisaris/Dewan Pengawas telah berjalan dengan sangat baik. Hal ini dapat diketahui dari beberapa praktik yang telah berjalan sebagai berikut.

1. Dewan Komisaris telah memiliki dan melaksanakan program pengenalan untuk anggota Dewan Komisaris yang baru diangkat.
2. Dewan Komisaris telah melakukan pembagian tugas di antara anggota Dewan Komisaris.

3. Dewan Komisaris telah memiliki mekanisme pengambilan keputusan sebagaimana diatur di dalam Anggaran Dasar Perusahaan dan *Board Manual*.
4. Dewan Komisaris telah menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris.
5. Dewan Komisaris telah mendapatkan akses informasi perusahaan sesuai kewenangannya.
6. Dewan Komisaris telah memberikan persetujuan serta saran atas rancangan RJPP yang disampaikan Direksi.
7. Dewan Komisaris telah memberikan persetujuan serta saran atas rancangan RKAP yang disampaikan Direksi.
8. Dewan Komisaris telah memberikan arahan tentang hal-hal penting mengenai perubahan lingkungan bisnis yang diperkirakan akan berdampak besar pada usaha dan kinerja perusahaan secara tepat waktu dan relevan.
9. Dewan Komisaris dalam batas kewenangannya, merespon saran, harapan, permasalahan dan keluhan dari *stakeholders* (pelanggan, pemasok, kreditur, dan karyawan) yang disampaikan langsung kepada Dewan Komisaris ataupun penyampaian oleh Direksi.
10. Dewan Komisaris telah memberikan arahan tentang penguatan sistem pengendalian intern perusahaan.
11. Dewan Komisaris telah memberikan arahan tentang manajemen risiko perusahaan.
12. Dewan Komisaris telah memberikan arahan tentang sistem teknologi informasi yang digunakan perusahaan.
13. Dewan Komisaris telah memberikan arahan tentang kebijakan dan pelaksanaan pengembangan karir.
14. Dewan Komisaris telah memberikan arahan tentang kebijakan akuntansi dan penyusunan Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku umum di Indonesia (SAK).
15. Dewan Komisaris telah memberikan arahan tentang kebijakan pengadaan dan pelaksanaannya.
16. Dewan Komisaris telah memberikan arahan tentang kebijakan mutu dan pelayanan serta pelaksanaannya.
17. Dewan Komisaris telah mengawasi dan memantau kepatuhan Direksi dalam menjalankan peraturan perundangan yang berlaku dan perjanjian dengan pihak ketiga.
18. Dewan Komisaris telah mengawasi dan memantau kepatuhan Direksi dalam menjalankan perusahaan sesuai RKAP dan/atau RJPP.
19. Dewan Komisaris telah memberikan persetujuan atas transaksi atau tindakan dalam lingkup kewenangan Dewan Komisaris.
20. Dewan Komisaris telah mengajukan calon Auditor Eksternal kepada Pemegang Saham.
21. Dewan Komisaris melaporkan dengan segera kepada Pemegang Saham apabila terjadi gejala menurunnya kinerja Perusahaan.
22. Dewan Komisaris telah memberikan tanggapan/terlibat dalam pemilihan calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris anak perusahaan.
23. Dewan Komisaris telah mengusulkan calon anggota Direksi kepada Pemegang saham.
24. Dewan Komisaris mengusulkan remunerasi Direksi sesuai ketentuan yang berlaku.
25. Sekretaris Dewan Komisaris telah memiliki uraian tugas yang jelas dan telah berperan dalam membantu pelaksanaan fungsi dan tugas Dewan Komisaris.
26. Sekretaris Dewan Komisaris telah melakukan administrasi dan penyimpanan dokumen.
27. Sekretaris Dewan Komisaris telah menyediakan data/informasi yang diperlukan oleh Dewan Komisaris dan Komite-Komite di lingkungan Dewan Komisaris.
28. Dewan Komisaris telah memiliki Komite Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan kebutuhan Dewan Komisaris.
29. Komite Dewan Komisaris telah memiliki piagam/*charter* dan program kerja tahunan.

30. Komite Dewan Komisaris telah melaksanakan pertemuan rutin sesuai dengan program kerja tahunan, serta melakukan kegiatan yang ditugaskan Dewan Komisaris.
31. Komite Dewan Komisaris telah melaporkan kegiatan dan hasil penugasan yang diterimanya kepada Dewan Komisaris.

Namun demikian masih terdapat kondisi implementasi GCG untuk Aspek Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang masih memerlukan perhatian sebagai *area of improvement* yaitu:

1. Dewan Komisaris belum memiliki kebijakan tentang pelatihan bagi Dewan Komisaris.
2. Dewan Komisaris belum menyusun laporan tentang hasil pelatihan yang telah dijalani anggota Dewan Komisaris.
3. Pembagian tugas Dewan Komisaris belum mencakup seluruh bidang tugas Direksi
4. Rencana kerja tahunan Dewan Komisaris belum secara spesifik memuat rencana pemberian persetujuan atas rancangan RJPP yang disampaikan Direksi.
5. Rencana kerja tahunan Dewan Komisaris belum secara spesifik memuat sasaran/target yang ingin dicapai dan menyampaikan rencana kerja tersebut kepada Pemegang Saham.
6. Rencana kerja tahunan Dewan Komisaris belum secara spesifik memuat rencana pengawasan dan pemberian nasihat terhadap kebijakan sistem teknologi informasi dan pelaksanaannya.
7. Rencana kerja tahunan Dewan Komisaris belum secara spesifik memuat rencana pengawasan dan pemberian nasihat terhadap kebijakan sumber daya manusia dan pelaksanaannya.
8. Rencana kerja tahunan Dewan Komisaris belum secara spesifik memuat rencana pengawasan dan pemberian nasihat terhadap kebijakan pengadaan manusia dan pelaksanaannya.
9. Rencana kerja tahunan Dewan Komisaris belum secara spesifik memuat rencana pengawasan dan pemberian nasihat terhadap kebijakan mutu dan pelayanan dan pelaksanaannya.
10. Rencana kerja tahunan Dewan Komisaris belum secara spesifik memuat rencana pengawasan dan pemberian nasihat terhadap kepatuhan Perusahaan dalam menjalankan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar, serta terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat dengan pihak ketiga.
11. Rencana kerja tahunan Dewan Komisaris belum secara spesifik memuat rencana membahas atau memberikan persetujuan atas transaksi atau tindakan dalam lingkup kewenangan Dewan Komisaris, kebijakan dan pelaksanaan pengelolaan Anak Perusahaan/perusahaan patungan.
12. Rencana kerja tahunan Dewan Komisaris belum secara spesifik memuat rencana menelaah pengusulan remunerasi Direksi.
13. Rencana kerja tahunan Dewan Komisaris belum secara spesifik memuat rencana memantau implementasi prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik.
14. Dewan Komisaris belum secara menyeluruh (tersistem) memberikan arahan terkait dengan kebijakan dan pelaksanaan manajemen risiko.
15. Dewan Komisaris belum melakukan pembaharuan pernyataan tidak memiliki benturan kepentingan setiap awal tahun.
16. Dewan Komisaris belum memiliki pedoman tata tertib rapat Dewan Komisaris yang memadai.

17. Dewan Komisaris yang berhalangan hadir dalam rapat belum seluruhnya memberikan surat kuasa serta penjelasan ketidakhadiran dalam rapat.
18. Dewan Komisaris belum melakukan penilaian Direksi secara individu berdasarkan target dan indikator kinerja utama, serta melaporkan penilaian kinerja Direksi secara kolegial ataupun individu kepada Pemegang Saham.
19. Dewan Komisaris belum melakukan penilaian mandiri (*self assessment*) kinerja Dewan Komisaris, serta melaporkan hasil penilaian kepada Pemegang Saham.

4. Aspek Direksi

Berdasarkan hasil *assessment* yang telah dilakukan pada Aspek Direksi, skor yang dicapai adalah **33,23** dari bobot sebesar **35,000** atau setara dengan prosentase pencapaian sebesar **94,94%.** Hal ini berarti bahwa secara umum implementasi GCG untuk Aspek Direksi telah berjalan dengan sangat baik. Hal ini dapat dilihat dari beberapa praktik yang telah berjalan sebagai berikut.

1. Perusahaan melaksanakan progam pengenalan bagi Direksi yang baru diangkat dan program pelatihan/pembelajaran secara berkelanjutan.
2. Direksi menetapkan struktur/susunan organisasi yang sesuai dengan kebutuhan Perusahaan.
3. Direksi melakukan penetapan standar operasional baku (SOP) untuk proses bisnis inti (*core business*) Perusahaan.
4. Direksi memiliki Rencana Jangka Panjang (RJPP) yang disahkan oleh RUPS.
5. Direksi memiliki Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) yang disahkan oleh RUPS.
6. Direksi memberikan respon terhadap usulan peluang bisnis yang berpotensi meningkatkan pendapatan Perusahaan, penghematan/efisiensi Perusahaan, pendayagunaan aset, dan manfaat lainnya; serta merespon isu-isu terkini dari eksternal mengenai perubahan lingkungan bisnis dan permasalahannya secara tepat waktu dan relevan.
7. Direksi telah melaksanakan program/kegiatan sesuai dengan RKAP dan mengambil keputusan yang diperlukan setelah melalui analisis yang memadai dan tepat waktu.
8. Direksi telah memiliki sistem/pedoman pengukuran dan penilaian kinerja untuk unit dan jabatan dalam organisasi (struktural).
9. Direksi menetapkan target kinerja berdasarkan RKAP dan diturunkan secara berjenjang di tingkat unit, sub unit dan jabatan di dalam organisasi (struktural) di organisasi.
10. Direksi telah melakukan analisis dan evaluasi terhadap capaian kinerja untuk jabatan/unit-unit di bawah Direksi dan tingkat Perusahaan.
11. Direksi telah melaporkan pelaksanaan sistem manajemen kinerja kepada Dewan Komisaris.
12. Direksi telah menyusun dan menyampaikan kepada RUPS tentang usulan insentif kinerja untuk Direksi.
13. Direksi telah melaksanakan sistem peningkatan mutu produk dan pelayanan.
14. Direksi telah melaksanakan pengadaan barang dan jasa yang menguntungkan bagi Perusahaan, baik harga maupun kualitas barang dan jasa tersebut.
15. Direksi telah mengembangkan SDM, menilai kinerja dan memberikan remunerasi yang layak, dan membangun lingkungan SDM yang efektif mendukung pencapaian Perusahaan.

16. Direksi telah menerapkan kebijakan pengaturan untuk anak perusahaan (*subsidiary governance*).
17. Direksi melakukan pengendalian operasional dan keuangan terhadap implementasi rencana dan kebijakan Perusahaan secara maksimal. Hal ini ditunjukkan melalui:
    a. Direksi menerapkan kebijakan akuntansi dan penyusunan Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku umum di Indonesia (SAK);
    b. Direksi menerapkan manajemen risiko sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan;
    c. Direksi menetapkan dan menerapkan sistem pengendalian intern untuk melindungi dan mengamankan investasi dan aset Perusahaan;
    d. Direksi menindaklanjuti hasil pemeriksaan Satuan Pengawas Intern (SPI) dan auditor eksternal (KAP dan BPK).
18. Direksi melaksanakan pengurusan Perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar.
19. Perusahaan telah melakukan hubungan yang bernilai tambah bagi Perusahaan dan *stakeholders,* antara lain melalui pelaksanaan hubungan dengan pelanggan, pemasok, kreditur, Negara, karyawan Perusahaan; serta Pemegang Saham secara konsisten dan berkelanjutan.
20. Direksi memonitor dan mengelola potensi benturan kepentingan anggota Direksi dan manajemen di bawah Direksi yang ditunjukkan melalui penetapan dan implementasi kebijakan tentang mekanisme bagi Direksi dan pejabat struktural untuk mencegah pengambilan keuntungan pribadi dan pihak lainnya.
21. Direksi memastikan Perusahaan melaksanakan keterbukaan informasi dan komunikasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan penyampaian informasi kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham tepat waktu.
22. Direksi menyelenggarakan rapat Direksi dan menghadiri Rapat Dewan, melakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap keputusan rapat sebelumnya.
23. Direksi menyelenggarakan pengawasan intern yang antara lain ditunjukkan melalui:
    a. Satuan Pengawas Intern dilengkapi dengan faktor-faktor pendukung keberhasilan dalam pelaksanaan tugasnya;
    b. Satuan Pengawas Intern melaksanakan pengawasan intern untuk memberikan nilai tambah dan memperbaiki operasional Perusahaan.
24. Direksi menyelenggarakan fungsi Sekretaris Perusahaan yang ditunjukkan melalui terdapatnya faktor-faktor pendukung keberhasilan pelaksanaan tugas Sekretaris Perusahaan, dijalankannya fungsi Sekretaris Perusahaan, serta dievaluasinya fungsi Sekretaris Perusahaan tersebut.
25. Direksi menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

Namun demikian masih terdapat kondisi implementasi GCG untuk Aspek Direksi yang memerlukan perhatian sebagai *area of improvement,* yaitu:

1. Rencana kerja untuk pelatihan bagi anggota Direksi belum dapat disusun secara spesifik.
2. Perusahaan belum memiliki kebijakan tentang pedoman penyusunan sistem dan prosedur.
3. *Board Manual* belum mengatur mengenai standar waktu kesegeraan pengambilan keputusan dan pengkomunikasian keputusan kepada tingkatan organisasi di bawah Direksi yang terkait dengan keputusan tersebut.
4. Pencapaian target RKAP masih di bawah target.

5. Sistem pengukuran kinerja belum didukung dengan aplikasi komputer.
6. Direksi belum melaporkan tingkat pencapaian kinerja individu anggota Direksi kepada Dewan Komisaris.
7. Perusahaan belum menyusun *Information Technology Master Plan* (ITMP) sebagai pedoman dalam pengembangan teknologi informasi.
9. Perusahaan belum sepenuhnya melakukan evaluasi efektivitas pendidikan dan pelatihan karyawan.
10. Pedoman tata tertib rapat Direksi belum sepenuhnya memuat tata penyusunan risalah rapat, pelaksanaan evaluasi tindak lanjut hasil rapat sebelumnya, pembahasan/telaah atas arahan/usulan dan/atau tindak lanjut pelaksanaan atas keputusan Dewan Komisaris terkait dengan usulan Direksi.
11. *Internal Audit Charter* belum dimutakhirkan sehingga belum mengikuti metode audit berbasis risiko, serta tugas dan tanggung jawab belum meliputi penilaian terhadap internal kontrol perusahaan.
14. Belum ada anggota Satuan Pengawas Intern yang memperoleh sertifikasi profesi CIA/QIA.
15. PKPT belum dilakukan dengan pendekatan risiko (*risk based auditing*).

5. Aspek Pengungkapan Informasi dan Transparansi

Berdasarkan hasil *assessment* yang telah dilakukan pada Aspek Pengungkapan Informasi dan Transparansi, skor yang dicapai adalah **7,19** dari bobot sebesar **9,000** atau setara dengan prosentase pencapaian sebesar **79,8%.** Hal ini berarti bahwa secara umum implementasi GCG untuk Aspek Pengungkapan Informasi dan Transparansi masih belum berjalan dengan cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari beberapa praktik yang telah berjalan sebagai berikut.

1. Sarinah telah menyediakan informasi perusahaan kepada *stakeholders* terkait tingkat kepatuhan perusahaan terhadap kebijakan pengendalian informasi perusahaan.
2. Sarinah telah menyediakan media informasi publik agar dapat diperoleh dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana.
3. Sarinah telah menyediakan *website* untuk mempublikasikan kebijakan dan informasi penting perusahaan yaitu www.sarinah.co.id.
4. Sarinah telah menyediakan media lain untuk mengkomunikasikan kebijakan informasi penting perusahaan berupa majalah internal, bulletin, dan sebagainya. Sarinah juga telah mengadakan pertemuan/*gathering* dengan *stakeholders*.
5. Informasi yang disediakan dalam *website* Perusahaan maupun *website* bumn.go.id telah dimutakhirkan secara berkala.
6. Tingkat kemudahan akses terhadap kebijakan dan informasi penting perusahaan yang disediakan dalam *website* Perusahaan telah memadai.
7. Sarinah telah mengungkapkan informasi penting dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Laporan Tahunan 2017 Sarinah telah memuat mengenai Ikhtisar Data Keuangan Penting.
9. Laporan Tahunan 2017 Sarinah telah memuat Laporan Dewan Komisaris dan Laporan Direksi.
10. Laporan Tahunan 2017 Sarinah telah memuat profil perusahaan secara lengkap.
11. Laporan Tahunan 2017 Sarinah telah memuat pengungkapan praktik tata kelola perusahaan yang baik.

Namun demikian, masih terdapat kondisi implementasi GCG untuk Aspek Pengungkapan Informasi dan Transparansi yang memerlukan perhatian sebagai *area of improvement,* yaitu:

1. Sarinah belum memiliki kebijakan khusus terkait pengendalian informasi perusahaan yang memuat:
   a. Informasi apa saja yang dikategorikan informasi publik dan informasi rahasia perusahaan;
   b. Pihak-pihak yang dapat memberikan dan/atau menyampaikan informasi publik;
   c. Prosedur pengungkapan informasi perusahaan kepada *stakeholders*.
2. Pelaksanaan *gathering* dengan pemasok belum memasukkan agenda sosialisasi kebijakan Perusahaan.
3. Laporan Dewan Komisaris belum membahas secara spesifik mengenai Komite-Komite yang berada dibawah pengawasan Dewan Komisaris.
4. Sarinah belum berpartisipasi dalam kegiatan di bidang publikasi dan keterbukaan informasi sehingga dengan demikian belum memperoleh penghargaan di bidang publikasi dan keterbukaan informasi.

6. Aspek Lainnya

Berdasarkan hasil *assessment* yang telah dilakukan sampai dengan Aspek Pengungkapan Informasi dan Transparansi, skor yang dicapai adalah **88,5** atau setara dengan prosentase pencapaian sebesar **88,5 %.** Oleh karena itu, penilaian Aspek Lainnya dapat dilakukan. Namun demikian, bidang/area di Perusahaan, antara lain produk, proses, fungsi pendukung, kinerja organisasi, atau strategi belum menjadi *best practices* atau tujuan *benchmark* bagi perusahaan lain.

B. REKOMENDASI

Sebagai hasil *assessment* GCG, untuk temuan-temuan berkaitan dengan praktik yang masih perlu peningkatan atau perbaikan sesuai dengan prinsip-prinsip GCG, berikut disampaikan rekomendasi yang disusun berdasarkan lingkup wewenang masing-masing organ di Perusahaan.

1. Pemegang Saham

1. Pemegang Saham sebaiknya menetapkan anggota Dewan Komisaris Independen paling sedikit 20% dari anggota Dewan Komisaris secara eksplisit dalam keputusan pengangkatannya.
2. Pemegang Saham sebaiknya menetapkan sistem/pedoman penilaian kinerja Direksi secara individual yang memuat sekurang-kurangnya indikator kinerja utama dan kriteria keberhasilan.
3. Pemegang Saham sebaiknya memberikan penilaian Kinerja Direksi secara individu berdasarkan laporan kinerja Direksi.
4. Pemegang Saham sebaiknya mendorong Perusahaan untuk menyusun Kontrak Manajemen yang memuat target kinerja Direksi secara individu untuk disahkan/disetujui Pemegang Saham/RUPS.

2. Dewan Komisaris

1. Dewan Komisaris agar menyusun kebijakan tentang pelatihan bagi Dewan Komisaris dan menyusun laporan mengenai hasil pelatihan yang telah diikuti.
2. Dewan Komisaris sebaiknya menetapkan pembagian tugas sesuai bidang tugas Direksi.
3. Dewan Komisaris sebaiknya membuat rencana kerja yang secara spesifik memuat rencana pengawasan dan pemberian nasihat terkait proses persetujuan rancangan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP).
4. Dewan Komisaris sebaiknya membuat rencana kerja yang secara spesifik memuat rencana pengawasan dan pemberian nasihat terhadap mengenai kebijakan sumber daya manusia dan pelaksanaan kebijakan tersebut.
5. Dewan Komisaris sebaiknya membuat rencana kerja yang secara spesifik memuat rencana pengawasan dan pemberian nasihat terhadap kebijakan pengadaan dan pelaksanaannya.
6. Dewan Komisaris sebaiknya membuat rencana kerja yang secara spesifik memuat rencana pengawasan dan pemberian nasihat terhadap kepatuhan Perusahaan dalam menjalankan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar, serta terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat dengan pihak ketiga.
10. Dewan Komisaris sebaiknya membuat rencana kerja yang secara spesifik membahas atau memberikan persetujuan atas transaksi atau tindakan dalam lingkup kewenangan Dewan Komisaris atau RUPS/Pemegang Saham.
11. Dewan Komisaris sebaiknya membuat rencana kerja yang memuat rencana pengawasan dan pemberian nasihat terhadap terhadap pengelolaan Anak Perusahaan/perusahaan patungan.
12. Dewan Komisaris agar melakukan pembahasan mengenai kebijakan pengelolaan perusahaan anak perusahaan/perusahaan patungan dan pelaksanaannya.
13. Dewan Komisaris sebaiknya melakukan penilaian terhadap kinerja Direksi secara individu dan menyampaikan hasil penilaian kinerja Direksi tersebut kepada Pemegang Saham/RUPS.
14. Dewan Komisaris sebaiknya membuat rencana kerja yang secara spesifik memuat rencana pengawasan dan pemberian nasihat terkait pengusulan remunerasi Direksi.
15. Dewan Komisaris sebaiknya melakukan pembaharuan pernyataan benturan kepentingan setiap tahunnya melalui penandatanganan oleh masing-masing anggota Dewan Komisaris.
16. Dewan Komisaris sebaiknya menyertakan pernyataan benturan kepentingan dalam usulan tindakan Direksi yang harus mendapatkan rekomendasi Dewan Komisaris dan persetujuan RUPS/Pemegang Saham.
17. Dewan Komisaris sebaiknya membuat rencana kerja yang secara spesifik memuat rencana pengawasan dan pemberian nasihat terkait implementasi prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik.
18. Dewan Komisaris sebaiknya melakukan evaluasi pencapaian kinerja masing-masing anggota Dewan Komisaris, baik melalui rapat Dewan Komisaris ataupun lainnya.
19. Dewan Komisaris sebaiknya menambahkan ketentuan yang mengatur tentang pelaksanaan evaluasi atas tindak lanjut hasil rapat sebelumnya serta pembahasan atas usulan Direksi dan arahan/keputusan RUPS terkait usulan Direksi pada bagian rapat Dewan Komisaris dalam *Board Manual* atau pedoman lainnya.
20. Dewan Komisaris sebaiknya memberikan surat kuasa serta penjelasan secara tertulis jika Dewan Komisaris yang bersangkutan berhalangan hadir dalam rapat.

3. Direksi

1. Direksi agar menyusun rencana kerja terkait pelatihan Direksi secara terinci.
2. Direksi agar memastikan penyelesaian penyusunan *database* karyawan.
3. Direksi agar mengupayakan untuk pencapaian target Perusahaan, termasuk KPI.
4. Direksi agar mengupayakan pengembangan aplikasi komputer untuk pengukuran kinerja.
5. Direksi agar mengembangkan KPI individu anggota Direksi berdasarkan KPI Korporat.
6. Direksi agar memastikan dilakukannya audit atas IT di Perusahaan.
7. Direksi agar melakukan evaluasi efektivitas pendidikan dan pelatihan karyawan.
8. Direksi agar melakukan survei kepuasan karyawan secara berkala.
9. Direksi agar membuat surat pernyataan mengenai pengungkapan kepemilikan saham pada perusahaan lain untuk dicatat dalam daftar khusus.
10. Direksi agar melakukan pembaharuan *Board Manual*, khususnya pada bagian tata tertib rapat Direksi dengan menambahkan tata penyusunan risalah rapat, pelaksanaan evaluasi tindak lanjut hasil rapat sebelumnya, pembahasan/telaah atas arahan/usulan dan/atau tindak lanjut pelaksanaan atas keputusan Dewan Komisaris terkait dengan usulan Direksi dan menambahkan standar waktu kesegeraan pengambilan keputusan Direksi dan pengkomunikasiannya kepada pihak terkait.
11. Direksi agar mengupayakan anggota Satuan Pengawas Intern memperoleh sertifikasi profesi CIA/QIA.
12. Direksi sebaiknya membuat kebijakan khusus yang lebih spesifik terkait informasi apa saja yang dikategorikan informasi publik dan informasi rahasia perusahaan; pihak-pihak yang dapat memberikan dan/atau menyampaikan informasi publik; prosedur pengungkapan informasi perusahaan kepada *stakeholders.*
13. Direksi agar mensosialisasikan kebijakan perusahaan yang relevan kepada pemasok.

4. Satuan Pengawas Intern

1. Satuan Pengawas Intern agar memutakhirkan *Internal Audit Charter.*
2. Satuan Pengawas Intern agar menyusun PKPT dengan menggunakan pendekatan risiko (*risk based auditing*).

5. *Corporate Secretary*

1. *Corporate Secretary* agar senantiasa menyusun daftar khusus kepemilikan saham Dewan Komisaris dan Direksi.
2. *Corporate Secretary* sebaiknya menyajikan Laporan Tahunan yang dapat diunduh dalam *website* Perusahaan.
3. *Corporate Secretary* sebaiknya memastikan Laporan Tahunan memuat:
   a. Komite-Komite yang berada di bawah pengawasan Dewan Komisaris dalam Laporan Dewan Komisaris;
   b. Memuat alamat Kantor Akuntan Publik;
   c. Informasi terkait jasa lain yang diberikan akuntan selain jasa *financial audit*;
   d. Informasi terkait ikatan yang material untuk investasi barang modal yang mencakup (1) tujuan dari ikatan tersebut; (2) sumber dana yang diharapkan untuk memenuhi ikatan-ikatan tersebut, (3) mata uang yang menjadi denominasi,

langkah-langkah yang direncanakan perusahaan untuk melindungi risiko dari posisi mata uang asing yang terkait;

e. Informasi terkait besarnya dividen untuk masing-masing tahun untuk 2 tahun buku terakhir dan jumlah *Payout Ratio;*

f. Informasi terkait Surat Pernyataan Direksi tentang Tanggung Jawab Direksi atas Laporan Keuangan;

g. Opini akuntan atas Laporan Keuangan;

h. Deskripsi auditor independen di opini antara lain: (1) Nama dan tanda tangan; (2) Tanggal Laporan Audit; (3) Nomor ijin KAP.

PROFIL PERUSAHAAN

A. PROFIL PT SARINAH (PERSERO)

Berawal dari keinginan Ir. Soekarno sebagai Presiden pertama RI yang ingin menghargai dan memuliakan nama seorang pengasuhnya yang berasal dari kalangan bawah bernama "SARINAH", maka diabadikan sebuah nama *Department Store* pertama di Indonesia pada tahun 1962, tahun dicanangkan sebagai tahun berdirinya PT Sarinah (Persero) tepatnya tanggal 17 Agustus.

Sarinah adalah merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang ritel. Didirikan berdasarkan Akta Nomor 33 tanggal 17 Agustus 1962 dengan nama PT Department Store Indonesia, Sarinah merupakan pelopor bisnis ritel modern di Indonesia.

Pada awal berdirinya, Sarinah diharapkan berfungsi sebagai stimulator, stabilisator harga bahkan menjadi integrator yang mempunyai peran penghubung antara kepentingan produsen dan kepentingan konsumen dalam sistem distribusi nasional, sehingga dapat berpartisipasi dalam perubahan struktur perokonomian Indonesia. Dalam persaingan industri ritel yang semakin ketat, Sarinah dituntut untuk melakukan reposisi yang kemudian dituangkan di dalam visi dan misi perubahan yang baru yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing perusahaan.

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 10 April 1979, nama Perusahaan diubah menjadi PT Sarinah (Persero). Akta perubahan ini telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia No.C2-4498.HT.01.04 tahun 1983 tanggal 15 Juni 1983.

Anggaran dasar Sarinah telah mengalami beberapa kali perubahan, antara lain dengan akta No. 54 tanggal 17 Maret 1983 oleh Notaris Imas Fatimah, SH mengenai peningkatan modal dasar dari 2.500 lembar Saham Prioritas dan 10.000 lembar saham biasa dengan nilai nominal Rp1.000.000,00/lembar saham diubah menjadi 100.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp1.000.000,00/lembar saham dan mengubah modal ditetapkan dan disetor penuh dari Rp8,258 miliar menjadi Rp25 miliar. Akta perubahan ini telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia No.C2-13703.HT.01.04 tahun 1998 tanggal 14 September 1998.

Selanjutnya, berdasarkan Keputusan Pemegang Saham pada tanggal 8 Juli 2008, No. KEP-37/S.MBU/2008 dan KEP-04/D3-MBU/2008, akta No. 8 tanggal 11 Agustus 2008 dari Notaris Erni Rohaini, SH, MBA ditetapkan penambahan modal disetor menjadi Rp46,85 miliar. Penambahan tersebut berasal dari kapitalisasi cadangan Perusahaan tahun 2007 sebesar Rp21,85 miliar. Penambahan tersebut berasal dari kapitalisasi dengan Perusahaan tahun 2007 sebesar Rp21,85 miliar.

Sepanjang 53 tahun perjalanannya, Sarinah telah mengkokohkan diri pada usaha ritel yang berbasis pada produk dalam negeri di antaranya produk usaha kecil, menengah dan koperasi. Dengan memiliki keunggulan sebagai perusahaan ritel berciri khas Indonesia,

Sarinah telah memiliki pasar tersendiri dan memposisikan dirinya sebagai toko serba ada nasional, baik di Jakarta, Semarang, Yogyakarta, dan Malang.

Berdasarkan Anggaran Dasar Nomor 8 tanggal 11 Agustus 2008 yang dibuat di hadapan Notaris Erni Rohaini, SH, MBA, bidang usaha Sarinah meliputi:

a. Menyelenggarakan usaha perdagangan barang dan jasa, meliputi perdagangan eceran (ritel), perdagangan besar (*wholesale*), keagenan, distribusi, dan ekspor impor;
b. Menyelenggarakan usaha properti dan penyewaan ruangan untuk kegiatan perdagangan;
c. Produksi atau kerja sama produksi yang berkaitan dengan kegiatan perdagangan barang dan jasa;
d. Jasa hiburan (*entertainment*);
e. Pergudangan, pariwisata, perkantoran, apartemen, perhotelan, restoran, pendidikan di bidang ritel, prasarana dan jasa telekomunikasi, sarana olahraga dan periklanan, dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki.

Adapun kegiatan usaha Sarinah saat ini meliputi ritel, ekspor dan impor, distribusi dan penyewaan ruangan, *money changer* dan perhotelan.

B. VISI DAN MISI

Visi

Menjadi pusat perdagangan produk Indonesia pilihan utama dunia.

Penjelasan Visi

PT Sarinah (Persero) menegaskan untuk menjadi pusat perdagangan produk Indonesia (Indonesia Emporium) sebagai jati diri Sarinah yang tetap dipertahankan. Kritis inovatif merupakan dasar untuk membangun brand Sarinah sebagai pusat perdagangan dengan nilai budaya Indonesia yang selalu lebih unggul dibandingkan dengan pesaing. Selain itu, sopan dan santun merupakan nilai dalam memberikan pelayanan khas Indonesia kepada customer. Dengan Visi PT Sarinah yang telah dijelaskan di atas, Perusahaan menegaskan agar menjadi "Pilihan Utama Dunia" yang merupakan goal ambisius yang harus dicapai Perusahaan dan mempersiapkan PT Sarinah (Persero) untuk masuk ke arena pasar global.

Misi

1. Menjadi pusat perdagangan untuk produk-produk unggulan Indonesia.
2. Mengembangkan kualitas SDM dalam merchandising serta *service excellence.*
3. Menjadi outlet tujuan utama *customer* domestik dan manca negara untuk berbelanja produk-produk unggulan Indonesia di Jakarta.
4. Meningkatkan nilai tambah produsen dan *customer* dengan penjualan produk-produk unggulan Indonesia secara *wholesale* ke luar negeri (ekspor) maupun distribusi di dalam negeri.
5. Membantu pengembangan usaha kecil, menengah dan koperasi sebagai mitra strategis melalui pembinaan manajemen dan pemasaran.
6. Menjadi mitra pemerintah untuk mengendalikan, melakukan impor produk-produk yang bermanfaat dan strategis.
7. Mengembangkan manajemen yang berstandar Internasional dengan berorientasi pada teknologi informasi.
8. Menerapkan *Good Corporate Governance* secara optimal pada seiap aspek bisnis.

C. BUDAYA PERUSAHAAN

PT Sarinah (Persero) mempunyai Budaya Perusahaan yang disebut dengan CITA yang terdiri dari:

- *Customer Oriented*

  Mengutamakan pelanggan dengan mengetahui dan memenuhi kebutuhan mereka.
- *Integrity*

  Mengutamakan kejujuran, kepercayaan dan keadilan dalam segala hal.
- *Teamwork*

  Membangun kerjasama yang solid untuk menghasilkan kinerja yang maksimal.
- *Attitude*

  Berperilaku sopan dan santun, amanah, *positive thinking* dan saling menghargai satu sama lain.

D. AKTIVITAS PERUSAHAAN

Berdasarkan Anggaran Dasar terakhir pasal 3 tentang Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha, maka maksud dan tujuan dari Perusahaan adalah melakukan usaha di bidang perdagangan, properti, dan jasa, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Perusahaan untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapatkan/mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perusahaan dengan menerapkan prinsi-prinsip Perseroan Terbatas. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perusahaan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut.

a. Menyelenggarakan usaha perdagangan barang dan jasa, meliputi perdagangan eceran (ritel), perdagangan besar (*wholesale*), keagenan, distribusi, dan ekspor impor;
b. Menyelenggarakan usaha properti dan penyewaan ruangan untuk kegiatan perdagangan;
c. Produksi atau kerja sama produksi yang berkaitan dengan kegiatan perdagangan barang dan jasa;
d. Jasa hiburan (*entertainment*);
e. Perusahaan juga dapat melakukan kegiatan usaha dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang telah dimiliki Perusahaan, meliputi pergudangan, pariwisata, perkantoran, apartemen, perhotelan, restoran, pendidikan di bidang ritel, prasarana dan jasa telekomunikasi, sarana olahraga dan periklanan.

E. SUSUNAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi PT Sarinah (Persero) tahun buku 2017 adalah sebagai berikut.

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: Mualimin Abdi
Komisaris	: Luizah
Komisaris	: Eva Yuliana
Komisaris	: Farid Zainuddin

Dewan Direksi

Direktur Utama	: GNP Sugiarta Yasa
Direktur Keuangan dan Administrasi	: Bayu Rafisukmawan
Direktur Ritel	: Lies Permana Lestari
Direktur Trading & Properti	: Indyruwani A. Natanegara

F. TINGKAT KESEHATAN PERUSAHAAN

Tingkat kesehatan PT Sarinah (Persero) terdiri dari 3 (tiga) aspek, yaitu: aspek keuangan, operasional, dan administrasi. Penilaian tingkat kesehatan PT Sarinah (Persero) tahun buku 2017 menghasilkan nilai bobot yang dikategorikan "SEHAT", klasifikasi "A" dengan skor 65,00. Realisasi tingkat kesehatan 2017 tersebut telah mencapai target yang diharapkan. Berikut gambaran ringkas penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan dari 3 (tiga) aspek yang dinilai.

Tabel Penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan

INDIKATOR	2017	
	Realisasi	Anggaran
Keuangan	39,00	43,50
Operasional	15,00	15,00
Administrasi	11,00	15,00
Total Nilai/Skor	**65,00**	**73,50**
Klasifikasi Perusahaan	**A (SEHAT)**	**A (SEHAT)**

G. METODOLOGI *SELF ASSESSMENT* GCG

Tujuan *Assessment* GCG

Tujuan pelaksanaan *assessment* implementasi GCG di PT Sarinah (Persero)adalah:

a. Mengukur kualitas implementasi GCG di PT Sarinah (Persero) melalui penilaian/evaluasi tingkat pemenuhan kriteria GCG dengan kondisi nyata yang diterapkan di PT Sarinah (Persero), melalui pemberian skor/nilai atas implementasi GCG dan kategori kualitas implementasi GCG-nya;

b. Mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan implementasi GCG di PT Sarinah (Persero), serta mengusulkan rekomendasi perbaikan untuk mengurangi celah (*gap*) antara kriteria GCG dengan implementasi GCG di PT Sarinah (Persero);

c. Memonitor konsistensi implementasi GCG di PT Sarinah (Persero) dan memperoleh masukan untuk penyempurnaan dan pengembangan kebijakan *corporate governance* di lingkungan PT Sarinah (Persero).

Periode *Assessment* dan Implementasi GCG

Periode implementasi GCG di PT Sarinah (Persero) yang dinilai dalam pelaksanaan a*ssessment* GCG ini adalah untuk tahun buku 2017.

Parameter Penilaian

Berdasarkan standar alat uji Keputusan Sekretaris Menteri BUMN Nomor: SK-16/S.MBU/2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi Atas Implementasi Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) pada BUMN.

Indikator/parameter tersebut dikelompokan dalam 6 (enam) Faktor/Aspek Implementasi GCG yang terdiri dari:

1. Komitmen Terhadap Implementasi Tata Kelola Perusahaan yang Baik Secara Berkelanjutan;
2. Pemegang Saham dan RUPS/Pemegang Saham;
3. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas;
4. Direksi;
5. Pengungkapan Informasi dan Transparansi;
6. Aspek Lain.

Pengumpulan dan Penilaian Data

Metode pengumpulan dan penilaian data dilakukan dengan tahapan sebagai berikut.

1. Melakukan pengumpulan data melalui review dokumen dan wawancara.
2. Berdasarkan data yang diperoleh, *assessor* melakukan penilaian atas pemenuhan faktor-faktor yang diuji kesesuaian implementasinya dalam setiap parameter/subindikator.
3. Menganalisis pemenuhan faktor-faktor yang diuji kesesuaian implementasinya pada setiap parameter/subindikator.

   Tingkat pemenuhan implementasi GCG oleh BUMN untuk setiap faktor-faktor yang diuji kesesuaian implementasinya dalam setiap parameter/subindikator ditetapkan sebagai berikut.

   0% Seluruh unsur kriteria dalam parameter pengujian tidak dilaksanakan
   25% Sebagian kecil unsur kriteria dalam parameter pengujian dilaksanakan
   50% Sebagian dari unsur kriteria dalam parameter pengujian dilaksanakan
   75% Sebagian besar dari unsur kriteria parameter pengujian dilaksanakan
   100% Seluruh unsur kriteria parameter pengujian dilaksanakan

4. Sebagai langkah akhir, *assessor* menetapkan nilai/skor hasil penilaian/evaluasi implementasi GCG PT Sarinah (Persero) dengan menetapkan klasifikasi peringkat kualitas implementasi GCG, baik per indikator, aspek maupun keseluruhan, berdasarkan kriteria sebagai berikut.

5. Sebagai langkah akhir, *assessor* menetapkan nilai/skor hasil penilaian/evaluasi implementasi GCG PT Sarinah (Persero) dengan menetapkan klasifikasi peringkat kualitas implementasi GCG, baik per indikator, aspek maupun keseluruhan, berdasarkan kriteria sebagai berikut.

Tingkat	Capaian	Peringkat
1	Nilai diatas 85	Sangat Baik
2	75 < X ≤ 80	Baik
3	60 < X ≤ 75	Cukup Baik
4	50 < X ≤ 60	Kurang Baik
4	Nilai ≤ 50	Tidak Baik

Pelaporan

Tahapan akhir dari proses *assessment* adalah pelaporan hasil *assessment. Assessor* menyajikan laporan hasil *assessment,* mencakup: Ringkasan Eksekutif, Profil Perusahaan dan Metodologi, Uraian Hasil *Assessment*, termasuk lampiran hasil *assessment.* Lampiran hasil *assessment* meliputi daftar skor Hasil *Assessment* dan Daftar Rekomendasi berikut pihak yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi.

Format laporan hasil penilaian/evaluasi implementasi GCG terdiri dari:

a. Halaman Judul;
b. Daftar Isi;
c. Ringkasan Eksekutif;
d. Profil Perusahaan dan Metodologi;
e. Uraian.

Indikator/Parameter			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG) - HAMBATAN & REKOMENDASI	KESIMPULAN/PENILAIAN		
				BOBOT	%	SKOR
1	Perusahaan memiliki Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*GCG Code*) dan pedoman perilaku (*code of conduct*).			1,218	87,5%	1,066
	1	Perusahaan memiliki Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*GCG Code*) yang ditinjau dan dimutakhirkan secara berkala.	Telah terdapat Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG Code), yang telah ditandatangani oleh Dewan Direksi dan Dewan Komisaris serta telah mengacu kepada Ketentuan Pedoman Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Badan Usaha Milik Negara namun belum ditinjau dan dimutakhirkan secara berkala.	0,609	87,5%	0,533
	2	Perusahaan memiliki Pedoman Perilaku yang ditinjau dan dimutakhirkan secara berkala.	Telah terdapat Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*), yang telah ditandatangani oleh Direksi dan Dewan Komisaris, yang telah memuat Pernyataan komitmen yang ditandatangani oleh tiga direksi dan tiga dewan komisaris PT Sarinah (Persero) namun belum ditinjau dan dimutakhirkan secara berkala. Pedoman Perilaku telah memuat nilai-nilai perusahaan : - telah memuat aturan etika perusahaan terhadap karyawan yaitu perusahaan mempedulikan masalah kesehatan dan keselamatan kerja serta pelestarian (Bab III) - telah memuat nilai-nilai perusahaan - telah memuat benturan kepentingan - telah memuat aturan pemberian dan penerimaan hadiah, jamuan, hiburan serta donasi (Bab III) - telah memuat perlindungan kerahasiaan informasi perusahaan (Bab III) - telah memuat aturan/uraian mengenai perlindungan dan pemanfaatan Aset Perusahaan (Bab III) - telah memuat etika perusahaan terhadap organisasi/kegiatan politik. (Bab III) - telah memuat etika perusahaan terhadap pemerintah, karyawan, kegiatan politik, pesaing, pemasok dan mitra kerja, konsumen, masyarakat dan lingkungan (Bab III) - penegakan pedoman perilaku (Bab IV)	0,609	87,5%	0,533

Indikator/Parameter			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG) - HAMBATAN & REKOMENDASI	KESIMPULAN/PENILAIAN		
				BOBOT	%	SKOR
			- telah memuat aturan mengenai pelaporan pelanggaran thd pedoman perilaku - penegakan pedoman perilaku, (Bab IV) - telah memuat aturan sanksi atas pelanggaran pedoman perilaku. (Bab IV). **Kelemahan:** ▪ GCG Code dan Code of Conduct belum dimutakhirkan secara berkala **Hambatan:** ▪ - **Rekomendasi:** ▪ Direksi agar memastikan agar pemutakhiran GCG Code dan Code of Conduct dilaksanakan bila terjadi perubahan sesuai dinamika perusahaan			
2	Perusahaan melaksanakan Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan Pedoman Perilaku secara konsisten.			1,217	94,8%	1,154

Indikator/Parameter			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG) - HAMBATAN & REKOMENDASI	KESIMPULAN/PENILAIAN		
				BOBOT	%	SKOR
	3	Direksi menunjuk seorang anggota Direksi sebagai penanggung jawab dalam penerapan dan pemantauan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.	Telah terdapat seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Rapat Direksi sebagai penanggung jawab dalam penerapan dan pemantauan Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Tugasnya adalah : - menyusun rencana kerja yang diperlukan untuk memastikan perusahaan memenuhi Pedoman Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara dan peraturan perundang-undangan lainnya dalam rangka melaksanakan prinsip-prinsip Tata Tata Kelola Perusahaan yang Baik; - menyusun rencana kerja yang diperlukan untuk memantau dan menjaga agar kegiatan usaha perusahaan tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku; - menyusun rencana kerja yang diperlukan untuk memantau dan menjaga kepatuhan perusahaan terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh perusahaan dengan pihak ketiga. Telah terdapat laporan mengenai pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik yang disampaikan kepada RUPS/Pemegang Saham dan Dewan Komisaris.	0,456	100%	0,456

Indikator/Parameter			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG) - HAMBATAN & REKOMENDASI	KESIMPULAN/PENILAIAN		
				BOBOT	%	SKOR
	4	Perusahaan menciptakan situasi kondusif untuk melaksanakan Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*GCG Code*) dan Pedoman Perilaku.	Telah terdapat kebijakan dan panduan tambahan yang dapat memberikan panduan lebih jauh tentang berbagai praktik yang terdapat dalam Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*GCG Code*). Kebijakan dan panduan tambahan tersebut telah dikomunikasikan dan disosialisasikan kepada Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan organ pendukungnya, Direksi dan pejabat satu tingkat di bawah Direksi melalui Kegiatan Sosialisasi pedoman GCG & Pedoman Perilaku. Telah terdapat kebijakan dan panduan tambahan yang dapat memberikan panduan lebih jauh tentang berbagai perkara yang terdapat dalam Pedoman Perilaku. Seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris telah menandatangani komitmen untuk mematuhi Pedoman Perilaku pada tanggal 08 Desember 2014. Karyawan Sarinah telah menandatangani pernyataan kepatuhan terhadap Pedoman Perilaku. Telah terdapat tingkat pemahaman yang baik terhadap Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan Pedoman Perilaku oleh Dewan Komisaris dan organ pendukungnya, Direksi dan karyawan perusahaan. Berdasarkan konfirmasi dengan karyawanbaru belum dilakukan proses pengenalan bagi karyawan baru tentang materi Pedoman Perilaku dan peraturan teknis/pedoman pelaksanaannya. **Kelemahan:** ▪ Karyawab baru belum diperkenalkan dengan Code of Conduct secara khusus **Hambatan:** ▪ - **Rekomendasi:** ▪ Direksi agar memastikan pengenalan dilakukan.	0,761	91,7%	0,698

Indikator/Parameter			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG) - HAMBATAN & REKOMENDASI	KESIMPULAN/PENILAIAN		
				BOBOT	%	SKOR
3	Perusahaan melakukan pengukuran terhadap penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.			0,608	100%	0,608
	5	Perusahaan melakukan *assessment* terhadap pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan *review* secara berkala.	Perusahaan telah melakukan penilaian untuk mengidentifikasi pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang baik di perusahaan melalui pengukuran pelaksanaan dan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik di perusahaan. Perusahaan telah melakukan evaluasi (review), untuk mendeskripsikan tindak lanjut pelaksanaan dan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik di perusahaan yang dilakukan pada tahun berikutnya setelah penilaian. Hasil assessment/penilaian dan evaluasi telah dilaporkan dalam Laporan Tahunan.	0,304	100%	0,304
	6	Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik menjadi salah satu unsur *Key Performance Indicator* (KPI) yang dituangkan dalam Kontrak Manajemen.	Telah terdapat KPI mengenai pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik yang dituangkan dalam Kontrak Manajemen; KPI mengenai pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik dapat berupa kualitas penerapan GCG (Skor Penilaian GCG), dapat juga mengenai pelaksanaan unsur-unsur GCG antara lain penerapan manajemen risiko, pengendalian intern, pengawasan intern (audit internal), pelaksanaan mekanisme pelaporan atas dugaan penyimpangan, tata kelola teknologi informasi, dan pedoman perilaku etika (code of conduct). Telah terdapat tingkat pencapaian yang memadai atas KPI mengenai pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik tersebut .	0,304	100%	0,304

Indikator/Parameter			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG) - HAMBATAN & REKOMENDASI	KESIMPULAN/PENILAIAN		
				BOBOT	%	SKOR
4	Perusahaan melakukan koordinasi pengelolaan dan administrasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).			1,37	77,77%	1,066
	7	Perusahaan memiliki kebijakan tentang kepatuhan pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara bagi Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, Direksi dan pejabat satu tingkat di bawah Direksi.	Telah terdapat kebijakan/SOP tentang pengelolaan terhadap kepatuhan dan penyampaian LHKPN Lingkungan PT. Sarinah (Persero). Telah terdapat keputusan Direksi tentang Jabatan dalam organisasi Sarinah yang wajib menyampaikan LHKPN kepada KPK. Telah terdapat keputusan Direksi tentang pejabat perusahaan yang ditugaskan melaksanakan koordinasi dengan KPK berkaitan dengan pengelolaan LHKPN di lingkungan perusahaan. Telah terdapat kebijakan/peraturan mengenai pemberian sanksi terhadap Penyelenggara Negara yang belum memyampaikan LHKPN sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.	0,609	100%	0,609
	8	Penyelenggara Negara/Wajib Lapor memahami kebijakan/SOP tentang kepatuhan pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara.	Telah terdapat pelaksanaan sosialisasi dan bimbingan teknis tentang LHKPN kepada pegawai terkait. Sekalipun sudah ada peningkatan, tapi belum seluruh Penyelenggara Negara mampu menyusun LHKPN secara tepat waktu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. **Kelemahan:** ▪ Laporan LHKPN masih belum dilaksanakan oleh semua. **Hambatan:** ▪ Kurangnya kesadaran dalam melaporkan LHKPN. **Rekomendasi:** ▪ Direksi agar memastikan pelaporan LHKPN oleh Penyelenggara tepat waktu.	0,304	62,5%	0,19

Indikator/Parameter			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG) - HAMBATAN & REKOMENDASI	KESIMPULAN/PENILAIAN		
				BOBOT	%	SKOR
	9	Perusahaan melaksanakan kebijakan/SOP tentang kepatuhan pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara.	Tingkat kepatuhan Penyelenggara Negara di perusahaan dalam menyampaikan LHKPN sudah jauh lebih baik dan sesuai harapan. Telah terdapat pelaporan berkala tentang perkembangan pemenuhan kewajiban menyampaikan LHKPN kepada KPK. Telah terdapat pemberian teguran bagi Penyelenggara Negara yang belum/tidak menyampaikan LHKPN sesuai peraturan perundang-undangan. **Kelemahan:** ▪ Tingkat kepatuhan Penyelenggara dalam menyampaikan LHKPN B*elum* sesuai harapan. **Hambatan:** ▪ Kurangnya kesadaran dalam melaporkan LHKPN. **Rekomendasi:** ▪ Direksi agar memastikan agar pelaporan LHKPN oleh Penyelenggara tepat waktu.	0,457	58,3%	0,267
5	Perusahaan melaksanakan program pengendalian gratifikasi sesuai ketentuan yang berlaku.			1,37	100%	1,37
	10	Perusahaan memiliki ketentuan/kebijakan tentang Pengendalian Gratifikasi.	Telah terdapat kebijakan/ketentuan tentang Pengendalian Gratifikasi yang meliputi komitmen Dewan Komisaris dan Direksi, ketentuan-ketentuan tentang gratifikasi, fungsi yang ditugaskan mengelola gratifikasi, mekanisme pelaporan gratifikasi, pemantauan atas pelaksanaan dan sanksi atas penyimpangan	0,304	100%	0,304

Indikator/Parameter			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG) - HAMBATAN & REKOMENDASI	KESIMPULAN/PENILAIAN		
				BOBOT	%	SKOR
			ketentuan gratifikasi.			
	11	Perusahaan melaksanakan upaya untuk meningkatkan pemahaman terhadap kebijakan/ketentuan pengendalian gratifikasi.	Telah terdapat pelaksanaan komunikasi dan sosialisasi tentang Pengendalian Gratifikasi kepada Dewan Komisaris, Direksi dan karyawan perusahaan. Telah terdapat kegiatan pendistribusian ketentuan dan perangkat Pengendalian Gratifikasi di lingkungan perusahaan. Tingkat pemahaman Dewan Komisaris, Direksi dan karyawan terhadap kebijakan Pengendalian Gratifikasi telah cukup baik. Telah terdapat kegiatan diseminasi tentang Pengendalian Gratifikasi kepada stakeholder perusahaan.	0,609	100%	0,609
	12	Perusahaan mengimplementasikan pengendalian gratifikasi.	Telah terdapat pelaksanaan komunikasi dan sosialisasi tentang Pengendalian Gratifikasi kepada Dewan Komisaris, Direksi dan karyawan perusahaan. Telah terdapat kegiatan pendistribusian ketentuan dan perangkat Pengendalian Gratifikasi di lingkungan perusahaan. Tingkat pemahaman Dewan Komisaris, Direksi dan karyawan yang memadai terhadap kebijakan Pengendalian Gratifikasi telah cukup baik. Telah terdapat kegiatan diseminasi tentang Pengendalian Gratifikasi kepada stakeholder perusahaan. Telah terdapat pelaporan tentang pengendalian gratifikasi di lingkungan perusahaan. Telah terdapat peninjauan dan penyempurnaan berkala terhadap perangkat pendukung.	0,457	100%	0,457

Indikator/Parameter			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG) - HAMBATAN & REKOMENDASI	KESIMPULAN/PENILAIAN		
				BOBOT	%	SKOR
6	Perusahaan melaksanakan kebijakan atas sistem pelaporan atas dugaan penyimpangan pada perusahaan yang bersangkutan (whistle blowing system).			1,217	100%	1,217
	13	Materi Pedoman telah mengatur mengenai Pelaporan atas penyelenggaraan sistem pelaporan pelanggaran.	Telah terdapat kebijakan mengenai pelaporan atas dugaan penyimpangan pada perusahaan (*whistle blowing system*). Materi Pedoman penerapan sistem pelaporan pelanggaran (whistle blowing) telah memuat hal-hal di bawah berikut: - mengatur mengenai Perlindungan pelapor; - mengatur mengenai Unit pengelola sistem pelaporan pelanggaran; - mengatur mengenai Kewajiban untuk melakukan pelaporan atas pelanggaran; - mengatur mengenai Mekanisme penyampaian pelanggaran (infrastruktur dan mekanisme, kerahasiaan dan perlindungan pelapor, komunikasi dengan pelapor); - mengatur mengenai Pelaksanaan investigasi;	0,304	100%	0,304
	14	Perusahaan melaksanakan kegiatan untuk memberikan pemahaman atas kebijakan pelaporan atas dugaan penyimpangan (*whistle blowing system*) .	Telah terdapat kegiatan sosialisasi kebijakan *whistle blowing system* kepada karyawan perusahaan. Telah terdapat kegiatan sosialisasi kebijakan whistle blowing system kepada stakeholders perusahaan.	0,304	100%	0,304

Indikator/Parameter			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG) - HAMBATAN & REKOMENDASI	KESIMPULAN/PENILAIAN		
				BOBOT	%	SKOR
	15	Perusahaan melaksanakan kebijakan tentang pelaporan atas dugaan penyimpangan pada perusahaan (*whistle blowing system*).	Telah terdapat sarana/media perusahaan yang memadai untuk mendukung pelaksanaan kebijakan *whistle blowing system*. Berdasarkan Laporan Tahunan 2017, belum ada laporan atau pengaduan yang masuk melalui Whistleblowing System PT. Sarinah (Persero), belum ada laporan atau pengaduan yang masuk melalui Whistleblowing System PT. Sarinah (Persero). Berdasarkan konfirmasi, telah dilaksanakan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan kebijakan whistle blowing secara berkala.	0,609	100%	0,609
	JUMLAH			7,000	92,57%	6,48

Indikator/Parameter			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG) - HAMBATAN & REKOMENDASI	KESIMPULAN/PENILAIAN		
				BOBOT	%	SKOR
7	RUPS/Pemilik Modal melakukan pengangkatan dan pemberhentian Direksi .			2,423	100%	2,423
	16	Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal menetapkan pedoman pengangkatan dan pemberhentian Direksi.	Telah terdapat pedoman pengangkatan dan pemberhentian Direksi mengatur/memuat hal-hal di bawah ini. Mekanisme penjaringan atau nominasi calon anggota Direksi, penilaian/pengujian atas kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) bagi anggota Direksi.	0,346	100%	0,346

Indikator/Parameter			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG) - HAMBATAN & REKOMENDASI	KESIMPULAN/PENILAIAN		
				BOBOT	%	SKOR
	17	Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal melaksanakan penilaian terhadap calon anggota Direksi.	Berdasarkan konfirmasi pada Pemegang Saham telah terdapat Daftar Bakal Calon yang disetujui oleh Menteri Negara BUMN dan berisikan nama-nama yang diperoleh melalui proses penjaringan dalam rangka memperoleh calon anggota Direksi, diundang secara tertulis oleh Tim dan mengikuti uji kelayakan dan kepatutan sesuai ketentuan yang berlaku. UKK telah dilakukan kepada seluruh calon terpilih oleh Lembaga Profesional dan dievaluasi oleh Tim terhadap bakal calon. Penetapan hasil akhir UKK dan Evaluasi oleh Tim disampaikan kepada Menteri Negara BUMN. Pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan menilai semua kriteria penilaian Direksi yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan. Anggota Direksi terpillih merupakan calon yang namanya tercantum dalam penetapan hasil UKK dan Evaluasi yang disampaikan oleh Tim.	0,692	100%	0,692
	18	Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal menetapkan pengangkatan anggota dan komposisi Direksi.	Berdasarkan konfirmasi pada Pemegang Saham, Penetapan anggota Direksi yang definitif oleh RUPS/Pemilik Modal tercatat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak masa jabatan tersebut berakhir, dilakukan melalui Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS tidak melalui upacara pelantikan atau serah terima jabatan sehingga tidak ada BAP RUPS pendukung. Pembidangan tugas Direksi telah ditetapkan dalam Surat Keputusan tentang Penunjukan Direksi, Jumlah Direksi telah sesuai dengan kebutuhan perusahaan yang memiliki latar belakang pendidikan/pengetahuan dan/atau pengalaman yang sesuai dengan jenis usaha Sarinah yang sesuai dengan pembidangan tugas anggota Direksi.	0,520	100%	0,520
	19	Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal menetapkan pengaturan mengenai rangkap jabatan bagi anggota Direksi.	Pemegang Saham telah menetapkan ketentuan mengenai jenis-jenis jabatan rangkap anggota Direksi yang menimbulkan benturan kepentingan dan pengaturan/mekanisme pengunduran diri dari jabatan rangkap tersebut atau jabatan anggota Direksi.	0,346	100%	0,346

Indikator/Parameter			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG) - HAMBATAN & REKOMENDASI	KESIMPULAN/PENILAIAN		
				BOBOT	%	SKOR
	20	Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal memberhentikan anggota Direksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	Pada tahun 2017 tidak ada pemberhentian anggota Direksi.	0,173	100%	0,173
	21	Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal memberikan respon terhadap lowongan jabatan dan/atau pemberhentian sementara Direksi oleh Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.	Tidak terdapat pemberhentian sementara Direksi oleh Dewan Komisaris.	0,346	100%	0,346
8	RUPS/Pemilik Modal melakukan pengangkatan dan pemberhentian Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.			1,731	96,66%	1,673
	22	Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal menetapkan pedoman pengangkatan dan pemberhentian Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.	Pemegang Saham telah memiliki pedoman pengangkatan dan pemberhentian Dewan Komisaris, memuat aturan/mengatur mengenai poin a dan b.	0,346	100%	0,346

Indikator/Parameter			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG) - HAMBATAN & REKOMENDASI	KESIMPULAN/PENILAIAN		
				BOBOT	**%**	**SKOR**
	23	Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal melaksanakan penilaian terhadap calon anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.	Berdasarkan Konfirmasi, PS menyebutkan telah mencari usulan calon anggota Dewan Komisaris, melakukan penilaian terhadap calon Dewan Komisaris mencakup semua kriteria penilaian Dewan Komisaris yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan di bidang BUMN, bahwa penetapan Dewan Komisaris terpilih telah berdasarkan hasil akhir penilaian.	0,519	100%	0,519
	24	Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal menetapkan pengangkatan anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan komposisinya.	Penetapan anggota Dewan Komisaris oleh RUPS/Pemilik Modal telah memenuhi ketentuan yaitu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak masa jabatan tersebut berakhir, melalui Keputusan Menteri BUMN sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penetapan Dewan Komisaris menggunakan Surat Keputusan Menteri BUMN, tidak melalui upacara pelantikan atau serah terima jabatan sehingga tidak ada BAP RUPS pendukung. Jumlah anggota Dewan Komisaris saat ini sama banyaknya dengan anggota Direksi. Berdasarkan kajian dokumen, tidak terdapat anggota Dewan Komisaris yang berasal dari mantan Direksi. **Kelemahan:** ▪ Pemegang Saham *Belum* menetapkan anggota Dewan Komisaris Independen secara khusus paling sedikit 20% dari anggota Dewan Komisaris. **Hambatan:** - **Rekomendasi:** ▪ Pemegang Saham agar menetapkan anggota Dewan Komisaris Independen paling sedikit 20% dari anggota Dewan Komisaris secara Eksplisit dalam keputusan pengangkatannnya.	0,347	83,33%	0,289155

Indikator/Parameter			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG) - HAMBATAN & REKOMENDASI	KESIMPULAN/PENILAIAN		
				BOBOT	%	SKOR
	25	Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal menetapkan pengaturan mengenai rangkap jabatan bagi anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.	Pemegang Saham/RUPS telah menetapkan pengaturan mengenai rangkap jabatan bagi anggota Dewan Komisaris. Keputusan RUPS/Pemilik Modal menetapkan jabatan-jabatan yang menimbulkan benturan kepentingan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	0,346	100%	0,346
	26	Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal memberhentikan anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	Penetapan pemberhentian anggota Dewan Komisaris telah dilakukan dengan keputusan Menteri. Berdasarkan konfirmasi pada Pemegang Saham menyatakan bahwa Anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan keputusan RUPS dan/atau keputusan Menteri dengan menyebutkan alasannya, dengan melalui tahapan sesuai ketentuan yang diatur.	0,173	100%	0,173
9	RUPS/ Pemilik Modal memberikan keputusan yang diperlukan untuk menjaga kepentingan usaha perusahaan dalam jangka panjang dan jangka pendek sesuai dengan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar.			1,385	100%	1,385

Indikator/Parameter			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG) - HAMBATAN & REKOMENDASI	KESIMPULAN/PENILAIAN		
				BOBOT	%	SKOR
	27	Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal memberikan pengesahan Rencana Jangka Penjang Perusahaan (RJPP) atau Revisi RJPP.	Pemegang Saham/RUPS telah menetapkan pedoman penyusunan RJPP, melakukan pembahasan/pengkajian terhadap rancangan RJPP atau Revisi RJPP. Pembahasan/pengkajian terhadap rancangan RJPP atau Revisi RJPP oleh RUPS, didahului oleh pemaparan Direksi atas hal-hal yang diagendakan, Dewan Komisaris menyampaikan pemaparan/ tanggapan atas hal-hal yang diusulkan oleh Direksi untuk diputuskan oleh RUPS/Pemegang Saham. Pemegang Saham /RUPS memberikan pengesahan/ persetujuan terhadap rancangan RJPP atau Revisi RJPP dilaksanakan tepat waktu.	0,519	100%	0,519
	28	Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal memberikan pengesahan Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP).	Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal telah menetapkan pedoman penyusunan RKAP, melakukan pembahasan/ pengkajian/penelaahan terhadap rancangan RKAP didahului pemaparan oleh Direksi. Dewan Komisaris menyampaikan pemaparan/tanggapan atas hal-hal yang diusulkan oleh Direksi untuk diputuskan oleh RUPS dan memberikan pengesahan/ persetujuan terhadap rancangan RKAP dilakukan tepat waktu.	0,520	100%	0,520
	29	Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal memberikan persetujuan/keputusan atas usulan aksi korporasi yang perlu mendapat persetujuan/keputusan RUPS/Pemilik Modal.	Pemegang Saham/RUPS telah melakukan pembahasan/pengkajian/penelaahan terhadap usulan Direksi yang perlu mendapat persetujuan/keputusan RUPS/Pemilik Modal. Pengambilan keputusan RUPS (fisik maupun bukan fisik) didahului dengan pemaparan oleh Direksi atau permintaan penjelasan atas hal-hal yang diagendakan untuk diputuskan oleh RUPS/Pemegang Saham. Mempertimbangkan tanggapan Dewan Komisaris atas hal-hal yang diusulkan oleh Direksi. Memberikan persetujuan/ keputusan terhadap usulan Direksi dilaksanakan tepat waktu.	0,346	100%	0,346

Indikator/Parameter			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG) - HAMBATAN & REKOMENDASI	KESIMPULAN/PENILAIAN		
				BOBOT	**%**	**SKOR**
10	RUPS/ Pemilik Modal memberikan persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan serta tugas pengawasan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas sesuai peraturan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar.			2,077	93,75%	1,947
	30	RUPS/Pemilik Modal memberikan penilaian terhadap kinerja Direksi dan kinerja Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.	Telah terdapat sistem/pedoman penilaian kinerja Direksi secara kolegial, yang memuat sekurang-kurangnya indikator kinerja utama dan kriteria keberhasilan. Kontrak Manajemen yang memuat target kinerja kolegial, target kinerja Dewan Komisaris secara kolegial yang disahkan/disetujui Pemegang Saham/RUPS. RUPS/Pemegang Saham telah memberikan penilaian Kinerja Dewan Komisaris/Dewan Pengawas (majelis) berdasarkan laporan kinerja Dewan Komisaris, (penilaian) Kinerja Direksi kolegial berdasarkan laporan kinerja Direksi dan mempertimbangkan tanggapan Dewan Komisaris melalui risalah RUPS tersebut. Penilaian kinerja telah dituangkan dalam Risalah RUPS/keputusan Menteri. Sistem/pedoman penilaian kinerja Dewan Komisaris (majelis), yang memuat sekurang-kurangnya indikator kinerja utama dan kriteria keberhasilan. **Kelemahan:** ▪ *Belum* terdapat system/pedoman penilaian kinerja Direksi secara individual. **Hambatan:** - **Rekomendasi:** ▪ Pemegang Saham agar mendorong perusahaan untuk menyusun kontrak Manajemen yang memuat target kinerja Direksi secara individu. ▪ Pemegang Saham memberikan penilaian kinerja Direksi secara individu	0,346	62,50%	0,216

Indikator/Parameter			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG) - HAMBATAN & REKOMENDASI	KESIMPULAN/PENILAIAN		
				BOBOT	%	SKOR
			berdasarkan laporan kinerja Direksi.			
	31	RUPS menetapkan gaji/honorarium, tunjangan, fasilitas dan tantiem/insentif kinerja untuk Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.	RUPS telah melakukan penetapan gaji/honorarium, tunjangan, dan fasilitas untuk Direksi dan Dewan Komisaris. Pedoman gaji/honorarium, tunjangan dan fasilitas Direksi dan Dewan Komisaris telah memuat aturan dalam poin 1 dan 2. Pemegang Saham/RUPS telah menetapkan penghasilan Dewan Komisaris tantiem/insentif kinerja Dewan Komisaris dan Direksi sesuai dengan pedoman yang ditetapkan.	0,346	100%	0,346
	32	Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal menetapkan auditor eksternal yang mengaudit Laporan Keuangan perusahaan.	Pemegang Saham/RUPS telah menetapkan pedoman penunjukan audit eksternal. Melakukan pembahasan/pengkajian/penelaahan terhadap calon-calon Auditor Eksternal yang diajukan oleh Dewan Komisaris. Memutuskan penunjukan Auditor Eksternal yang akan mengaudit laporan keuangan perusahaan.	0,346	100%	0,346

Indikator/Parameter			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG) - HAMBATAN & REKOMENDASI	KESIMPULAN/PENILAIAN		
				BOBOT	%	SKOR
	33	Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal memberikan persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan serta tugas pengawasan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.	Telah terdapat pedoman penyusunan laporan tahunan *(annual report*) dan laporan tentang tugas pengawasan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang ditetapkan oleh Pemegang Saham/RUPS. Terdapat telaahan terhadap laporan tahunan (termasuk laporan keuangan) dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang dilakukan oleh Pemegang Saham. Pemberian persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan serta tugas pengawasan Dewan Komisaris yang dituangkan dalam risalah RUPS. Keputusan RUPS tentang memberikan/tidak memberikan pembebasan tanggung jawab terhadap pengurusan yang dilaksanakan oleh Direksi dan pengawasan yang dilaksanakan oleh Dewan Komisaris.	0,520	100%	0,520
	34	Pemegang Saham/RUPS/ Pemilik Modal menetapkan penggunaan laba bersih.	Telah terdapat pedoman/kebijakan deviden. Penetapan penggunaan laba bersih Perusahaan tahun buku 2017. RUPS menyetujui penggunaan laba bersih perseroan tahun buku 2017 sebagai cadangan dan sebgian deviden. Penetapan penggunaan laba bersih untuk dividen tidak melanggar ketentuan perjanjian pinjaman atau ketentuan penerbitan obligasi.	0,346	100%	0,346
	35	Pengesahan terhadap Laporan Tahunan dan persetujuan terhadap Laporan Keuangan dilaksanakan tepat waktu.	RUPS/Keputusan Pemilik Modal untuk pengesahan laporan tahunan telah dilaksanakan tepat waktu sesuai ketentuan, yaitu paling lambat 6 (enam) bulan setelah berakhirnya tahun buku yang lampau.	0,173	100%	0,173
11	RUPS/Pemilik Modal mengambil keputusan melalui proses yang terbuka dan adil serta dapat dipertanggungjawabkan.			0,519	100%	0,519

Indikator/Parameter			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG) - HAMBATAN & REKOMENDASI	KESIMPULAN/PENILAIAN		
				BOBOT	%	SKOR
	36	RUPS mengambil keputusan sesuai dengan Undang Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan/atau Anggaran Dasar Perusahaan sehingga menghasilkan keputusan yang sah.	Ketua RUPS telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang Perseroan Terbatas dan/atau anggaran dasar perusahaan. Peserta rapat telah memenuhi kuorum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang Perseroan Terbatas dan/atau anggaran dasar perusahaan.	0,173	100%	0,173
	37	RUPS mengambil keputusan melalui proses yang terbuka dan adil.	Pemegang Saham PT Sarinah (Persero) 100% adalah Negara Republik Indonesia. Berdasarkan *kuesioner,* Pemegang Saham diberikan kesempatan untuk mengajukan usul mata acara RUPS. Dalam hal anggaran dasar dan atau peraturan perundang-undangan mengharuskan adanya keputusan RUPS tentang hal-hal yang berkaitan dengan usaha perusahaan, keputusan yang diambil harus memperhatikan kepentingan wajar para pemangku kepentingan. RUPS dalam mata acara lain-lain tidak berhak mengambil keputusan kecuali semua Pemegang Saham hadir dan/atau diwakili dalam RUPS dan menyetujui tambahan mata acara RUPS. Keputusan atas mata acara tambahan tersebut harus disetujui dengan suara bulat.	0,346	100%	0,346
12	Pemegang Saham/Pemilik Modal melaksanakan Tata Kelola Perusahaan yang Baik sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya.			0,865	100%	0,865

Indikator/Parameter			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG) - HAMBATAN & REKOMENDASI	KESIMPULAN/PENILAIAN		
				BOBOT	**%**	**SKOR**
	38	Pemegang Saham/Pemilik Modal memberikan arahan/pembinaan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik kepada Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.	Telah terdapat arahan Pemegang Saham/Pemegang Saham dalam RUPS maupun dalam Keputusan Pemegang Saham tentang persetujuan transaksional. Terdapat pembahasan dan evaluasi atas pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada perusahaan. Pemegang Saham telah melakukan upaya-upaya menindaklanjuti area of improvement yang dihasilkan dari assessment atas pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada perusahaan yang bersangkutan.	0,346	100%	0,346
	39	Pemegang Saham/Pemilik Modal tidak mencampuri kegiatan operasional perusahaan yang menjadi tanggung jawab Direksi.	Tidak terdapat instruksi secara tertulis/surat/keputusan dari Pemegang Saham yang bersifat transaksional/operasional yang tidak berdasarkan usulan dari Direksi. Apabila ada instruksi/surat/keputusan Pemegang Saham terkait dengan operasional perusahaan tanpa ada usulan Direksi, maka hal tersebut merupakan intervensi Pemegang Saham.	0,173	100%	0,173
	40	Pemegang Saham/Pemilik Modal merespon terhadap informasi yang diterima dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris/Dewan Pengawas mengenai gejala penurunan kinerja dan kerugian perusahaan yang signifikan.	RUPS/Pemegang Saham telah menetapkan sistem penerimaan pelaporan mengenai gejala penurunan kinerja dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris/Dewan Pengawas;	0,346	100%	0,346
	JUMLAH			9,000	97,92%	8,812

Indikator/Parameter			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG) - HAMBATAN & REKOMENDASI	KESIMPULAN/PENILAIAN		
				BOBOT	%	SKOR
13	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas melaksanakan program pelatihan/pem-belajaran secara berkelanjutan.			1,348	75%	1,011
	41	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang baru diangkat mengikuti program pengenalan yang diselenggarakan oleh perusahaan.	- Dewan Komisaris telah menyampaikan kepada Direksi untuk diadakan program pengenalan bagi anggota Dewan Komisaris yang baru diangkat. - Anggota Dewan Komisaris yang baru diangkat telah mengikuti program pengenalan perusahaan. Tingkat kehadiran Dewan Komisaris dalam program tersebut cukup memadai.	0,674	100%	0,674
	42	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas melaksanakan program pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas sesuai kebutuhan.	- Telah terdapat rencana kerja dan anggaran untuk kegiatan pelatihan bagi anggota Dewan Komisaris. - Program pelatihan/pembelajaran untuk Dewan Komisaris telah dilaksanakan, tetapi hasil pelatihan tersebut belum ada. **Kelemahan:** ▪ *Belum* memiliki kebijakan tentang pelatihan bagi anggota Dewan Komisaris. ▪ *Belum* terdapat laporan tentang hasil pelatihan yang telah dijalani. **Hambatan:** - **Rekomendasi:** ▪ Agar menyusun kebijakan tentang pelatihan. ▪ Agar menyusun laporan hasil pelatihan yang telah diikuti **.**	0,674	50%	0,337

Indikator/Parameter			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG) - HAMBATAN & REKOMENDASI	KESIMPULAN/PENILAIAN		
				BOBOT	%	SKOR
14	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas melakukan pembagian tugas dan menetapkan faktor-faktor yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.			2,127	98,1%	2,086824
	43	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memiliki kebijakan dan melaksanakan pembagian tugas diantara anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.	Telah ada ketentuan yang mengatur tentang kewajiban Dewan Komisaris untuk melakukan pembagian tugas di antara anggota Dewan Komisaris. Juga telah ditetapkan pembagian tugas dari setiap Komisaris sesuai tugas Direksi. Selain itu juga ada penugasan Komisaris sebagai ketua atau wakil di setiap Komite Dewan Komisaris. **Kelemahan:** ▪ Pembagian tugas Dewan Komisaris *Belum* mencakup seluruh bidang tugas Direksi . **Hambatan:** ▪ Bidang pengawasan Dewan Komisaris masih fokus pada bidang operasional dan investasi. **Rekomendasi:** ▪ Dewan Komisaris sebaiknya menetapkan pembagian tugas sesuai bidang tugas Direksi.	0,648	93,8%	0,607824

Indikator/Parameter			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG) - HAMBATAN & REKOMENDASI	KESIMPULAN/PENILAIAN		
				BOBOT	%	SKOR
	44	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas menetapkan mekanisme pengambilan keputusan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.	Telah terdapat pengaturan mengenai mekanisme pengambilan keputusan Dewan Komisaris secara formal, terdiri dari (1) pengambilan keputusan melalui rapat Dewan Komisaris; (2) pengambilan keputusan diluar rapat (melalui sirkuler dan lain-lain). Komisaris juga telah menetapkan standar waktu tingkat kesegeraan pengambilan keputusan terhadap usulan Direksi. Juga telah ditentukan standar waktu untuk mengkomunikasikan hal tersebut kepada Direksi maksimal 7 hari sejak disahkan/ditandatangani.	0,493	100%	0,493
	45	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas menyusun rencana kerja setiap tahun yang memuat sasaran/ target yang ingin dicapai dan melaporkan secara tertulis kepada RUPS/Pemilik Modal.	- Telah terdapat kebijakan mengenai penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan Dewan Komisaris yang memadai. Telah terdapat penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan oleh Dewan Komisaris. Telah terdapat Rencana kerja dan anggaran tahunan yang memuat rencana kerja dan anggaran untuk melaksanakan rencana kerja tersebut, serta disahkan oleh Dewan Komisaris. - Rencana kerja dan anggaran tahunan telah memuat indikator kinerja utama dan target-targetnya yang mencerminkan ukuran keberhasilan pelaksanaan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi. Proses penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Dewan Komisaris telah menggunakan perangkat Dewan Komisaris secara optimal. - Telah terdapat penyampaian Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Dewan Komisaris kepada Direksi untuk dimasukkan sebagai bagian dari RKAP. Rencana kerja dan anggaran tahunan Dewan Komisaris telah disampaikan secara tertulis kepada Pemegang Saham untuk mendapatkan pengesahan.	0,493	100%	0,493

Indikator/Parameter			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG) - HAMBATAN & REKOMENDASI	KESIMPULAN/PENILAIAN		
				BOBOT	%	SKOR
	46	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas mendapatkan akses informasi perusahaan sesuai kewenangannya.	Telah terdapat kebijakan/pedoman Dewan Komisaris tentang informasi yang harus disediakan oleh Direksi dan kebijakan tersebut disampaikan kepada Direksi. Substansi kebijakan/pedoman diantaranya telah memuat: bentuk informasi yang disampaikan baik yang berkala maupun insidentil, standar waktu penyampaiannya dan mekanisme penyampaian informasi tersebut oleh Direksi. Berdasarkan konfirmasi melalui wawancara dengan Dewan Komisaris, penyediaan informasi tersebut dilaksanakan melalui forum rapat gabungan.	0,493	100%	0,493
15	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memberikan persetujuan atas rancangan RJPP dan RKAP yang disampaikan oleh Direksi.			2,904	91,07%	2,6448
	47	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memberikan persetujuan atas rancangan RJPP yang disampaikan oleh Direksi.	- Telah terdapat kebijakan mengenai mekanisme pemberian persetujuan/tanggapan/pendapat Dewan Komisaris terhadap rancangan RJPP yang disampaikan oleh Direksi. Telah terdapat proses telaah sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan, melalui proses pembahasan internal Dewan Komisaris. - Dewan Komisaris telah memastikan hasil telaah rancangan RJPP dikomunikasikan dan ditindaklanjuti oleh Direksi. Proses telaah yang dilakukan oleh Dewan Komisaris telah menggunakan seluruh perangkat di Dewan Komisaris. Dewan Komisaris memberikan saran atas rancangan RJPP Perusahaan tahun 2019-2023. RJPP tersebut sedang dalam proses pengerjaan. **Kelemahan:** ▪ *Belum* memiliki rencana kerja terkait proses persetujuan rancangan RJPP.	1,296	80%	1,0368

Indikator/Parameter			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG) - HAMBATAN & REKOMENDASI	KESIMPULAN/PENILAIAN		
				BOBOT	%	SKOR
			Hambatan: ▪ *Belum* adanya persamaan persepsi mengenai pentingnya menyusun rencana kerja dan anggaran secara terinci. **Rekomendasi:** ▪ Dewan Komisaris sebaiknya membuat rencana kerja yang memuat rencana pengawasan terkait proses persetujuan rancangan RJPP.			
	48	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memberikan persetujuan atas rancangan RKAP yang disampaikan oleh Direksi.	- Telah terdapat kebijakan Dewan Komisaris mengenai pelaksanaan pemberian persetujuan/tanggapan/pendapat Dewan Komisaris terhadap rancangan RKAP yang disampaikan oleh Direksi. - Telah terdapat rencana kerja Dewan Komisaris yang berkaitan dengan proses persetujuan rancangan RKAP yang disampaikan Direksi. - Telah terdapat proses telaah sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan, baik melalui proses pembahasan internal maupun rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi. - Telah terdapat hasil telaah rancangan RKAP secara tertulis (Risalah rapat internal Dewan Komisaris atau Rapat Komite Dewan Komisaris). - Dewan Komisaris telah memastikan hasil telaah dikomunikasikan dan ditindaklanjuti oleh Direksi. - Proses telaah yang dilakukan oleh Dewan Komisaris telah menggunakan seluruh perangkat di Dekom. Dikarenakan pada saat rapat pembahasan revisi RKAP dihadiri oleh seluruh anggota komisaris dan komite. - Telah terdapat tanggapan tertulis berupa pendapat dan saran mengenai rancangan RKAP kepada RUPS/Pemegang Saham. - Tanggapan atas rancangan RKAP oleh Dewan Komisaris telah diberikan dalam jangka waktu sebagaimana diatur dalam *Board Manual*. - Telah terdapat simpulan bahwa rancangan RKAP selaras dan/atau tidak selaras dengan RJPP. - *Assessor* menilai kualitas atas tanggapan Dewan Komisaris atas RKAP sudah	1,608	100%	1,608

Indikator/Parameter			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG) - HAMBATAN & REKOMENDASI	KESIMPULAN/PENILAIAN		
				BOBOT	%	SKOR
			cukup memadai.			
16	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memberikan arahan terhadap Direksi atas implementasi rencana dan kebijakan perusahaan.			9,593	98,18%	9,4189
	49	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memberikan arahan tentang hal-hal penting mengenai perubahan lingkungan bisnis yang diperkirakan akan berdampak besar pada usaha dan kinerja perusahaan secara tepat waktu dan relevan.	- Berdasarkan konfirmasi pada Dewan Komisaris, telah terdapat kebijakan/kriteria yang ditetapkan Dewan Komisaris mengenai informasi lingkungan bisnis dan permasalahannya yang diperkirakan berdampak pada usaha perusahaan dan kinerja perusahaan yang perlu mendapat perhatian Dewan Komisaris. - Berdasarkan konfirmasi pada Dewan Komisaris, telah terdapat penyediaan bahan bacaan/referensi yang memudahkan Dewan Komisaris memperbaharui pengetahuan tentang perubahan lingkungan bisnis dan permasalahan yang dihadapi perusahaan. - Dewan Komisaris telah melakukan telaah mengenai isu-isu terkini tentang perubahan lingkungan bisnis dan permasalahan yang dihadapi perusahaan. - Dewan Komisaris telah memberikan arahan kepada Direksi berdasarkan hasil telaah mengenai isu-isu terkini tentang perubahan lingkungan bisnis dan permasalahan yang dihadapi perusahaan, termasuk pemberian persetujuan jika respon perusahaan dalam kewenangan Dewan Komisaris. - Proses telaah yang dilakukan oleh Dewan Komisaris telah menggunakan seluruh perangkat di Dewan Komisaris (Komite Dewan Komisaris). - Berdasarkan konfirmasi pada dewan Komisaris, jika terdapat isu-isu perubahan lingkungan bisnis dan permasalahannya yang mempengaruhi	1,100	100%	1,1

Indikator/Parameter			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG) - HAMBATAN & REKOMENDASI	KESIMPULAN/PENILAIAN		
				BOBOT	%	SKOR
			usaha perusahaan, - Dewan Komisaris akan memberikan respon. Berdasarkan konfirmasi, Dewan Komisaris menyatakan bahwa tidak terdapat permasalahan/tantangan (ancaman dan peluang) yang terjadi dan berdampak signifikan terhadap kinerja perusahaan, yang tidak direspon oleh Dewan Komisaris.			
	50	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dalam batas kewenangannya, merespon saran, harapan, permasalahan dan keluhan dari *Stakeholders* (pelanggan, pemasok, kreditur, dan karyawan) yang disampaikan langsung kepada Dewan Komisaris/Dewan Pengawas ataupun penyampaian oleh Direksi.	- Berdasarkan konfirmasi pada Dewan Komisaris, telah terdapat mekanisme bagi Dewan Komisaris untuk merespon/menindaklanjuti saran, permasalahan atau keluhan dari stakeholder dan menyampaikan kepada Direksi tentang saran penyelesaian yang diperlukan. Berdasarkan konfirmasi pada Dewan Komisaris. Saran, harapan, permasalahan dan keluhan dari Stakeholders dibahas secara intensif oleh Dewan Komisaris dan pembahasan menghasilkan simpulan berupa saran penyelesaian kepada Direksi. Berdasarkan konfirmasi pada Dewan Komisaris, penyampaian saran, harapan, permasalahan dan keluhan dari Stakeholders kepada Direksi disampaikan melalui surat-menyurat dan rapat gabungan. - Berdasarkan konfirmasi pada Dewan Komisaris, Proses pembahasan atas saran, permasalahan atau keluhan stakeholder yang dilakukan oleh Dewan Komisaris menggunakan seluruh perangkat di Dewan Komisaris (Komite Dewan Komisaris). - Berdasarkan konfirmasi pada Dewan Komisaris, tidak terdapat permasalahan hubungan dengan stakeholder yang berdampak pada kinerja perusahaan, yang tidak dibahas dalam rapat Dewan Komisaris.	0,789	100%	0,789
	51	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memberikan arahan tentang penguatan sistem pengendalian	- Telah terdapat kebijakan Dewan Komisaris mengenai pengawasan dan pemberian nasihat terhadap kebijakan/rancangan sistem pengendalian intern dan pelaksanaannya.	1,100	100%	1,100

Indikator/Parameter			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG) - HAMBATAN & REKOMENDASI	KESIMPULAN/PENILAIAN		
				BOBOT	%	SKOR
		intern perusahaan.	Telah terdapat rencana Dewan Komisaris mengenai pengawasan dan pemberian nasihat terhadap kebijakan/rancangan sistem pengendaalian intern dan pelaksanaannya. Dewan Komisaris (Komisaris Utama) telah mendisposisikan kepada Komite Audit untuk melakukan telaah/memberi tanggapan terkait tindak lanjut hasil audit Divisi Perdagangan. - Dewan Komisaris melalui Komite Audit telah melakukan telaah atas: (1) kebijakan/rancangan dan pelaksanaan sistem pengendalian intern; (2) hasil evaluasi atas efektivitas pengendalian intern pada tingkat entitas; (3) hasil evaluasi atas efektivitas pengendalian intern pada tingkat operasional/aktivitas; (4) internal control report. - Telah terdapat hasil telaah Dewan Komisaris atas kebijakan/rancangan sistem pengendalian intern dan pelaksanaannya. Proses telaah yang dilakukan oleh Dewan Komisaris telah menggunakan seluruh perangkat di Dewan Komisaris (Komite Dewan Komisaris). - Dewan Komisaris telah menyampaikan arahan tentang peningkatan efektivitas sistem pengendalian intern kepada Direksi. Assessor menilai kualitas atas arahan Dewan Komisaris tentang peningkatan efektivitas sistem pengendalian intern telah memadai.			
	52	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memberikan arahan tentang manajemen risiko perusahaan.	- Telah terdapat kebijakan Dewan Komisaris mengenai pengawasan dan pemberian nasihat terhadap kebijakan manajemen risiko perusahaan dan pelaksanaannya. - Telah terdapat rencana Dewan Komisaris mengenai pengawasan dan pemberian nasihat terhadap kebijakan dan pelaksanaan manajemen risiko perusahaan. - Dewan Komisaris telah melakukan telaah atas kebijakan dan pelaksanaan manajemen risiko perusahaan (termasuk rencana kerja unit manajemen risiko), hasil analisis risiko atas rancangan RKAP dan strategi penanganannya, dan laporan pelaksanaan manajemen risiko berkala yang disampaikan oleh Direksi.	1,100	100%	1,100

Indikator/Parameter			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG) - HAMBATAN & REKOMENDASI	KESIMPULAN/PENILAIAN		
				BOBOT	%	SKOR
			- Telah terdapat hasil telaah Dewan Komisaris atas kebijakan dan pelaksanaan manajemen risiko perusahaan. - Proses telaah yang dilakukan oleh Dewan Komisaris telah menggunakan seluruh perangkat di Dewan Komisaris. - Dewan Komisaris sudah menyampaikan arahan tentang peningkatan kualitas kebijakan dan pelaksanaan manajemen risiko perusahaan. - *Assessor* menilai kualitas atas arahan Dewan Komisaris tentang manajemen risiko perusahaan telah memadai.			
	53	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memberikan arahan tentang sistem teknologi informasi yang digunakan perusahaan.	- Telah terdapat kebijakan Dewan Komisaris mengenai pengawasan dan pemberian nasihat terhadap kebijakan sistem teknologi informasi perusahaan dan pelaksanaannya. - Dewan Komisaris telah melakukan telaah terhadap kebijakan sistem teknologi informasi dan pelaksanaannya sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan. - Telah terdapat hasil telaah Dewan Komisaris terhadap kebijakan sistem teknologi informasi perusahaan dan pelaksanaannya. - Proses telaah yang dilakukan oleh Dewan Komisaris telah menggunakan seluruh perangkat di Dekom. Dikarenakan pada saat rapat pembahasan terkait IT dihadiri oleh seluruh anggota komisaris dan komite. - Dewan Komisaris telah menyampaikan arahan kepada Direksi tentang kebijakan - dan pelaksanaan sistem teknologi informasi. - *Assessor* menilai kualitas atas tanggapan Dewan Komisaris terkait sistem teknologi informasi cukup memadai.	1,100	100%	1,100

Indikator/Parameter			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG) - HAMBATAN & REKOMENDASI	KESIMPULAN/PENILAIAN		
				BOBOT	%	SKOR
	54	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memberikan arahan tentang kebijakan dan pelaksanaan pengembangan karir.	- Telah terdapat kebijakan Dewan Komisaris mengenai pengawasan dan pemberian nasihat terhadap kebijakan pengelolaan sumber daya manusia, khususnya tentang manajemen karir di perusahaan, sistem dan prosedur promosi, mutasi dan demosi di perusahaan dan pelaksanaan kebijakan tersebut. - Rencana Dewan Komisaris belum secara spesifik memuat mengenai pengawasan dan pemberian nasihat mengenai kebijakan sumber daya manusia dan pelaksanaan kebijakan tersebut. - Dewan Komisaris telah melakukan telaah terhadap: (1) kebijakan pengembangan karir serta pelaksanaannya, yang meliputi penempatan karyawan pada jabatan dalam struktur organisasi perusahaan, promosi dan demosi, serta mutasi; (2) Rencana promosi dan mutasi satu level jabatan di bawah Direksi. - Dewan Komisaris telah memberikan arahan berdasarkan hasil pengawasan dan penelaahan atas rencana suksesi dan pelaksanaannya. - Proses telaah yang dilakukan oleh Dewan Komisaris telah menggunakan seluruh perangkat di Dekom. Dikarenakan pada saat rapat pembahasan terkait SDM dihadiri oleh seluruh anggota komisaris dan komite. - Dewan Komisaris telah menyampaikan arahan kepada Direksi tentang kebijakan suksesi manajemen dan pelaksanaannya. - *Assessor* menilai kualitas atas tanggapan Dewan Komisaris terkait penerapan kebijakan suksesi manajemen cukup memadai. **Kelemahan:** ▪ Program Kerja Dewan Komisaris yang tercantum di dalam RKAP *Belum* memuat rencana kerja mengenai pengawasan terhadap kebijakan sumber daya manusia. **Hambatan:** ▪ *Belum* adanya persamaan persepsi mengenai pentingnya menyusun	1,101	90%	0,9909

Indikator/Parameter			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG) - HAMBATAN & REKOMENDASI	KESIMPULAN/PENILAIAN		
				BOBOT	%	SKOR
			rencana kerja dan anggaran secara terinci. **Rekomendasi:** ▪ Dewan Komisaris sebaiknya membuat rencana kerja yang memuat rencana pengawasan terhadap kebijakan sumber daya manusia.			
	55	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memberikan arahan tentang kebijakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia (SAK).	- Telah terdapat kebijakan Dewan Komisaris mengenai pengawasan dan pemberian nasihat terhadap kebijakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. - Telah terdapat rencana Dewan Komisaris melakukan pengawasan terhadap kebijakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan serta penerapan kebijakan tersebut. - Telah terdapat proses telaah terhadap kebijakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan, melalui pembahasan laporan keuangan triwulanan dengan manajemen ataupun auditor eksternal. - Telah terdapat saran berdasarkan hasil telaah terhadap kebijakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan. - Proses telaah yang dilakukan oleh Dewan Komisaris telah menggunakan seluruh perangkat di Dewan Komisaris (Komite Dewan Komisaris). - Dewan Komisaris telah menyampaikan arahan kepada Direksi tentang kebijakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan beserta penerapannya. - *Assessor* menilai kualitas atas tanggapan Dewan Komisaris terkait kebijakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan cukup memadai.	1,101	100%	1,101

Indikator/Parameter			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG) - HAMBATAN & REKOMENDASI	KESIMPULAN/PENILAIAN		
				BOBOT	%	SKOR
	56	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memberikan arahan tentang kebijakan pengadaan dan pelaksanaannya.	- Telah terdapat kebijakan Dewan Komisaris mengenai pengawasan dan pemberian nasihat terhadap kebijakan pengadaan barang dan jasa beserta pelaksanaannya. - Rencana Dewan Komisaris belum secara spesifik memuat mengenai pengawasan dan pemberian nasihat terhadap kebijakan pengadaan dan pelaksanaannya. - Dewan Komisaris telah memberikan saran berdasarkan hasil pengawasan dan penelaahan atas kebijakan pengadaan dan pelaksanaannya. - Proses telaah yang dilakukan oleh Dewan Komisaris telah menggunakan seluruh perangkat di Dekom. Dikarenakan pada saat rapat pembahasan terkait pengadaan dihadiri oleh seluruh anggota komisaris dan komite. - Dewan Komisaris telah menyampaikan arahan kepada Direksi terkait dengan kebijakan pengadaan dan pelaksanaannya. - *Assessor* menilai kualitas atas tanggapan Dewan Komisaris terkait kebijakan pengadaan dan pelaksanaannya telah memadai.	1,101	100%	1,101
	57	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memberikan arahan tentang kebijakan mutu dan pelayanan serta pelaksanaan kebijakan tersebut.	- Telah terdapat kebijakan Dewan Komisaris mengenai pengawasan dan pemberian nasihat terhadap kebijakan mutu dan pelayanan serta pelaksanaan kebijakan tersebut. - Rencana Kerja Dewan Komisaris belum secara spesifik memuat mengenai tugas pengawasan dan pemberian nasihat terhadap kebijakan mutu dan pelayanan beserta pelaksanaannya. - Dewan Komisaris telah melakukan telaah terhadap kebijakan mutu dan pelayanan beserta pelaksanaannya. - Dewan Komisaris telah memberikan arahan berdasarkan hasil telaah atas kebijakan mutu dan pelayanan beserta pelaksanaannya tersebut. - Proses telaah yang dilakukan oleh Dewan Komisaris telah menggunakan seluruh perangkat di Dewan Komisaris (Komite Dewan Komisaris).	1,101	95%	1,046

Indikator/Parameter			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG) - HAMBATAN & REKOMENDASI	KESIMPULAN/PENILAIAN		
				BOBOT	%	SKOR
			- Dewan Komisaris telah menyampaikan arahan kepada Direksi tentang kebijakan mutu dan pelayanan beserta pelaksanaannya. - *Assessor* menilai kualitas atas tanggapan Dewan Komisaris terkait kebijakan mutu dan pelayanan cukup memadai. **Kelemahan:** ▪ Program Kerja Dewan Komisaris yang tercantum di dalam RKAP *Belum* memuat rencana kerja mengenai pengawasan terhadap kebijakan mutu dan pelayanan . **Hambatan:** ▪ *Belum* adanya persamaan persepsi mengenai pentingnya menyusun rencana kerja dan anggaran secara terinci. **Rekomendasi:** ▪ Dewan Komisaris sebaiknya membuat rencana kerja yang rencana pengawasan terhadap kebijakan mutu dan pelayanan.			
17	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas melaksanakan pengawasan terhadap Direksi atas implementasi rencana dan kebijakan perusahaan.			6,479	98,29%	6,368
	58	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas mengawasi dan memantau kepatuhan Direksi dalam menjalankan peraturan perundangan yang berlaku dan perjanjian dengan pihak ketiga.	- Telah terdapat kebijakan mengenai pengawasan dan pemberian nasihat Dewan Komisaris atas kepatuhan perusahaan dalam menjalankan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan anggaran dasar serta kepatuhan perusahaan terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh perusahaan dengan pihak ketiga. - Rencana Kerja Dewan Komisaris belum secara spesifik memuat mengenai program kerja yang membahas kepatuhan direksi terhadap peraturan per-UU-an dan perjanjian dengan pihak ketiga. - Telah terdapat telaahan atas kepatuhan Direksi terhadap anggaran dasar,	1,417	96%	1,366

Indikator/Parameter			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG) - HAMBATAN & REKOMENDASI	KESIMPULAN/PENILAIAN		
				BOBOT	%	SKOR
			peraturan perundang-undangan yang mengatur bisnis perusahaan (regulasi sektoral), dan peraturan perundang-undangan lainnya serta perjanjian dengan pihak ketiga. - Telah terdapat hasil telaahan atas kepatuhan perusahaan dalam menjalankan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan anggaran dasar serta kepatuhan perusahaan terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh perusahaan dengan pihak ketiga. - Proses telaah yang dilakukan oleh Dewan Komisaris telah menggunakan seluruh perangkat di Dewan Komisaris (Komite Dewan Komisaris). - Telah terdapat arahan Dewan Komisaris kepada Direksi berdasarkan hasil telaahan. - *Assessor* menilai kualitas atas tanggapan Dewan Komisaris terkait kepatuhan Direksi terhadap anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan serta perjanjian dengan pihak ketiga cukup memadai. - Berdasarkan konfirmasi pada Dewan Komisaris, Jika terjadi pelanggaran oleh Direksi, Dewan Komisaris melakukan tindakan sesuai dengan kewenangannya dan melaporkan kepada Pemegang Saham/ RUPS. - Berdasarkan konfirmasi, tidak terdapat permasalahan mengenai pelanggaran, yang tidak dibahas oleh Dewan Komisaris. **Kelemahan:** ▪ Program Kerja Dewan Komisaris yang tercantum di dalam RKAP *Belum* memuat rencana kerja mengenai pengawasan terhadap kepatuhan perusahaan dalam menjalankan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar serta terhadap perjanjian dan komitmen dengan pihak ketiga. **Hambatan:** ▪ *Belum* adanya persamaan persepsi mengenai pentingnya menyusun rencana kerja dan anggaran secara terinci.			

Indikator/Parameter			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG) - HAMBATAN & REKOMENDASI	KESIMPULAN/PENILAIAN		
				BOBOT	%	SKOR
			Rekomendasi: ▪ Dewan Komisaris sebaiknya membuat rencana kerja yang memuat rencana pengawasan terhadap kepatuhan perusahaan dalam menjalankan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar serta terhadap perjanjian dan komitmen dengan pihak ketiga.			
	59	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas mengawasi dan memantau kepatuhan Direksi dalam menjalankan perusahaan sesuai RKAP dan/atau RJPP.	- Telah terdapat kebijakan Dewan Komisaris untuk memantau kepatuhan Direksi dalam menjalankan pengurusan perusahaan terhadap RKAP dan/atau RJPP. - Telah terdapat rencana Dewan Komisaris untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan RKAP. - Telah terdapat evaluasi pencapaian Perusahaan yang mencakup kesesuaian pelaksanaan program kerja (inisiatif perusahaan) dan anggaran yang telah ditetapkan dalam RKAP. - Berdasarkan pemeriksaan dokumen, Dewan Komisaris telah menandatangani Laporan Manajemen Triwulan I pada tanggal 28 April 2014, Semester I pada tanggal 22 Juli 2014, Triwulan III pada tanggal 31 Oktober 2014 dan Laporan Manajemen Tahunan pada tanggal 31 Maret 2015. - Dewan Komisaris telah melaporkan hasil evaluasi/pembahasan tersebut kepada RUPS/Pemegang Saham dalam laporan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Dewan Komisaris semesteran dan tahunan. - *Assessor* menilai kualitas atas evaluasi Dewan Komisaris atas kepatuhan Direksi dalam menjalankan perusahaan dan kesesuaian denngan RKAP dan/atau RJPP telah memadai. - Laporan Pengawasan Dewan Komisaris atas kinerja PT Sarinah (Persero) telah ditandatangani oleh seluruh anggota Dekom.	1,106	100%	1,106

Indikator/Parameter			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG) - HAMBATAN & REKOMENDASI	KESIMPULAN/PENILAIAN		
				BOBOT	%	SKOR
	60	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memberikan persetujuan atas transaksi atau tindakan dalam lingkup kewenangan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas atau RUPS/Pemilik Modal.	- Telah terdapat mekanisme bagi Dewan Komisaris mengenai pemberian persetujuan/otorisasi/rekomendasi Dewan Komisaris terhadap tindakan Direksi yang memerlukan rekomendasi/persetujuan Dewan Komisaris sesuai ketentuan yang berlaku dan/atau anggaran dasar. - Rencana Kerja Dewan Komisaris belum secara spesifik memuat mengenai program kerja untuk membahas transaksi atau tindakan dalam lingkup kewenangan Dewan Komisaris atau RUPS/Pemilik Modal. - Dewan Komisaris telah melakukan telaah terhadap transaksi atau tindakan Direksi melalui proses pembahasan internal Dewan Komisaris dan dengan Direksi, yang keduanya dituangkan dalam risalah rapat internal Dewan Komisaris dan risalah rapat Dewan Komisaris dan Direksi. - Dalam proses otorisasi Dewan Komisaris telah memastikan tindakan-tindakan strategis yang membutuhkan persetujuan atau rekomendasi Dewan Komisaris telah didukung dengan analisis risiko yang memadai. - Proses telaah yang dilakukan oleh Dewan Komisaris telah menggunakan seluruh perangkat di Dewan Komisaris (Komite Dewan Komisaris). - Pemberian otorisasi atau rekomendasi oleh Dewan Komisaris telah dilakukan paling lambat 14 hari sejak usulan atau dokumen secara lengkap diterima oleh Dewan Komisaris. **Kelemahan:** ▪ Program Kerja Dewan Komisaris yang tercantum di dalam RKAP *Belum* memuat rencana kerja mengenai pengawasan terhadap kepatuhan perusahaan dalam menjalankan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar serta terhadap perjanjian dan komitmen dengan pihak ketiga. **Hambatan:** ▪ *Belum* adanya persamaan persepsi mengenai pentingnya menyusun rencana kerja dan anggaran secara terinci.	0,966	94%	0,906

Indikator/Parameter			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG) - HAMBATAN & REKOMENDASI	KESIMPULAN/PENILAIAN		
				BOBOT	%	SKOR
			Rekomendasi: ▪ Dewan Komisaris sebaiknya membuat rencana kerja yang membahas atau memberikan persetujuan atas transaksi atau tindakan dalam lingkup kewenangan Dewan Komisaris atau RUPS.			
	61	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas (berdasarkan usul dari Komite Audit) mengajukan calon Auditor Eksternal kepada RUPS/Pemilik Modal.	- Telah terdapat kebijakan dan prosedur Dewan Komisaris mengenai proses penunjukan calon auditor eksternal dan/atau penunjukan kembali auditor eksternal dan penyampaian usulan calon auditor eksternal kepada RUPS/Pemegang Saham. - Telah terdapat rencana kerja penunjukan calon auditor dan anggaran biaya audit eksternal dalam RKAP Dewan Komisaris (yang dimuat dalam Rencana Aksi Komite Audit tahun 2017). - Dewan Komisaris melalui Komite Audit telah melakukan proses penunjukan calon auditor eksternal sesuai dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa masing-masing perusahaan, dan apabila diperlukan dapat meminta bantuan Direksi dalam proses penunjukannya. - Dewan Komisaris telah menyampaikan kepada RUPS/Pemilik Modal alasan pencalonan tersebut dan besarnya honorarium/imbal jasa yang diusulkan untuk eksternal auditor tersebut. - Dewan Komisaris telah mengevaluasi kinerja Auditor Eksternal sesuai dengan ketentuan dan standar yang berlaku.	0,778	100%	0,778
	62	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memastikan audit eksternal dan audit internal dilaksanakan secara efektif serta melaksanakan telaah atas pengaduan yang berkaitan dengan BUMN yang diterima oleh Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.	- Telah terdapat kebijakan Dewan Komisaris tentang pengawasan terhadap efektivitas pelaksanaan audit eksternal dan audit internal, serta pelaksanaan telaah atas pengaduan yang berkaitan dengan BUMN yang diterima oleh Dewan Komisaris. - Telah terdapat rencana kerja Dewan Komisaris tentang pengawasan efektivitas pelaksanaan audit eksternal dan audit internal, serta pelaksanaan telaah atas pengaduan yang berkaitan dengan BUMN yang diterima oleh Dewan Komisaris.	1,106	100%	1,106

Indikator/Parameter			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG) - HAMBATAN & REKOMENDASI	KESIMPULAN/PENILAIAN		
				BOBOT	%	SKOR
			- Telah terdapat penilaian atas efektivitas pelaksanaan audit eksternal melalui: (1) pemantauan kesesuaian penyelesaian progres audit dengan rencana kerjanya; (2) telaah kesesuaian pelaksanaan audit dengan standar profesi akuntan publik; dan (3) telaahan hasil audit eksternal dan kualitas rekomendasi audit eksternal. - Telah terdapat penilaian atas efektivitas pelaksanaan audit internal melalui: (1) telaah atas efektivitas pemantauan tindak lanjut hasil audit SPI dan auditor eksternal; (2) telaah atas kesesuaian pelaksanaan audit dengan standar audit internal; (3) kelengkapan atribut temuan dan kualitas rekomendasi hasil audit internal; dan (4) telaah rencana kerja pengawasan dan pelaksanaannya; (5) manajemen fungsi SPI. - Telah terdapat pelaksanaan: (1) telaah atas pengaduan yang berkaitan dengan BUMN yang diterima oleh Dewan Komisaris serta penyampaian saran berdasarkan hasil telaahan kepada Direksi; (2) telaahan terhadap seluruh pengaduan yang diterima oleh Dewan Komisaris. - Proses telaah yang dilakukan oleh Dewan Komisaris telah menggunakan seluruh perangkat di Dewan Komisaris (Komite Dewan Komisaris). - Telah terdapat penyampaian arahan kepada Direksi tentang peningkatan efektivitas audit internal dan audit eksternal.			

Indikator/Parameter			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG) - HAMBATAN & REKOMENDASI	KESIMPULAN/PENILAIAN		
				BOBOT	%	SKOR
	63	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas melaporkan dengan segera kepada RUPS/Pemilik Modal apabila terjadi gejala menurunnya kinerja perusahaan serta saran-saran yang telah disampaikan kepada Direksi untuk memperbaiki permasalahan yanag dihadapi.	- Telah terdapat kebijakan dan prosedur: (1) pelaporan kepada RUPS/Pemilik Modal jika terjadi gejala menurunnya kinerja perusahaan; dan (2) mekanisme pemberian saran segera kepada Direksi untuk memperbaiki permasalahan yang berdampak pada menurunnya kinerja perusahaan tersebut; (3) mekanisme untuk segera membahas gejala menurunnya kinerja perusahaan. - Telah terdapat telaahan Dewan Komisaris tentang gejala menurunnya kinerja perusahaan. - Telah terdapat arahan Dewan Komisaris kepada Direksi berdasarkan hasil telaah tentang gejala menurunnya kinerja perusahaan. - Proses telaah yang dilakukan oleh Dewan Komisaris telah menggunakan seluruh perangkat di Dewan Komisaris (Komite Dewan Komisaris).	1,106	100%	1,106
18	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pengelolaan anak perusahaan/perusahaan patungan.			1,504	79,57%	1,197
	64	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas melaksanakan pengawasan terhadap kebijakan pengelolaan anak perusahaan/perusahaan patungan dan pelaksanaannya.	- Telah terdapat kebijakan Dewan Komisaris mengenai pengawasan dan pemberian nasihat terhadap kebijakan pengelolaan anak perusahaan/perusahaan patungan dan pelaksanaan kebijakan tersebut. - Belum terdapat rencana pembahasan mengenai kebijakan dan pelaksanaan pengelolaan anak perusahaan/perusahaan patungan. - Telah terdapat proses evaluasi terhadap arah pengelolaan anak perusahaan/perusahaan patungan dan kinerja anak perusahaan/perusahaan patungan terkait dengan visi pengembangan usaha perusahaan, baik melalui proses pembahasan internal maupun rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi. - Dewan Komisaris belum memberikan evaluasi kesesuaian mengenai arah	0,985	68,8%	0,678

Indikator/Parameter			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG) - HAMBATAN & REKOMENDASI	KESIMPULAN/PENILAIAN		
				BOBOT	%	SKOR
			pengelolaan anak perusahaan dan kinerja anak perusahaan terkait dengan visi pengembangan usaha perusahaan. - Telah terdapat proses evaluasi yang dilakukan oleh Dewan Komisaris yang menggunakan seluruh perangkat di Dewan Komisaris (Komite Dewan Komisaris). - Dewan Komisaris telah melakukan proses telaah/pembahasan ttg anak perusahaan. **Kelemahan:** ▪ *Belum* memiliki rencana pembahasan mengenai kebijakan dan pelaksanaan pengelolaan anak perusahaan /perusahaan patungan. ▪ *Belum* terdapat dokumen terkait pembahasan dan pemberian arahan Dewan Komisaris mengenai pengelolaan anak perusahaan. **Hambatan:** ▪ *Belum* adanya persamaan persepsi mengenai pentingnya menyusun rencana kerja dan anggaran secara terinci. **Rekomendasi:** ▪ Dewan Komisaris sebaiknya membuat rencana kerja yang memuat rencana pengawasan dan pemberian arahan serta kebijakan mengenai pengelolaan anak perusahaan/perusahaan patungan.			

Indikator/Parameter			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG) - HAMBATAN & REKOMENDASI	KESIMPULAN/PENILAIAN		
				BOBOT	%	SKOR
	65	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dalam pemilihan calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan perusahaan/perusahaan patungan.	- Telah terdapat kebijakan dan prosedur peran Dewan Komisaris dalam pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris anak perusahaan/perusahaan patungan. - Dewan Komisaris perusahaan telah melakukan penilaian terhadap proses pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris anak perusahaan/perusahaan patungan, serta memberikan penetapan tertulis (setuju atau tidak setuju) terhadap proses pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris anak perusahaan/perusahaan patungan. - Penetapan tertulis terhadap proses pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris anak perusahaan/perusahaan patungan paling lambat 15 hari kalender terhitung sejak tanggal diterimanya calon Direksi dan Dewan Komisaris anak perusahaan/perusahaan patungan.	0,519	100%	0,519
19	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas berperan dalam pencalonan anggota Direksi, menilai kinerja Direksi (individu dan kolegial) dan mengusulkan tantiem/ insentif kinerja sesuai ketentuan yang berlaku dan mempertimbangkan kinerja Direksi.			2,438	86,79%	2,116
	66	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas mengusulkan calon anggota Direksi kepada Pemegang Saham/Pemilik Modal sesuai kebijakan dan kriteria seleksi yang ditetapkan.	- Dewan Komisaris telah memiliki kebijakan dan kriteria seleksi bagi calon Direksi dan pengusulan calon tersebut kepada Pemegang Saham/Pemilik Modal. - Dewan Komisaris telah melakukan telaah dan/atau penelitian/pemeriksaan terhadap calon-calon Direksi yang diusulkan Direksi, sebelum disampaikan kepada Pemegang Saham/Pemilik Modal. - Berdasarkan konfirmasi pada Dewan Komisaris. Dewan Komisaris menyatakan telah mengajukan usulan calon-calon anggota Direksi yang	0,502	100%	0,502

Indikator/Parameter			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG) - HAMBATAN & REKOMENDASI	KESIMPULAN/PENILAIAN		
				BOBOT	%	SKOR
			baru ke RUPS.			
	67	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas menilai Direksi dan melaporkan hasil penilaian tersebut kepada Pemegang Saham/Pemilik Modal.	- Telah terdapat kebijakan Dewan Komisaris mengenai penilaian kinerja Direksi dan pelaporan kepada Pemegang Saham/Pemilik Modal. - Telah terdapat rencana Dewan Komisaris mengenai pamantauan kinerja Direksi dan pelaporan kepada Pemegang Saham/Pemilik Modal. - Dewan Komisaris telah melakukan penilaian kinerja Direksi secara kolegial dalam forum rapat gabungan dengan Direksi. - Belum terdapat penilaian kinerja Direksi berdasarkan telaahan kriteria, target dan indikator kinerja utama yang tercakup dalam Kontrak Manajemen Direksi secara individu dengan realisasi pencapaian masing-masing. - Proses penilaian yang dilakukan oleh Dewan Komisaris telah menggunakan seluruh perangkat di Dewan Komisaris (Komite Dewan Komisaris). - Dewan Komisaris telah menyampaikan hasil penilaian kinera Direksi secara kolegial kepada Pemegang Saham. **Kelemahan:** ▪ *Belum* melakukan penilaian terhadap kinerja Direksi secara individu dan menyampaikan hasilnya kepada RUPS. **Hambatan:** - **Rekomendasi:**	0,968	66,70%	0,646

Indikator/Parameter			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG) - HAMBATAN & REKOMENDASI	KESIMPULAN/PENILAIAN		
				BOBOT	%	SKOR
			▪ Dewan Komisaris sebaiknya melakukan penilaian kinerja Direksi secara individu dan menyampaikan hasil nya kepada RUPS.			
	68	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas mengusulkan remunerasi Direksi sesuai ketentuan yang berlaku dan penilaian kinerja Direksi.	- Telah terdapat kebijakan Dewan Komisaris mengenai pengusulan remunerasi Direksi. - Rencana Kerja Dewan Komisaris belum secara spesifik memuat mengenai rencana Dewan Komisaris untuk menelaah pengusulan remunerasi Direksi. - Berdasarkan kuesioner, Dewan Komisaris menyatakan telah melakukan telaah terhadap pengusulan remunerasi Direksi, Pengusulan tantiem/insentif kinerja telah mempertimbangkan hasil penilaian kinerja Direksi (KPI) dan pencapaian tingkat kesehatan perusahaan. Proses telaah Dewan Komisaris atas pengusulan remunerasi Direksi telah dilakukan dengan menggunakan seluruh perangkat Dekom - Dewan Komisaris telah menyampaikan usulan remunerasi (gaji, tunjangan dan fasilitas serta tantiem/insentif kinerja) Direksi kepada RUPS/Pemegang Saham.	0,968	100%	0,968
20	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas melakukan tindakan terhadap potensi benturan kepentingan yang menyangkut dirinya.			0,571	83,30%	0,476
	69	Dewan komisaris/Pengawas memiliki kebijakan benturan	Telah terdapat kebijakan Dewan Komisaris mengenai (potensi) benturan kepentingan yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas Dewan Komisaris.	0,571	83,3%	0,476

Indikator/Parameter			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG) - HAMBATAN & REKOMENDASI	KESIMPULAN/PENILAIAN		
				BOBOT	**%**	**SKOR**
		kepentingan dan melaksanakan secara konsisten kebijakan tersebut.	Telah terdapat surat pernyataan Komisaris tidak memiliki benturan kepentingan pada awal pengangkatan. Dewan Komisaris belum membuat Pakta Integritas yang dilampirkan dalam Usulan Tindakan Direksi yang harus mendapatkan rekomendasi dari Dewan Komisaris dan persetujuan RUPS/Pemegang Saham. Berdasarkan kuesioner, Dewan Komisaris menyatakan tidak membuat daftar khusus ataupun surat keterangan lainnya terkait dengan pernyataan anggota Dewan Komisaris mengenai kepemilikan saham mereka dan/atau keluarga pada Perusahaan maupun perusahaan lain. **Kelemahan:** ▪ *Belum* melakukan pembaruan pernyataan tidak memiliki benturan kepentingan setiap awal tahun. ▪ *Belum* membuat pakta integritas yang dilampirkan dalam usulan Tindakan Direksi atas rekomendasi Dewan Komisaris dan persetujuan RUPS. **Hambatan:** - **Rekomendasi:** ▪ Dewan Komisaris sebaiknya melakukan pembaharuan pernyataan benturan kepentingan setiap tahun dan menyertakannya dalam usulan tindakan Direksi yang harus mendapatkan rekomendasi Dewan Komisaris dan RUPS.			

Indikator/Parameter			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG) - HAMBATAN & REKOMENDASI	KESIMPULAN/PENILAIAN		
				BOBOT	%	SKOR
21	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memantau dan memastikan bahwa prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik telah diterapkan secara efektif dan berkelanjutan.			1,659	86,16%	1,429
	70	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memastikan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik telah diterapkan secara efektif dan berkelanjutan.	- Telah terdapat kebijakan dan pedoman untuk memantau penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Rencana Kerja Dewan Komisaris belum secara spesifik memuat mengenai rencana pemantauan terhadap penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik - Telah terdapat telaah terhadap : (1) laporan hasil *assessment/review* atas Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, *GCG Code* dan kebijakan/ketentuan teknis lainnya, serta memantau tindak lanjut *area of improvement* hasil *assessment* GCG oleh Direksi; (2) laporan GCG yang diungkapkan dalam laporan tahunan. Telah terdapat penyampaian kepada Direksi mengenai hasil telaah Dewan Komisaris. - Proses telaah yang dilakukan oleh Dewan Komisaris telah menggunakan seluruh perangkat di Dewan Komisaris (Komite Dewan Komisaris). Dewan Komisaris telah menindaklanjuti area of improvement hasil assessment/review GCG yang menjadi kewenangannya. **Kelemahan:** ▪ Pedoman Kerja Dewan Komisaris yang tercantum di dalam RKAP *Belum* memuat rencana kerja untuk memantau penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik. **Hambatan:** ▪ *Belum* adanya persamaan persepsi mengenai pentingnya menyusun rencana kerja dan anggaran secara terinci. **Rekomendasi:**	0,985	94%	0,924

Indikator/Parameter			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG) - HAMBATAN & REKOMENDASI	KESIMPULAN/PENILAIAN		
				BOBOT	%	SKOR
			▪ Dewan Komisaris sebaiknya membuat rencana kerja yang memuat rencana pengawasan terkait dengan penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.			
	71	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas melakukan pengukuran dan penilaian terhadap kinerja Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.	- Dewan Komisaris telah memiliki kebijakan mengenai pengukuran dan penilaian terhadap Kinerja Dewan Komisaris Dewan Komisaris telah memiliki indikator pencapaian kinerja serta hasil penilaian/evaluasi pencapaian KPI tersebut yang termuat di dalam Laporan Tahunan Dewan Komisaris tahun 2016, yang telah ditanda tangani oleh seluruh anggota Komisaris - Berdasarkan Kuesioner Dewan Komisaris belum mengevaluasi pencapaian kinerja masing-masing anggota Dewan Komisaris dan dituangkan dalam risalah Rapat Dewan Komisaris. Penilaian kinerja Dewan Komisaris telah dilaporkan dalam Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris. **Kelemahan:** ▪ Dewan Komisaris *Belum* melakukan evaluasi pencapaian kinerja masing-masing anggotanya baik melalui rapat ataupun lainnya. **Hambatan:** - **Rekomendasi:** ▪ Dewan Komisaris sebaiknya melakukan evaluasi pencapaian kinerja masing-masing anggota Dewan Komisaris, baik melalui rapat ataupun lainnya.	0,674	75%	0,506

Indikator/Parameter			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG) - HAMBATAN & REKOMENDASI	KESIMPULAN/PENILAIAN		
				BOBOT	%	SKOR
22	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas menyeleng-garakan rapat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang efektif dan menghadiri rapat tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.			1,349	75,00%	1,012
	72	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memiliki pedoman/tata tertib Rapat Komisaris yang memadai.	- Pedoman/tata tertib Rapat Dewan Komisaris telah mengatur tentang etika rapat dan tata penyusunan risalah rapat. Namun belum mengatur mengenai pelaksanaan evaluasi tindak lanjut hasil rapat sebelumnya dan juga belum ada pengaturan mengenai telaah atas usulan Direksi dan arahan/keputusan RUPS terkait dengan usulan Direksi. **Kelemahan:** ▪ Pedoman etika rapat *Belum* mengatur tentang evaluasi tindak lanjut hasil rapat sebelumnya dan pembahasan atas usulan Direksi dan keputusan RUPS terkait usulan Direksi. **Hambatan:** **Rekomendasi:** ▪ Dewan Komisaris sebaiknya menambah ketentuan di Pedoman etika rapat tentang evaluasi atas tindak lanjut hasil rapat sebelumnya, serta pembahasan atas usulan Direksi pada bagian rapat Dewan Komisaris dalam *Board Manual* atau pedoman lainnya.	0,346	50,00%	0,173

Indikator/Parameter			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG) - HAMBATAN & REKOMENDASI	KESIMPULAN/PENILAIAN		
				BOBOT	%	SKOR
	73	Rapat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas diadakan secara berkala sesuai ketentuan yang berlaku dan/atau anggaran dasar.	- Dewan Komisaris telah memiliki rencana penyelenggaraan rapat internal maupun rapat gabungan (dengan Direksi) dengan jumlah dan waktu penyelenggaraan sesuai ketentuanyang berlaku. Rencana penyelenggaraan rapat tersebut termuat di dalam rencana program kerja Dewan Komisaris tahun 2017. Jumlah rapat dan agenda yang dibahas telah sesuai dengan yang direncanakan. - Anggota Dewan Komisaris telah menghadiri rapat-rapat Dewan Komisaris. Tapi belum ada surat kuasa yang dibuat oleh anggota Dewan Komisaris yang berhalangan hadir di dalam rapat Komisaris. **Kelemahan:** ▪ Dewan Komisaris yang berhalangan hadir dalam rapat *Belum* seluruhnya memberikan surat kuasa serta penjelasan ketidak hadiran dalam rapat. **Hambatan:** - **Rekomendasi:** ▪ Dewan Komisaris sebaiknya memberikan surat kuasa serta penjelasan secara tertulis jika yang bersangkutan berhalangan hadir dalam rapat.	0,657	75%	0,493
	74	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan keputusan hasil rapat sebelumnya.	Telah terdapat evaluasi Dewan Komisaris atas tindak lanjut hasil rapat sebelumnya. Hasil rapat Dewan Komisaris sebelumnya telah ditindak lanjuti seluruhnya.	0,346	100%	0,346

Indikator/Parameter			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG) - HAMBATAN & REKOMENDASI	KESIMPULAN/PENILAIAN		
				BOBOT	%	SKOR
23	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memiliki Sekretaris Dewan Komisaris/Dewan Pengawas untuk mendukung tugas kesekretariatan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.			2,593	100%	2,593
	75	Sekretariat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memiliki uraian tugas yang jelas.	Telah terdapat uraian tugas bagi Sekretariat Komisaris yang ditetapkan oleh Komisaris Utama. Tugas Pokok dan fungsi sekretariat Dekom PT. Sarinah (Persero) telah tercantum di dalam *Board Manual* pada Bab II poin 2.4.2 halaman 11-12, yaitu mengelenggarakan kegiatan adminstrasi di lingkungan Dewan Komisaris. menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris termasuk rapat dengan pemegang saham, menyediakan informasi untuk Dewan Komisaris dan Komite juga mengumpulkan data tehnis dari Komite-komite dan tenaga ahli.	0,804	100%	0,804
	76	Sekretariat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas melakukan administrasi dan penyimpanan dokumen.	Sekretariat Dewan Komisaris telah memiliki fasilitas penyimpanan dokumen seperti ruang kerja dan lemari penyimpanan. Sekretaris Dewan Komisaris telah mengadministrasikan surat keluar dan surat masuk ke Dewan Komisaris dan dokumen lainnya dengan tertib.	0,337	100%	0,337
	77	Sekretaris Dewan Komisaris/Dewan Pengawas menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan rapat/pertemuan antara Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dengan Pemegang Saham/Pemilik Modal, Direksi maupun pihak-pihak terkait lainnya.	- Telah terdapat undangan rapat Dewan Komisaris, yang disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan pihak-pihak lain yang diundang. Bahan-bahan rapat telah disediakan dan disampaikan kepada peserta rapat paling lambat 3 (tiga) hari sebelum diadakan rapat. - Dokumentasi hasil rapat Dewan Komisaris telah didokumentasikan secara memadai. Risalah rapat Dewan Komisaris telah mencantumkan: 1) pendapat dari masing2 anggota komisaris; 2) jalannya rapat (dinamika rapat); dan 3) kesimpulan/keputusan rapat. Setiap anggota Komisaris mendapat salinan risalah rapat, baik hadir maupun tidak.	0,959	100%	0,959

Indikator/Parameter			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG) - HAMBATAN & REKOMENDASI	KESIMPULAN/PENILAIAN		
				BOBOT	%	SKOR
			- Risalah rapat asli dari setiap rapat Dewan Komisaris telah disimpan di Sekretaris Dekom dan dapat diakses oleh semua anggota Komisaris.			
	78	Sekretaris Dewan Komisaris/Dewan Pengawas menyediakan data/informasi yang diperlukan oleh Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan Komite-Komite di lingkungan Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas.	- Telah terdapat data/informasi berkaitan dengan *monitoring* tindak lanjut hasil keputusan, rekomendasi, dan arahan Dewan Komisaris. Laporan terkait hal tersebut disampaikan dalam Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris. - Telah terdapat bahan/materi yang bersifat administrasi mengenai laporan/kegiatan Direksi dalam mengelola Perusahaan dan juga terdapat data/informasi dengan dukungan administrasi tentang hal-hal yg perlu mendapat persetujuan atau rekomendasi Dewan Komisaris. Dokumen tersebut telah tersimpan dengan baik dalam *file* Sekretaris Dewan Komisaris.	0,493	100%	0,493
24	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memiliki Komite Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang efektif.			2,438	100%	2,438
	79	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memiliki Komite Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan kebutuhan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.	Telah terdapat Komite audit dan Komite Investasi & Risiko Usaha untuk membantu tugas Dewan Komisaris melaksanakan tugasnya. Kedua komite tersebut telah dilaporkan kepada RUPS/Pemegang Saham. Ketua maupun anggota komite diangkat & diberhentikan oleh Dewan Komisaris.	0,643	100%	0,643

Indikator/Parameter			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG) - HAMBATAN & REKOMENDASI	KESIMPULAN/PENILAIAN		
				BOBOT	%	SKOR
	80	Komposisi keanggotaan yang mendukung pelaksanaan fungsi Komite dan independensi dari masing-masing Komite Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.	Anggota Komite telah memiliki pengetahuan dan pengalaman kerja yang cukup di bidang tugas masing-masing Komite. Anggota Komite telah berasal dari pihak di luar perusahaan dan tidak mempunyai kaitan dengan manajemen, kaitan kepemilikan dan dengan kegiatan usaha perusahaan. Jumlah keanggotaan masing-masing Komite yang berasal dari luar Dewan Komisaris telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	0,488	100%	0,488
	81	Komite Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memiliki piagam/charter dan program kerja tahunan.	Telah terdapat *Charter Komite Audit* PT. Sarinah (Persero) yang di tandatangani oleh Komisaris Utama dan disahkan pada Januari 2013. Muatan charter Komite Audit telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kebutuhan komite audit perusahaan. Program kerja Komite Audit telah memuat poin 1 hingga 4. Komite lainnya juga telah melakukan hal yang sama.	0,643	100%	0,643
	82	Komite Audit melaksanakan pertemuan rutin sesuai dengan program kerja tahunan serta melakukan kegiatan lain yang ditugaskan Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas.	Jumlah pertemuan berkala dan agenda yang dibahas sesuai dengan program kerja tahunan serta jumlah kegiatan lain yang ditugaskan sesuai yang ditugaskan Dewan Komisaris. Telah terdapat risalah rapat untuk setiap rapat antara Komisaris dan komite.	0,332	100%	0,332
	83	Komite melaporkan kegiatan dan hasil penugasan yang diterimanya kepada Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.	Telah terdapat laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap pelaksanaan penugasan disertai dengan rekomendasi. Telah terdapat laporan tahunan pelaksanaan kegiatan Komite Audit.	0,332	100%	0,332
	JUMLAH			35,000	93,71%	32,8

Indikator/Parameter			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG) - HAMBATAN & REKOMENDASI	KESIMPULAN/PENILAIAN		
				BOBOT	%	SKOR
25	Direksi melaksanakan program pelatihan/pembelajaran secara berkelanjutan.			1,089	100%	1,089
	84	Direksi yang baru diangkat mengikuti program pengenalan yang diselenggarakan oleh perusahaan.	Berdasarkan Board Manual halaman 43 poin 4.1.4 tentang Program Pengenalan Perseroan Kepada Pejabat Baru Pada Organ Perseroan menyebutkan bahwa program pengenalan Perseroan kepada pejabat baru, baik di jajaran Direksi maupun Komisaris, menjadi tanggung jawab Direktur Utama. Jika Direktur Utama berhalangan, maka menjadi tanggung jawab Komisaris Utama. Pada tahun 2017 ada perubahan Direksi dan telaah dilaksanakan pengenalan perusahaan. Seluruh anggota Direksi hadir dalam rapat pengenalan perusahaan.	0,467	100%	0,467
	85	Direksi melaksanakan program pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi anggota Direksi sesuai kebutuhan.	Terdapat di Pedoman GCG hal 44 tentang Tanggung jawab umum Direksi, poin 5 yang menyebutkan bahwa Direksi wajib mengikuti pelatihan/training/workshop yang sesuai dengan bidangnya, baik yang diselenggarakan internal perusahaan maupun eksternal. Berdasarkan konfirmasi, anggaran pelatihan telah dimasukan sebagai satu kesatuan pada anggaran kerja Direksi, sedangkan *rencana pelatihanbelum disusun*. Pada Laporan Tahunan 2017 tentang Program Orientasi dan Peningkatan Kompetensi Anggota Direksi telah memuat seluruh informasi pengembangan kompetensi yang telah diikuti Direksi.	0,622	100%	0,622
26	Direksi melakukan pembagian tugas/fungsi, wewenang dan tanggung jawab secara jelas.			1,867	75,0%	1,400

Indikator/Parameter			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG) - HAMBATAN & REKOMENDASI	KESIMPULAN/PENILAIAN		
				BOBOT	%	SKOR
	86	Direksi menetapkan struktur/susunan organisasi yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan.	Sarinah memiliki struktur organisasi yang telah disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Pada *Board Manual* Bab III dan Pedoman GCG Bab II Poin 3 tentang Direksi terdapat tugas, wewenang dan kewajiban Direksi secara umum, serta susunan dan pembagian kerja masing-masing Direksi (Direktur Utama, Direktur Operasi, Direktur Administrasi dan Keuangan, dan Direktur Pengembangan Usaha). Perusahaan telah menetapkan deskripsi dan spesifikasi jabatan, serta uraian tugas untuk semua tingkat jabatan di struktur organisasi. Uraian Jabatan menguraikan tugas, kewajiban dan tanggung jawab untuk setiap jabatan melalui uraian Tugas Pokok (Perencanaan, Pelaksanaan, Pengukuran Kinerja, Tindak Lanjut, Target, Laporan, dan Wewenang).	0,622	100%	0,622
			Terdapat Surat Direksi Nomor: 147/DIREKSI/I/II/2017 tanggal 6 Februari 2017 tentang Struktur Organisasi PT Sarinah (Persero) yang meminta persetujuan atas perubahan struktur organisasi, serta Surat Dewan Komisaris Nomor: 4/DEKOM/II/2017 tanggal 16 Februari 2017 tentang Persetujuan Struktur Organisasi PT Sarinah (Persero) yang menyetujui perubahan struktur organisasi.			
	87	Direksi menetapkan kebijakan-kebijakan operasional dan standard operasional baku (SOP) untuk proses bisnis inti (core business) perusahaan.	Perusahaan telah memiliki SOP untuk seluruh proses bisnis inti perusahaan sebagai panduan melaksanakan kegiatan perusahaan. Terdapat contoh internal memo tentang sosialisasi SOP, dan berdasarkan konfirmasi, sosialisasi juga dilakukan melalui intranet. SOP untuk proses bisnis inti perusahaan dilaksanakan konsisten dan tidak terdapat penyimpangan atas prosedur. **Kelemahan:** ▪ Sarinah *Belum* memiliki kebijakan tentang pedoman penyusunan sistem dan prosedur di perusahaan. **Hambatan:** ▪ *Belum* terdapat pedoman penyusunan sistem dan prosedur di perusahaan.	0,778	95%	0,7391

Indikator/Parameter			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG) - HAMBATAN & REKOMENDASI	KESIMPULAN/PENILAIAN		
				BOBOT	%	SKOR
			Rekomendasi: ▪ Direksi agar menyusun kebijakan tentang pedoman penyusunan sistem dan prosedur di perusahaan.			
	88	Direksi menetapkan mekanisme pengambilan keputusan atas tindakan perusahaan (*corporate action*) sesuai ketentuan perundang-undangan dan tepat waktu.	Pada AD perusahaan telah dimuat pada halaman 31-34 dan Board Manual tentang Rapat Direksi. Selain itu, Keputusan Direksi terkait telah mengatur tentang pengambilan keputusan di luar rapat. **Kelemahan:** ▪ Board Manual *Belum* mengatur mengenai standar waktu kesegeraan pengambilan keputusan dan pengkomunikasian. **Hambatan:** ▪ *Belum* terdapat penambahan poin terkait aturan mengenai standar waktu kesegeraan pengambilan keputusan Direksi dan pengkomunikasiannya kepada pihak terkait. **Rekomendasi:** ▪ Board Manual agar diperbaharui dan menambahkan point terkait aturan mengenai standar waktu kesegeraan pengambilan keputusan Direksi dan pengkomunikasiannya kepada pihak terkait.	0,467	33,3%	0,155511
27	Direksi menyusun perencanaan perusahaan.			4,044	97%	3,9235

Indikator/Parameter			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG) - HAMBATAN & REKOMENDASI	KESIMPULAN/PENILAIAN		
				BOBOT	%	SKOR
	89	Direksi memiliki Rencana Jangka Panjang (RJPP) yang disahkan oleh RUPS/Pemilik Modal.	Kebijakan, prosedur dan pedoman penyusunan RJPP yang dimuat dalam Board Manual Bab V poin 5.1.3 tentang Penyelenggaraan RUPS Tahunan Dalam Rangka Pengesahan Rencana Jangka Panjang Perusahaan; serta dalam Keputusan Direksi terkait. Rancangan RJPP sesuai dengan pedoman penyusunan RJPP yang ditetapkan. Beberapa risalah rapat yang membahas tentang RJPP dan saran Dewan Komisaris, baik dalam rapat internal Direksi maupun rapat pembahasan dengan manajemen Perusahaan. Direksi menyampaikan rancangan RJPP kepada Pemegang Saham pada tanggal 14 Oktober 2014. Saat ini sedang disusun RJPP 2019-2023 dan sedang dalam proses finalisasi.	0,778	100%	0,778
	90	Direksi memiliki Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) yang disahkan oleh RUPS/Menteri/Pemilik Modal.	Kebijakan, prosedur dan pedoman penyusunan RKAP dimuat dalam Board Manual Bab V poin 5.1.1 tentang Penyelenggaraan RUPS Tahunan Dalam Rangka Pengesahan RKAP; serta Keputusan Direksi terkait. Rancangan RKAP yang sesuai dengan pedoman penyusunan RKAP yang ditetapkan dan rancangan RKAP tersebut merupakan penjabaran tahunan RJPP. Beberapa risalah rapat yang membahas tentang RKAP dan saran Dewan Komisaris terkait, baik dalam rapat internal Direksi maupun rapat pembahasan dengan manajemen Perusahaan. Direksi menyampaikan rancangan RKAP 2019 kepada Pemegang Saham akhir Desember 2018. Direksi telah menyosialisasikan RKAP kepada seluruh karyawan perusahaan.	0,778	100%	0,778
	91	Direksi menempatkan karyawan pada semua tingkatan jabatan sesuai dengan spesifikasi jabatan dan memiliki rencana suksesi untuk seluruh jabatan dalam perusahaan.	Dalam Keputusan Direksi tersebut telah dimuat Sistem dan Prosedur Sumber Daya Manusia yang mengatur Prosedur Standar Kebutuhan Penambahan Karyawan; Rekrutmen Karyawan; Penerimaan Tenaga Ahli Kontrak Kerja; Pengembangan Kompetensi; Usulan Penambahan/Penetapan Jabatan Baru; Perencanaan Penempatan/Mutasi Karyawan. Berdasarkan kuisioner, terdapat posisi yang kosong di Fungsi Sistem Mutu, Sekretaris Perusahaan, Legal dan Manajemen Risiko. *Namun berdasarkan konfirmasi, hal tersebut dikarenakan perusahaan sedang mempertimbangkan untuk melaksanakan efisiensi struktur organisasi*. Kuisioner dari Manajemen Risiko dan Sistem Mutu menjawab	1,088	90%	0,9792

Indikator/Parameter			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG) - HAMBATAN & REKOMENDASI	KESIMPULAN/PENILAIAN		
				BOBOT	%	SKOR
			sebagian besar belum memenuhi kualifikasi. Namun sebanyak >75% lainnya menjawab sebagian besar sudah sesuai kualifikasi. Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa database sedang dalam proses penyusunan. Promosi pejabat satu level di bawah Direksi melalui proses seleksi dan dibahas dengan Dewan Komisaris. Terdapat beberapa risalah rapat yang membahas tentang SDM dan pengangkatan karyawan, termasuk pejabat satu level di bawah Direksi. penempatan karyawan telah dilaksanakan dengan tingkat obyektivitas dan transparansi yang memadai. **Kelemahan:** ▪ Berdasarkan konfirmasi, saat ini Sarinah sedang mengembangkan database karyawan yang memilki kemampuan dan kompetensi, serta pengalaman yang cukup untuk melakukan pekerjaan yang ditargetkan pada setiap posisi jabatan. **Hambatan:** - **Rekomendasi:** ▪ Direksi agar memastikan penyelesaian penyusunan *database* karyawan.			
	92	Direksi memberikan respon terhadap usulan peluang bisnis yang berpotensi meningkatkan pendapatan perusahaan, penghematan/efisiensi perusahaan, pendayagunaan aset, dan manfaat lainnya.	- Keputusan Direksi yang antara lain berisi Mekanisme Komunikasi, Penghargaan dan Keputusan Penting telah memuat mekanisme bagi Direksi untuk merespon usulan peluang bisnis dari manajemen. Selain itu, hal tersebut antara lain diatur dalam Pedoman Penerapan Manajemen Risiko Korporat PT Sarinah (Persero). Direksi telah menyampaikan usulan peluang bisnis kepada Dewan Komisaris disertai dengan studi kelayakan melalui rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi, serta melalui Surat Direksi. Peluang bisnis perusahaan yang dibahas dan disampaikan kepada Dewan Komisaris merupakan peluang yang belum terlambat untuk ditindaklanjuti.	0,95	50%	0,475

Indikator/Parameter			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG) - HAMBATAN & REKOMENDASI	KESIMPULAN/PENILAIAN		
				BOBOT	%	SKOR
			Kelemahan: ▪ Pencapaian target RKAP yang ditunjukkan dalam Laporan Manajemen Tahun 2017 sebesar 78,46%. **Hambatan:** ▪ **Rekomendasi:** ▪ Direksi agar mengupayakan pencapaian target Perusahaan.			
	93	Direksi merespon isu-isu terkini dari eksternal mengenai perubahan lingkungan bisnis dan permasalahannya, secara tepat waktu dan relevan.	Pada Board Manual dan Anggaran Dasar terdapat mekanisme rapat Direksi bahwa penyelenggaraan rapat Direksi dapat dilakukan sewaktu-waktu apabila dipandang perlu. Terdapat beberapa pembahasan mengenai tidak tercapainya target Perusahaan; kasus Sari Pan Pacific ditingkat peninjauan kembali; biaya untuk pensertifikatan Thamrin. Tidak terdapat perubahan lingkungan bisnis dan permasalahan yang berdampak signifikan pada usaha perusahaan dan kinerja perusahaan, yang tidak direspon oleh Direksi.	0,622	100%	0,622
28	Direksi berperan dalam pemenuhan target kinerja perusahaan.			8,089	95,1%	7,695798
	94	Direksi melaksanakan program/kegiatan sesuai dengan RKAP dan mengambil keputusan yang diperlukan setelah melalui analisis yang memadai dan tepat waktu.	Terdapat beberapa permohonan persetujuan antara lain perihal: Persetujuan Laporan Tahunan Tahun Buku 2017, termasuk laporan pelaksanaan tugas pengawasan Dewan Komisaris dan pengesahan laporan keuangan konsolidasian serta laporan program kemitraan dan bina lingkungan, penetapan penggunaan laba bersih, penetapan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit laporan Keuangan Konsolidasian, penetapan tantiem tahun buku 2017.	0,467	100%	0,467

Indikator/Parameter			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG) - HAMBATAN & REKOMENDASI	KESIMPULAN/PENILAIAN		
				BOBOT	%	SKOR
	95	Direksi memiliki sistem/pedoman pengukuran dan penilaian kinerja untuk unit dan jabatan dalam organisasi (struktural) yang diterapkan secara obyektif dan transparan.	Keputusan Direksi Sistem dan Prosedur atas Proses Bisnis PT Sarinah (Persero) yang berbasis KPKU dan pedoman KPI pada BUMN tersebut antara lain memuat dasar pengukuran dan penilaian kinerja untuk unit dan jabatan (struktural) dalam perusahaan. KPI Individu memuat rumus, cara penilaian, informasi sumber data, dan hasil penerapan prosedur. Indikator kinerja untuk setiap jabatan dalam struktur organisasi sesuai dengan ruang lingkup tugas dan peran unit dan jabatan (struktural) dalam organisasi. **Kelemahan:** ▪ Berdasarkan konfirmasi, sistem pengukuran kinerja *Belum* didukung dengan aplikasi komputer. E-performance sedang dipersiapkan. **Hambatan:** ▪ kebijakan efisiensi Perusahaan. **Rekomendasi:** ▪ Direksi agar mengupayakan pengembangan aplikasi e-performance segera diterapkan.	0,311	83,0%	0,25813
	96	Direksi menetapkan target kinerja berdasarkan RKAP dan diturunkan secara berjenjang di tingkat unit, sub unit dan jabatan di dalam organisasi (struktural) di organisasi.	Perusahaan memiliki KPI Individu untuk masing-masing Divisi, General Manager, dan karyawan di perusahaan. KPI tersebut menjadi kontrak kinerja setiap individu dan ditandatangani oleh Kepala Divisi dan Direksi.	0,155	100%	0,155

Indikator/Parameter			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG) - HAMBATAN & REKOMENDASI	KESIMPULAN/PENILAIAN		
				BOBOT	%	SKOR
	97	Direksi melakukan analisis dan evaluasi terhadap capaian kinerja untuk jabatan/unit-unit di bawah Direksi dan tingkat perusahaan.	Direksi telah melaporkan perkembangan kinerja jabatan/unit-unit di bawah Direksi yang antara lain ditunjukkan melalui Laporan Manajemen Triwulanan secara berkala dan tepat waktu. Direksi telah melakukan analisis dan evaluasi terhadap perkembangan kinerja jabatan/unit-unit di bawah Direksi yang ditunjukkan melalui rapat Direksi. Risalah rapat memuat pembahasan mengenai tindak lanjut hasil rapat Direksi, antara lain mengenai outlet/usaha yang belum mencapai target, Menyelesaikan grading dan KPI tahun 2014. Evaluasi pencapaian Perusahaan yang mencakup: kesesuaian pelaksanaan program kerja (inisiatif perusahaan) dan anggaran yang telah ditetapkan dalam RKAP dilaporkan dalam Laporan Manajemen Triwulanan.	0,311	100%	0,311
	98	Direksi melaporkan pelaksanaan sistem manajemen kinerja kepada dewan komisaris/Dewan Pengawas.	Direksi menyampaikan Laporan Manajemen Triwulanan kepada Dewan Komisaris sebagai bentuk laporan pencapaian kinerja perusahaan berdasarkan target-target kolegial Direksi antara lain; melalui rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi serta melalui surat Direksi. Pencapaian KPI perusahaan 60,5 **Kelemahan:** ▪ Direksi *Belum* melaporkan tingkat pencapaian kinerja individu anggota Direksi kepada Dewan Komisaris. **Hambatan:** ▪ Pemegang Saham *Belum* memiliki kebijakan khusus terkait dengan penilaian kinerja individu anggota Direksi. **Rekomendasi:** ▪ Direksi agar mengembangkan KPI individu anggota Direksi berdasarkan KPI Korporat.	0,311	75%	0,233

Indikator/Parameter			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG) - HAMBATAN & REKOMENDASI	KESIMPULAN/PENILAIAN		
				BOBOT	%	SKOR
	99	Direksi menyusun dan menyampaikan kepada RUPS/Pemilik Modal tentang usulan insentif kinerja untuk Direksi.	Dalam surat tanggapan Dewan Komisaris salah satu hal yang perlu dimintakan persetujuan Pemegang Saham adalah tantiem Direksi dan Dekom. Berdasarkan konfirmasi, penentuan usulan insentif kinerja Direksi mencerminkan kesesuaian dengan kinerja yang dicapai.	0,156	100%	0,156
	100	Direksi menerapkan sistem tentang teknologi informasi sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.	- Dalam tahun 2017 perusahaan mempunyai program kerja khusus yaitu pengembangan aplikasi ERP (Enterprise Resource Planning). Aplikasi ini digunakan untuk mengintegrasikan seluruh kepentingan baik administrasi maupun bisnis yang digunakan untuk menunjang keputusan manajemen yang terintegrasi dan real time.ERP adalah sebuak konsep untuk merencanakan dan mengelola sumber daya perusahaan meliputi dana, manusia, mesin, suku cadang, wktu, material dan kapasitas yang berpengaruh luas mulai dari manajemen paling atas hingga operasional. **Kelemahan:** ▪ Pada tahun 2017, *Belum* selesai aplikasi ERP. **Hambatan:** ▪ *Belum* adanya persamaan persepsi tentang ERP. **Rekomendasi:** ▪ Direksi agar memastikan diterapkannya ERP.	0,778	80%	0,6224
	101	Direksi melaksanakan sistem peningkatan mutu produk dan pelayanan.	- Keputusan Direksi PT Sarinah (Persero) Nomor: 031/KPTS/DIREKSI/VI/2010 tanggal 30 Juni 2010 perihal Sistem dan Prosedur PT Sarinah (Persero) memuat Petunjuk Kerja Petugas Counter dan Prosedur Standar Call Center. Selain itu, Keputusan Direksi PT Sarinah (Persero) Nomor: 38.1/KPTS/DIREKSI/IX/2014 tanggal 5 September 2014 perihal Sistem dan Prosedur Atas Proses Bisnis PT Sarinah (Persero) yang Berbasis Kriteria Penilaian Kinerja Unggul, memuat Prosedur Pengelolaan Suara dan Engagement Pelanggan, Prosedur Survei Kepuasan / Ketidakpuasan Pelanggan, Prosedur Penanganan Keluhan Pelanggan, Prosedur Pelayanan terhadap	0,778	93,0%	0,72354

Indikator/Parameter			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG) - HAMBATAN & REKOMENDASI	KESIMPULAN/PENILAIAN		
				BOBOT	%	SKOR
			Pemilik Counter dan Pengunjung. Berdasarkan konfirmasi, SOP tersebut telah diinformasikan kepada seluruh karyawan. - dan hasil pengukuran KPI menunjukkan indikator Fokus Pada Pelanggan dan Pasar mencapai 100,55 dengan Tingkat Kepuasan Pelanggan Outlet Thamrin = 86,47 (target 86,00); Pertumbuhan Rata-rata Nilai Per Transaksi OT Thamrin & Basuki Rahmad = 13,38 (target 5,00); terjadi Penurunan. - Berdasarkan survei tingkat kualitas adalah mengenai tingkat Awareness&Perception, Need, want & Expectation, Usage, Habit & Attitude, Factors Affecting to sales & Performance. - Keputusan Direksi tentang Sistem dan Prosedur PT Sarinah (Persero) tersebut, antara lain mengatur Prosedur Standar Pengecekan Kualitas Barang, Prosedur Standar Broken Stock, Prosedur Standar Perbaikan Utilitas dan Fasilitas; Prosedur Standar Pemeliharaan Utilitas dan Fasilitas. Berdasarkan konfirmasi, *perusahaan memiliki Sertifikasi ISO 9001:2000 Nomor 30033 tanggal 5 September 2008. Namun, sertifikasi tersebut tidak diperpanjang/diikutkan sertifikasi kembali karena benefit cost. Namun, Direksi memantau sistem mutu melalui pengukuran KPKU. Sistem pengendalian mutu diterapkan secara konsisten*. Perusahaan telah menindaklanjuti ketidaksesuaian mutu dalam proses produksi. Pada audit SPI terdapat beberapa hasil audit outlet yang menilai tentang mutu barang dan bangunan pada outlet terkait. Berdasarkan konfirmasi, Sarinah memberikan kompensasi dalam hal SPM dan mutu tidak terpenuhi. **Kelemahan:** ▪ Sertifikasi atas kebijakan mutu Perusahaan masih berupa evaluasi implementasi KPKU. **Hambatan:**			

Indikator/Parameter			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG) - HAMBATAN & REKOMENDASI	KESIMPULAN/PENILAIAN		
				BOBOT	%	SKOR
			- **Rekomendasi:** -			
	102	Direksi melaksanakan pengadaan barang dan jasa yang menguntungkan bagi perusahaan, baik harga maupun kualitas barang dan jasa tersebut.	- Sarinah telah memiliki pedoman mengenai pengadaan barang dan jasa yang diatur dalam Keputusan Direksi PT Sarinah (Persero) Nomor: 031/KPTS/DIREKSI/VI/2010 tanggal 30 Juni 2010 Tentang Sistem dan Prosedur PT Sarinah (Persero) yang antara lain memuat Prosedur Standar Pengadaan Inventaris dan Prosedur Standar Pengadaan ATK, serta Keputusan Direksi PT Sarinah (Persero) Nomor: 019.1/KPTS/DIREKSI/III/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Non Niaga PT Sarinah (Persero). Pedoman/kebijakan pengadaaan dapat diakses pemasok/calon pemasok di perusahaan. dan Perusahaan merencanakan pengadaan barang dan jasa secara optimal berdasarkan perhitungan kebutuhan perusahaan. Sarinah telah melakukan proses pengadaan barang dan jasa yang terbuka bagi penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat. - Sarinah melalui SPI memastikan bahwa SOP pengadaan barang dan jasa perusahaan tersebut telah dijalankan dengan benar ditandai dengan tidak terdapat temuan-temuan audit mengenai pengadaan yang merugikan perusahaan pada tahun 2015. Serta tidak terdapat sanggahan pemilihan penyedia barang/jasa perusahaan. Proses pengadaan telah dilaksanakan secara transparan.	0,933	100%	0,933

Indikator/Parameter			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG) - HAMBATAN & REKOMENDASI	KESIMPULAN/PENILAIAN		
				BOBOT	%	SKOR
	103	Direksi mengembangkan SDM, menilai kinerja dan memberikan remunerasi yang layak, dan membangun lingkungan SDM yang efektif mendukung pencapaian perusahaan.	- Dalam Keputusan Direksi atas Sistem dan Prosedur PT Sarinah (Persero) ; KPI Tahun 2015 terdapat Prosedur Standar Pengembangan Kompetensi dalam Sistem dan Prosedur Sumber Daya Manusia. Pencapaian RKAP untuk pelatihan / pendidikan karyawan adalah Rp 222,92 jt (26,48%) dari target RKAP Rp841,77 jt. Berdasarkan konfirmasi, perusahaan memberikan kesempatan pendidikan dan pelatihan yang adil kepada seluruh karyawan dan program pengembangan SDM melalui training, coaching dan assignment telah dimuat dalam program pelatihan. Tidak ada temuan/pelanggaran terkait pelaksanaan program pengembangan karyawan di tahun 2017. - Sarinah telah memiliki kebijakan K3 yang antara lain diatur dalam Keputusan Direksi PT Sarinah (Persero) Nomor: 38.1/KPTS/DIREKSI/IX/2014 tanggal 5 September 2014 perihal Sistem dan Prosedur Atas Proses Bisnis PT Sarinah (Persero) yang Berbasis Kriteria Penilaian Kinerja Unggul yang memuat Penanganan Keadaan Darurat, Keputusan Direksi PT Sarinah (Persero) Nomor: 027/KPTS/DIREKSI/I/VIII/2008 Tentang Struktur Organisasi Manajemen Sistem Tanggap Darurat Pada Gedung PT Sarinah (Persero) di Jalan Thamrin Jakarta, serta Keputusan Direksi PT Sarinah (Persero) Nomor: 006/KPTS/DIREKSI/I/2015 Tentang Perubahan Ketentuan Pemberian Bantuan Biaya Pengobatan, Rawat Inap, Bersalin, Perawatan Mata dan Gigi Karyawan PT Sarinah (Persero). Sarinah memiliki alat keselamatan kerja, fasilitas kesehatan di lingkungan kerja, serta asuransi kesehatan terhadap pekerja dan keluarga. Kebijakan sistem penilaian kinerja individu dan kompetensi karyawan berdasarkan Keputusan Direksi dan Pedoman SOP. - KPI Individu memuat indikator kinerja individu yang dimuat dalam Uraian Jabatan PT Sarinah (Persero) dan target yang ditetapkan oleh atasan. Sistem penilaian kinerja bagi karyawan diterapkan dengan konsisten dan Berdasarkan konfirmasi, hasil penilaian performance appraisal dimanfaatkan untuk pengembangan karyawan.	3,267	98,4%	3,214728

Indikator/Parameter			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG) - HAMBATAN & REKOMENDASI	KESIMPULAN/PENILAIAN		
				BOBOT	%	SKOR
			- Kebijakan terkait remunerasi dan kesejahteraan karyawan telah diatur dalam Surat Edaran dan Keputusan Direksi. Pada tahun 2015 Perusahaan meninjau dan memutakhirkan ketentuan mengenai remunerasi karyawan. Kebijakan tersebut telah disosialisasikan antara lain melalui Internal Memo. Perusahaan menetapkan remunerasi karyawan dengan memperhatikan tingkat keadilan dan Perusahaan juga memiliki kebijakan / program reward dan punishment melalui Keputusan Direksi. - Surat Keputusan Direksi dan Internal Memo terkait program reward bagi karyawan yang telah mengabdi selama 17, 25 dan 30 tahun. Kebijakan tersebut telah disosialisasikan untuk dipahami oleh seluruh karyawan. Penerapan reward dan punishment kepada karyawan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan dan konsisten. Kebijakan mengenai keterbukaan informasi yang berkaitan dengan perencanaan Perusahaan yang dapat berpengaruh signifikan bagi karyawan/pekerja telah diatur dalam PKB dan Keputusan Direksi. Intranet, website, majalah internal, sosial Media menjadi media komunikasi kebijakan perusahaan. Berdasarkan konfirmasi, pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi dilakukan secara konsisten. **Kelemahan:** ▪ Perusahaan *Belum* sepenuhnya melakukan evaluasi efektivitas pendidikan dan pelatihan karyawan. **Hambatan:** **Rekomendasi:** ▪ Direksi agar melakukan evaluasi efektivitas pendidikan dan pelatihan karyawan.			

Indikator/Parameter			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG) - HAMBATAN & REKOMENDASI	KESIMPULAN/PENILAIAN		
				BOBOT	%	SKOR
	104	Direksi menerapkan kebijakan pengaturan untuk anak perusahaan (*subsidiary governance*) dan/atau perusahaan patungan.	Kebijakan pengaturan anak perusahaan mengikuti dan Telah dimuat dalam Peraturan Menteri. Pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris anak perusahaan/perusahaan patungan telah melalui proses penjaringan, proses penilaian, dan proses penetapan. Penetapan target kinerja dan realisasi kinerja anak perusahaan/perusahaan patungan mendukung kinerja perusahaan. Berdasarkan konfirmasi, penetapan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris untuk anak perusahaan telah ditetapkan dengan memperhatikan pencapaian kinerja.	0,622	100%	0,622
29	Direksi melaksanakan pengendalian operasional dan keuangan terhadap implementasi rencana dan kebijakan perusahaan.			3,266	100%	3,266
	105	Direksi menerapkan kebijakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku umum di Indonesia (SAK).	Kebijakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan telah dimuat dalam Keputusan Direksi PT Sarinah (Persero) Nomor: 031/KPTS/DIREKSI/VI/2010. Tidak terdapat masalah yang berkaitan dengan pengendalian intern dan operasinya ditahun 2017. Laporan Manajemen Triwulanan memuat Laporan Keuangan Triwulanan yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku umum di Indonesia dan diterbitkan tepat waktu. Laporan Keuangan mendapat opini wajar tanpa pengecualian.	0,622	100%	0,622
	106	Direksi menerapkan manajemen risiko sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.	- Perusahaan telah memiliki Pedoman Penerapan Manajemen Risiko Korporat yang memuat: kerangka, tahapan pelaksanaan manajemen risiko, pelaporan risiko dan penanganannya. Direksi memiliki fungsi yang bertugas melaksanakan program manajemen risiko yaitu di bawah Direktur Keuangan dan Administrasi. Kebijakan tersebut telah disosialisasikan kepada seluruh karyawan perusahaan. Telah terdapat rencana kerja perusahaan untuk menerapkan kebijakan manajemen risiko. Direksi melaksanakan pemantauan terhadap program manajemen risiko melalui setiap rapat Direksi, antara lain profil risiko yang significant/mempunyai arti dan cara kendalinya bagi Sarinah	1,244	100%	1,244

Indikator/Parameter			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG) - HAMBATAN & REKOMENDASI	KESIMPULAN/PENILAIAN		
				BOBOT	%	SKOR
			terutama SBU. Dalam rangkuman tersebut, semua peristiwa risiko dimonitoring dan dilakukan tindakan mitigasi dengan kajian risiko, Selain itu Rapat Teknis dengan Pemegang Saham khususnya terkait pengembangan Aset Braga juga dilengkapi dengan pembahasan risiko. - Selain disampaikan dalam rapat gabungan, juga disampaikan melalui Surat Direksi kepada Dewan Komisaris tentang hal-hal yang perlu mendapat persetujuan Dewan Komisaris dilengkapi dengan kajian risiko. Selain itu, Rapat Teknis dengan Pemegang Saham khususnya terkait pengembangan Aset Braga juga dilengkapi dengan pembahasan risiko. Direksi menyampaikan laporan pelaksanaan manajemen risiko melalui Komite Investasi dan Risiko Usaha, maupun rapat gabungan dan surat Direksi. Internal Audit Charter mengatur kerangka (framework) pengendalian intern.			
	107	Direksi menetapkan dan menerapkan sistem pengendalian intern untuk melindungi dan mengamankan investasi dan aset perusahaan.	Pada Laporan Keuangan terdapat lembar pertanggungjawaban Direksi. disusun berdasarkan cascading dari unit-unit dan cabang-cabang yang dimiliki perusahaan. Pada tingkat entitas dilakukan oleh auditor eksternal. Pada tingkat operasional dilakukan oleh SPI. Sarinah telah menerbitkan internal control report dalam Laporan Kepatuhan tersebut, memuat pernyataan bahwa manajemen bertanggung jawab untuk menetapkan dan memelihara suatu struktur pengendalian intern dan prosedur pelaporan keuangan yang memadai, penilaian atas efektivitas struktur pengendalian intern dan prosedur pelaporan keuangan pada akhir tahun buku perusahaan dan telah melakukan monitoring tindak lanjut hasil pemeriksaan SPI dan auditor eksternal (KAP dan BPK).	0,778	100%	0,778
	108	Direksi menindaklanjuti hasil pemeriksaan SPI dan auditor eksternal (KAP dan BPK).	Surat penyampaian tindak lanjut hasil pemeriksaan ditembuskan kepada Dewan Komisaris, dari 11 temuan pemeriksaan dengan 27 rekomendasi, sebanyak 23 telah ditindaklanjuti, Sedangkan 4 rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti karena merupakan rekomendasi ke Kementerian. Direksi memiliki komitmen yang tinggi dalam menindaklanjuti temuan audit.	0,622	100%	0,622

Indikator/Parameter			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG) - HAMBATAN & REKOMENDASI	KESIMPULAN/PENILAIAN		
				BOBOT	%	SKOR
30	Direksi melaksanakan pengurusan perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan anggaran dasar.		Sarinah memiliki Divisi Legal and Risk Management yang berfungsi mengendalikan dan memastikan kebijakan, keputusan perusahaan, dan seluruh kegiatan Perusahaan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta memantau dan menjaga kepatuhan perusahaan terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Perusahaan dengan pihak ketiga.	0,778	100%	0,778
	109	Direksi menetapkan mekanisme untuk menjaga kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan perjanjian dengan pihak ketiga.	Direksi telah memastikan fungsi kepatuhan di perusahaan dan telah mengikuti perkembangan peraturan perundangan yang berlaku dan akan berlaku bagi perusahaan. Dalam surat Direksi tentang hal-hal yang perlu mendapat persetujuan Dewan Komisaris, kajian risiko usaha telah memuat kajian hukum, Selain itu, rapat Direksi juga membahas tentang kajian hukum atas proses bisnis.	0,156	100%	0,156
	110	Perusahaan menjalankan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan perjanjian dengan pihak ketiga.	Evaluasi kajian risiko dan legal, khususnya dibahas pada rapat. Dalam risalah rapat Direksi dapat diketahui beberapa upaya menyelesaikan permasalahan hukum di perusahaan, antara lain terkait outlet Pancoran, SHI, kasus Situmorang dan kedelai. Tidak ada penilaian proper bagi perusahaan (NA). Seluruh permasalahan hukum sudah ditindaklanjuti dengan beberapa diantaranya sedang dalam proses penyelesaian. nota kesepahaman dan perjanjian dengan pihak ketiga ditulis menggunakan bahasa Indonesia. serta Perusahaan tidak sedang menjadi pembicaraan/sorotan oleh publik/pers dalam masalah tertentu.	0,622	100%	0,622
31	Direksi melakukan hubungan yang bernilai tambah bagi perusahaan dan *stakeholders.*			6,689	78,2%	5,231125

Indikator/Parameter			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG) - HAMBATAN & REKOMENDASI	KESIMPULAN/PENILAIAN		
				BOBOT	%	SKOR
	111	Pelaksanaan hubungan dengan pelanggan	Pedoman Perilaku memuat Etika Perusahaan Terhadap Konsumen. Selain itu, terdapat Keputusan Direksi PT Sarinah (Persero) Nomor: 031/KPTS/DIREKSI/VI/2010 tanggal 30 Juni 2010 perihal Sistem dan Prosedur PT Sarinah (Persero) yang memuat Petunjuk Kerja Petugas Counter dan Prosedur Standar Call Center, serta Keputusan Direksi PT Sarinah (Persero) Nomor: 38.1/KPTS/DIREKSI/IX/2014 tanggal 5 September 2014 perihal Sistem dan Prosedur Atas Proses Bisnis PT Sarinah (Persero) yang Berbasis Kriteria Penilaian Kinerja Unggul yang memuat Prosedur Pengelolaan Suara dan Engagement Pelanggan, Prosedur Survei Kepuasan/Ketidakpuasan Pelanggan, Prosedur Penanganan Keluhan Pelanggan, Prosedur Pelayanan Terhadap Pemilik Counter dan Pengunjung. e-mail : customer_care@sarinah.co.id Telp. : (62-21) 31923008 Fax : (62-21) 3140250 Website Perusahaan memuat informasi lokasi store, kegiatan ekspor, impor dan distribusi yang dilakukan, serta pemanfaatan properti yang dimiliki. Selain itu, running text di LCD TV juga memuat produk dan layanan perusahaan. Keputusan Direksi memuat Prosedur Penanganan Keluhan Pelanggan. Berdasarkan konfirmasi, rekomendasi hasil survei pelanggan ditindaklanjuti/ditangani. Berdasarkan Laporan Tahunan, tidak ada pengaduan yang masuk melalui WBS ditahun 2015. Perusahaan telah melaksanakan survei secara sistematis dan dilakukan secara berkala untuk mengetahui tingkat kepuasan pelanggan/konsumen dan hasil indeks survey kepuasan; dilaksanakan secara berkala. Hasil survei menunjukan tingkat kepuasan yang baik. Seleksi untuk menjadi pemasok perusahaan dilakukan berdasarkan Keputusan Direksi terkait.	1,244	100,0%	1,244

Indikator/Parameter			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG) - HAMBATAN & REKOMENDASI	KESIMPULAN/PENILAIAN		
				BOBOT	%	SKOR
	112	Pelaksanaann hubungan dengan pemasok.	Ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa bersifat terbuka dan dapat diakses di perusahaan. Berdasarkan hasil survei, tingkat kepuasan poin negosiasi dan poin sistem pembayaran adalah cukup puas. Secara umum, hasil survei tingkat fairness dan trasparansi masuk dalam kategori GOOD. Pada tahun 2015 perusahaan melakukan asssessment pemasok berdasarkan pencapaian/kinerjanya (Ranking Produktivity Gross Sales&Net Contribution main Store). Dokumen Perjanjian Pinjaman telah memuat perlindungan hak dan kepentingan kreditur.	0,933	100%	0,933
	113	Pelaksanaan hubungan dengan kreditur.	Perusahaan memiliki Instruksi Direksi yang mengatur manajemen/pengelolaan penggunaan pinjaman jangka panjang sesuai dengan peruntukannya dan pelunasannya. Tidak terdapat temuan audit terkait penyalahgunaan dana pinjaman dan pembayarannya. Berdasarkan konfirmasi, perusahaan memberikan informasi yang akurat kepada kreditur sesuai dengan perjanjian, secara lengkap dan tepat waktu.	0,778	100%	0,778
	114	Pelaksanaan kewajiban kepada Negara	Surat Setoran Pajak disampaikan secara tepat waktu dan Perusahaan tidak mempunyai kewajiban penyampaian dokumen kepada regulator, selain Kementerian BUMN.	0,467	100%	0,467
	115	Pelaksanaan hubungan dengan karyawan perusahaan.	Sarinah menyediakan sarana partisipasi karyawan dalam bentuk Serikat Pekerja, gathering karyawan, ataupun lainnya. PKB memuat hal-hal yang mendorong partisipasi karyawan dan mengatur tentang kebijakan yang melibatkan karyawan. Perusahaan memiliki kebijakan mengenai metode penilaian untuk mengukur kepuasan karyawan yang antara lain diatur dalam Keputusan Direksi terkait. **Kelemahan:** **Hambatan:** **Rekomendasi:**	1,089	88%	0,952875

Indikator/Parameter			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG) - HAMBATAN & REKOMENDASI	KESIMPULAN/PENILAIAN		
				BOBOT	%	SKOR
	116	Terdapat prosedur tetulis menampung dan menindaklanjuti keluhan-keluhan *stakeholders.*	Keputusan Direksi terkait antara lain mengatur mekanisme penanganan keluhan stakeholders. Tidak ada laporan keluhan yang masuk melalui WBS, hingga 31 Desember 2017.	0,311	100%	0,311
	117	Upaya untuk meningkatkan nilai Pemegang Saham secara konsisten dan berkelanjutan.	Pencapaian Kontrak Manajemen adalah 60,5. Pencapaian KPI tahun 2015 menurun dari tahun sebelumnya. **Kelemahan:** - **Hambatan:** - **Rekomendasi:** ▪ Direksi agar mengupayakan pencapaian target KPI Perusahaan.	0,311	75%	0,23325
	118	Perusahaan melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan untuk mendukung keberlanjutan operasi perusahaan.	Keputusan Direksi antara lain; memuat Sistem dan prosedur PKBL dan unit/bagian yang bertugas melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan berada dibawah Corporate Secretary dan General Affair. Kebijakan tentang pembinaan usaha kecil dalam sistem dan prosedur PKBL dimuat dalam keputusan Direksi. Perusahaan juga telah memiliki Indikator Kinerja untuk mengukur keberhasilan pengelolaan PKBL dan rencana kerja untuk melaksanakan program kemitraan dengan usaha kecil dimuat dalam RKA PKBL juga rencana kerja implementasi tanggung jawab sosial perusahaan dianggarkan dalam RKAP dan bukan sebagai distribusi laba. Pelaksanaan kegiatan tanggung jawab sosial sesuai dengan rencana yang ditetapkan, memperoleh skor 2. Perusahaan melakukan evaluasi atas pencapaian Indikator keberhasilan dengan target-targetnya dalam rapat.	1,556	100%	1,556

Indikator/Parameter			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG) - HAMBATAN & REKOMENDASI	KESIMPULAN/PENILAIAN		
				BOBOT	%	SKOR
			Keputusan Direksi PT Sarinah (Persero) Nomor: 031/KPTS/DIREKSI/VI/2010 tanggal 30 Juni 2010 perihal Sistem dan Prosedur PT Sarinah (Persero) antara lain mengatur Sistem dan Prosedur buka dan tutup toko. dan Keputusan Direksi PT Sarinah (Persero) Nomor: 38.1/KPTS/DIREKSI/IX/2014 Sistem dan Prosedur atas proses Bisnis yang berbasis KPKU antara lain mangatur tentang penanganan keadaan darurat dan untuk keperluan tersebut perusahaan memiliki infrastruktur, baik sebagai early warning system maupun pelaksanaan program keadaan darurat.			
32	Direksi memonitor dan mengelola potensi benturan kepentingan anggota Direksi dan manajemen di bawah Direksi.		Anggaran Dasar, Pedoman GCG/GCG Code, dan Board Manual mengatur tentang Benturan Kepentingan.	1,089	100%	1,089
	119	Direksi menetapkan kebijakan tentang mekanisme bagi Direksi dan pejabat struktural untuk mencegah pengambilan keuntungan pribadi dan pihak lainnya disebabkan benturan kepentingan.	Pada rapat pengenalan perusahaan tahun 2017, kebijakan tersebut telah disosialisasikan kepada Direksi. Sedangkan pada pejabat struktural telah disosialisasikan kembali pada saat penandatanganan pernyataan kepatuhan tahunan. Pakta Integritas memuat pernyataan Direksi tidak memiliki benturan kepentingan. Pakta Integritas ditandatangani oleh masing-masing anggota Direksi.	0,467	100%	0,467

Indikator/Parameter			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG) - HAMBATAN & REKOMENDASI	KESIMPULAN/PENILAIAN		
				BOBOT	%	SKOR
	120	Direksi menerapkan kebijakan untuk mencegah benturan kepentingan.	Penyampaian laporan kepemilikan saham Direksi pada perusahaan dan perusahaan lainnya baru dilaksanakan pada tahun 2017. Direksi menandatangani Pakta Integritas yang dilampirkan dalam usulan tindakan Direksi yang harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham. pada tahun 2015 tidak terdapat pengambilan keputusan transaksional yang mengandung benturan kepentingan. tidak terdapat pelanggaran transaksi dan hubungan afiliasi dengan pihak tertentu baik karena hubungan darah, perkawinan maupun hubungan pertemanan yang dapat mempengaruhi keputusannya, kewenangan yang berpotensi dapat disalah gunakan, akses khusus yang dibantu oleh orang dalam sehubungan dengan transaksi dan Direksi memiliki tingkat kesungguhan dalam pengambilan keputusan bebas kepentingan pribadi Direksi dan pihak-pihak lainnya. Belum terdapat pengungkapan Daftar Khusus dan pernyataan mengenai pengungkapan kepemilikan sahampada perusahaan lain untuk dicatat dalam daftar khusus. **Kelemahan:** ▪ Penyampaian laporan kepemilikan saham Direksi pada perusahaan dan perusahaan lainnya baru dilaksanakan pada tahun 2015 berdasarkan Daftar Khusus Kepemilikan Saham Direksi PT Sarinah (Pesero). **Hambatan:** ▪ *Belum* terdapat persamaan persepsi tentang perlunya pengungkapan daftar khusus. **Rekomendasi:** ▪ Direksi agar membuat surat pernyataan mengenai pengungkapan kepemilikan saham pada perusahaan lain untuk dicatat dalam daftar khusus.			

Indikator/Parameter			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG) - HAMBATAN & REKOMENDASI	KESIMPULAN/PENILAIAN		
				BOBOT	%	SKOR
33	Direksi memastikan perusahaan melaksanakan keterbukaan informasi dan komunikasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan penyampaian informasi kepada Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan Pemegang Saham tepat waktu.		Direksi menyampaikan Laporan Manajemen Triwulanan dan tahunan serta laporan tahunan kepada Dewan Komisaris/Dewan Pengawas sebelum disampaikan kepada pemegang saham.	1,089	100%	
	121	Direksi melaporkan informasi-informasi yang relevan kepada Pemegang Saham dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.	Penyampaian Laporan Manajemen dan Laporan Tahunan kepada Dewan Komisaris dilaksanakan sebelum batas waktu disampaikan kepada Pemegang Saham. Penyampaian laporan dilaksanakan tanpa tanda terima surat. Laporan Manajemen dan Laporan Tahunan telah ditandatangani oleh seluruh Direksi dan Dewan Komisaris. Laporan Manajemen Triwulanan disampaikan kepada Pemegang Saham : Triwulan 1 pada 27 April 2017, Triwulan II pada 25 Juli 2017, Triwulan III pada 25 Oktober 2017 Triwulan IV pada 29 Januari 2018 sesuai ketentuan. Muatan Laporan Manajemen Triwulanan dan Laporan Manajemen Tahunan sudah sesuai dengan PSAK. NA. Perusahaan tidak memiliki Pemegang Saham minoritas.	0,622	100%	0,622
	122	Direksi memberikan perlakukan yang sama (*fairness*) dalam memberikan informasi kepada Pemegang Saham dan anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.	Perusahaan memberikan informasi yang relevan kepada Dewan Komisaris. Perusahaan memberikan perlakuan yang sama dalam pemberian informasi oleh Direksi kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham.	0,467	100%	0,467

Indikator/Parameter			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG) - HAMBATAN & REKOMENDASI	KESIMPULAN/PENILAIAN		
				BOBOT	%	SKOR
34	Direksi menyelenggarakan rapat Direksi dan menghadiri Rapat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.		Pedoman tata tertib rapat dalam Anggaran Dasar dan Board Manual telah memuat etika rapat.	1,556	93,1%	1,44875
	123	Direksi memiliki pedoman/tata tertib Rapat Direksi, minimal mengatur etika rapat dan penyusunan risalah rapat, evaluasi tindak lanjut hasil rapat sebelumnya, serta pembahasan atas arahan/usulan dan/atau keputusan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.	Tata penyusunan risalah rapat termuat dalam Anggaran Dasar, namun muatan tersebut belum lengkap. Berdasarkan Board Manual, rapat Direksi minimal sebulan sekali atau bila dianggap perlu. **Kelemahan:** ▪ Pedoman tata tertib rapat Direksi *Belum* sepenuhnya memuat tata penyusunan risalah rapat, evaluasi tindak lanjut/pembahasan hasil rapat sebelumnya atas keputusan Dewan Komisaris terkait dengan usulan Direksi. **Hambatan:** ▪ *Belum* terdapat pemutakhiran *Board manual.* **Rekomendasi:** ▪ Direksi agar melakukan pembaharuan *Board Manual.*	0,156	31,3%	0,04875
	124	Direksi menyelenggarakan Rapat Direksi sesuai kebutuhan, paling sedikit sekali dalam setiap bulan.	Berdasarkan Board Manual, rapat Direksi minimal sebulan sekali atau bila dianggap perlu. Berdasarkan Laporan Tahunan, rapat internal Direksi telah dilaksanakan sebanyak 28 kali pada 2017. Tingkat kehadiran masing-masing anggota Direksi dalam rapat Direksi adalah 100%.	0,467	100%	0,467

Indikator/Parameter			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG) - HAMBATAN & REKOMENDASI	KESIMPULAN/PENILAIAN		
				BOBOT	%	SKOR
	125	Anggota Direksi menghadiri setiap rapat Direksi maupun rapat Direksi & Komisaris, jika tidak dapat hadir yang bersangkutan harus menjelaskan alasan ketidakhadirannya.	Tingkat kehadiran masing-masing anggota Direksi dalam rapat Dewan Komisaris adalah 100%. dalam rapat Direksi terdapat pemantauan hal-hal yang telah dibahas pada rapat sebelumnya.	0,311	100%	0,311
	126	Direksi melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan keputusan hasil rapat sebelumnya.	Dalam rapat Direksi terdapat pemantauan hal-hal yang masih belum selesai yang telah dibahas pada rapat sebelumnya.	0,311	100%	0,311
	127	Direksi menindaklanjuti arahan, dan/atau keputusan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.	Rapat Direksi membahas arahan dan/atau keputusan Dewan Komisaris. Tindak lanjut yang dilaksanakan oleh Direksi sesuai dengan arahan dan/atau keputusan Dewan Komisaris.	0,311	100%	0,311
35	Direksi menyelenggarakan pengawasan intern yang berkualitas dan efektif.		SPI memiliki Internal Audit Charter yang ditandatangani Komisaris Utama dan Direktur Utama pada tanggal 31 Juli 2009.	1,711	93,5%	1,600
	128	Perusahaan memiliki Piagam Pengawasan Intern yang ditetapkan oleh Direksi.	Muatan charter disesuaikan ketentuan yang berlaku dan telah mempertimbangkan Standar Profesional Audit Intern. menjelaskan posisi fungsi Audit Internal dalam organisasi: kewenangan Fungsi Audit Internal untuk mendapatkan akses terhadap semua catatan, personil dan aset perusahaan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugasnya; dan menjelaskan ruang lingkup Fungsi Audit Internal. **Kelemahan:** ▪ Sejak dibuat pada tahun 2009, *Internal Audit Charter Belum* pernah dimutakhirkan sehingga *Belum* mengikuti metode audit berbasis risiko, tugas dan tanggung jawab belum meliputi penilaian terhadap Internal control perusahaan.	0,156	66,7%	0,104052

Indikator/Parameter			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG) - HAMBATAN & REKOMENDASI	KESIMPULAN/PENILAIAN		
				BOBOT	%	SKOR
			Hambatan: - **Rekomendasi:** ▪ Satuan Pengawas Intern agar memutakhirkan *Internal Audit Charter.*			
	129	SPI/Fungsi Audit Internal dilengkapi dengan faktor-faktor pendukung keberhasilan dalam pelaksanaan tugasnya.	- Posisi SPI berada langsung di bawah Direktur Utama dan diangkat dengan persetujuan Dewan Komisaris. Pimpinan Fungsi Audit Internal mempunyai akses langsung melapor hasil kerjanya kepada Dewan Komisaris cq Komite Audit. SPI memiliki Rencana Kebutuhan Tenaga Auditor. Berdasarkan kuisioner, jumlah auditor sudah mencukupi. Terdapat program pengembangan yang diikuti tenaga SPI dan anggota SPI memiliki kualitas yang memadai. Audit Charter memuat pedoman pelaksanaan kegiatan fungsi pengawasan intern. Kepala SPI melaksanakan program jaminan kualitas dan peningkatan Fungsi Audit Internal, yang mencakup seluruh aspek dari aktivitas fungsi pengawasan intern. - SPI telah dianjurkan untuk melakukan penilaian atas program jaminan kualitas dan peningkatan Fungsi Audit Internal secara keseluruhan. Penilaian terhadap pelaksanaan pengawasan intern dilakukan oleh auditor eksternal. **Kelemahan:** ▪ *Belum* ada anggota Satuan Pengawas Intern yang memperoleh sertifikasi profesi CIA/QIA. **Hambatan:** ▪ Waktu yang diperlukan untuk memperoleh sertifikasi profesi CIA/QIA cukup panjang, sedangkan tingkat rotasi karyawan di perusahaan cukup cepat.	0,466	95%	0,4427

Indikator/Parameter			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG) - HAMBATAN & REKOMENDASI	KESIMPULAN/PENILAIAN		
				BOBOT	%	SKOR
			Rekomendasi: ▪ Direksi agar mengupayakan anggota Satuan Pengawas Intern memperoleh sertifikasi profesi CIA/QIA.			
	130	SPI melaksanakan pengawasan intern untuk memberikan nilai tambah dan memperbaiki operasional perusahaan.	SPI telah memiliki PKPT dan Rencana PKPT telah disampaikan kepada Dewan Komisaris melalui Komite Audit. Pelaksanaan audit sesuai dengan program kerja pengawasan tahunan yang ditetapkan. Tingkat pencapaian (kinerja) atas target-target dalam PKPT (jumlah audit dan pelaporan audit) telah sesuai. Hasil audit senantiasa dilaporkan kepada Direktur Utama, antara lain melalui internal memo. Laporan hasil penugasan pengawasan intern disampaikan kepada Dewan Komisaris cq Komite Audit. SPI memberikan rekomendasi (masukan atas prosedur) yang meningkatkan proses tata kelola (governance), memberikan kontribusi terhadap peningkatan pengelolaan risiko dan pengendalian intern kepada perusahaan, mengevaluasi sejauh mana sasaran dan tujuan program serta kegiatan operasi telah ditetapkan sejalan dengan tujuan organisasi, memberi masukan atas konsistensi hasil-hasil yang diperoleh dari kegiatan dan program dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan kepada manajemen. Charter memuat pedoman untuk memantau tindak-lanjut hasil rekomendasi hasil pengawasan intern dan pengawasan ekstern. SPI secara efisien dan efektif melaksanakan Pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan intern dan pengawasan ekstern dan mendokumentasikan hasil pemantauan. Pada laporan audit SPI terdapat laporan pemantauan tindak lanjut temuan/rekomendasi sebelumnya. Temuan tersebut telah ditindaklanjuti sepenuhnya. **Kelemahan:** ▪ PKPT *Belum* di lakukan dengan pendekatan risiko.	1,089	96,7%	1,053063

Indikator/Parameter			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG) - HAMBATAN & REKOMENDASI	KESIMPULAN/PENILAIAN		
				BOBOT	%	SKOR
			Hambatan: - **Rekomendasi:** ▪ Satuan Pengawas Intern agar menyusun PKPT dengan menggunakan pendekatan risiko.			
36	Direksi menyelenggarakan fungsi sekretaris perusahaan yang berkualitas dan efektif.		Sekretaris perusahaan telah memenuhi kualifikasi pendidikan.	1,711	96,0%	1,642938
	131	Sekretaris Perusahaan dilengkapi dengan faktor-faktor pendukung keberhasilan pelaksanaan tugasnya.	- Sekretaris perusahaan telah memenuhi kualifikasi pengalaman profesional dan kompetensi. Struktur organisasi Sekretaris Perusahaan sesuai dengan kebutuhan untuk pelaksanaan tugasnya. Posisi Sekretaris Perusahaan dalam struktur organisasi di bawah Direktur Utama, diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama dengan persetujuan Dewan Komisaris. Fungsi Sekretaris Perusahaan memastikan bahwa perusahaan mematuhi peraturan tentang persyaratan keterbukaan; - Fungsi Sekretaris Perusahaan memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Direksi dan Dewan Komisaris, sebagai penghubung, menatausahakan serta menyimpan dokumen perusahaan dan mengkoordinasikan penyusunan Laporan Manajemen Triwulanan dan Tahunan.	0,466	100%	0,466
	132	Sekretaris perusahaan menjalankan fungsinya.	- Sekretaris Perusahaan telah menyampaikan Laporan Manajemen Triwulanan dan tahunan sebelum berakhir periode. Laporan Manajemen Triwulanan disampaikan kepada Pemegang Saham pada akhir triwulan sesuai ketentuan Kep. Men. BUMN Nomor: 100/MBU/2002. Sekretaris Perusahaan telah memutakhirkan materi informasi yang disajikan dalam website perusahaan sesuai ketentuan perusahaan. Sekretaris Perusahaan telah mengkoordinasikan penyiapan dan penyediaan bahan-bahan untuk “Proses Release” atas setiap pernyataan dalam tingkatan Direksi. Sekretaris Perusahaan telah memberi informasi yang dibutuhkan mengenai data atau performance dari perusahaan	1,089	93,8%	1,020938

Indikator/Parameter			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG) - HAMBATAN & REKOMENDASI	KESIMPULAN/PENILAIAN		
				BOBOT	%	SKOR
			dalam batas-batas yang ditetapkan dalam Protokol Informasi yang ditetapkan perusahaan dan penyampaian laporan-laporan lainnya yang kepada kepada stakeholders lainnya sesuai peraturan perundang-undangan disampaikan tepat waktu. Sekretaris Perusahaan telah memenuhi tingkat ketepatan waktu yang memadai atas penyampaian laporan-laporan dan informasi relevan lainnya. Sekretaris Perusahaan telah mengorganisasikan dan mengkoordinasikan Rapat Direksi, Rapat Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, RUPS dan Kegiatan lainnya dengan stakeholders, menyusun jadual dan tahapan kegiatan menjelang RUPS/RUPS LB dan Rapat Direksi .Risalah RUPS RJPP telah memuat waktu, agenda, peserta, pendapat-pendapat yang berkembang dalam RUPS, dan keputusan RUPS. Risalah RUPS telah ditandatangani Ketua RUPS. Setiap Direksi telah memiliki risalah rapat. Risalah rapat mencantumkan pendapat yang berbeda, jika ada. Risalah Rapat mencantumkan jalannya rapat (dinamika rapat). Risalah rapat memuat hasil evaluasi atas pelaksanaan keputusan rapat sebelumnya, walaupun tidak dikelompokkan secara khusus. (Tidak ditemukan keputusan rapat sebelumnya). Setiap anggota Direksi menerima salinan risalah rapat. Validasi risalah rapat sesuai dengan tata tertib yang ditetapkan. Risalah asli dari setiap rapat Direksi disimpan di perusahaan. Risalah asli dari setiap rapat Direksi dapat diakses oleh setiap anggota Dewan Komisaris. Board Manual telah memuat kebijakan tentang program pengenalan perusahaan bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang baru diangkat. Pelaksanaan program pengenalan perusahaan telah direncanakan untuk dilaksanakan pada rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris. - Pelaksanaan program pengenalan perusahaan telah direncanakan untuk dilaksanakan pada rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris. Materi program pengenalan perusahaan telah meliputi (1) pelaksanaan prinsip-prinsip GCG; (2) gambaran mengenai perusahaan berkaitan dengan tujuan, sifat, dan lingkup kegiatan, kinerja keuangan dan operasi, strategi, rencana usaha jangka pendek dan jangka panjang, posisi kompetitif, risiko dan masalah-masalah strategis			

Indikator/Parameter			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG) - HAMBATAN & REKOMENDASI	KESIMPULAN/PENILAIAN		
				BOBOT	%	SKOR
			lainnya; (3) keterangan berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan, audit internal dan eksternal, sistem dan kebijakan pengendalian internal, termasuk Komite Audit; (4) keterangan mengenai tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi serta hal-hal yang tidak diperbolehkan. Dalam Laporan Manajemen Triwulanan telah dimuat laporan pelaksanaan tugas Sekretaris Perusahaan. Laporan tersebut telah disampaikan kepada Dewan Komisaris. Sekretaris Perusahaan telah melaporkan telaah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru bagi perusahaan. Laporan tersebut telah disampaikan kepada Direktur Utama. **Kelemahan:** ▪ Corporate Secretary *Belum* menyusun daftar khusus kepemilikan saham Dewan Komisaris dan Direksi. **Hambatan:** - **Rekomendasi:** ▪ Corporate Secretary agar senantiasa menyusun daftar khusus kepemilikan saham Dewan Komisaris dan Direksi.			
	133	Direksi mengevaluasi kualitas fungsi sekretaris perusahaan.	Evaluasi antara lain dilakukan melalui SPI. Capaian program kerja pelaksanaan tugas Sekretaris perusahaan hampir semuanya telah sesuai yang ditargetkan.	0,156	100%	0,156
37	Direksi menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.		Sekretaris Perusahaan telah terlebih dahulu melakukan konfirmasi dengan pihak Kementerian terkait pelaksanaan RUPS. Konfirmasi telah dilakukan pada jauh hari sebelum RUPS dilaksanakan, walaupun surat undangan baru disampaikan 1-3 hari sebelum RUPS.	2,022	100%	2,022

Indikator/Parameter			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG) - HAMBATAN & REKOMENDASI	KESIMPULAN/PENILAIAN		
				BOBOT	%	SKOR
	134	Direksi menyelenggarakan RUPS sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan.	Pemanggilan RUPS dilakukan melalui surat tercatat. Undangan RUPS mencantumkan tanggal, waktu, tempat, dan mata acara rapat. RUPS Laporan Tahun Tahun Buku 2017 telah dinotariatkan, dilaksanakan pada hari Selasa tgl 17 April 2018 dimulai pukul 14.15 WIB.	1,089	100%	1,089
	135	Direksi menyediakan akses serta penjelasan lengkap dan informasi akurat berkenaan dengan penyelenggaraan RUPS agar dapat melaksanakan hak-haknya berdasarkan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan.	Undangan RUPS memuat agenda RUPS. Penetapan penggunaan laba bersih.Direksi menyediakan informasi mengenai rincian rencana kerja dan anggaran perusahaan dan hal-hal lain yang direncanakan untuk dilaksanakan oleh Persero, khususnya RJPP dan RKAP. Laporan Keuangan memuat informasi keuangan maupun hal-hal lainnya yang menyangkut perusahaan. Direksi menyediakan informasi mengenai hal-hal lain berkaitan dengan agenda RUPS yang diberikan sebelum dan/atau pada saat RUPS berlangsung. Direksi menyediakan penjelasan lengkap dan informasi akurat berkaitan dengan perusahaan sepanjang berhubungan dengan mata acara RUPS dan tidak bertentangan dengan kepentingan perusahaan.	0,933	100%	0,933
			Direksi menyediakan penjelasan lengkap dan informasi akurat berkaitan dengan perusahaan sepanjang berhubungan dengan mata acara RUPS dan tidak bertentangan dengan kepentingan perusahaan.			
	JUMLAH			35,00	94,94%	33,23

Indikator/Parameter			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG) - HAMBATAN & REKOMENDASI	KESIMPULAN/PENILAIAN		
				BOBOT	%	SKOR
38	Perusahaan menyediakan informasi perusahaan kepada *stakeholders*.					
	136	Perusahaan menetapkan sistem dan prosedur pengendalian informasi perusahaan untuk mengamankan informasi perusahaan yang penting.	Telah terdapat kebijakan tentang pengendalian informasi perusahaan. Namun kebijakan yang ada belum mengatur mengenai informasi apa saja yang dikategorikan informasi publik dan informasi rahasia perusahaan dan belum mengatur secara spesifik mengenai prosedur pengungkapan informasi perusahaan kepada stakeholders. **Kelemahan:** ▪ Sarinah *Belum* memiliki kebijakan khusus terkait pengendalian informasi perusahaan yang memuat; (1) Kategori informasi publik dan informasi rahasia perusahaan (2) Pihak yang dapat memberikan dan menyampaikan informasi public(3) Prosedur pengungkapan informasi perusahaan kepada stakeholders. **Hambatan:** ▪ *Belum* adanya persamaan persepsi tentang perlunya kebijakan khusus terkait dengan pengendalian informasi. **Rekomendasi:** ▪ Direksi sebaiknya membuat kebijakan khusus yang lebih spesifik terkait informasi apa saja yang dikategorikan informasi publik dan informasi rahasia perusahaan; pihak-pihak yang dapat memberikan dan menyampaikan informasi public; prosedur pengungkapan informasi perusahaan kepada stakeholders.	0,290	41,70%	0,121
	137	Tingkat kepatuhan perusahaan yang memadai terhadap kebijakan pengendalian informasi perusahaan.	Tingkat kepatuhan perusahaan terhadap kebijakan pengendalian informasi perusahaan telah memadai.	0,145	100%	0,145

Indikator/Parameter			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG) - HAMBATAN & REKOMENDASI	KESIMPULAN/PENILAIAN		
				BOBOT	%	SKOR
39	Perusahaan menyediakan bagi stakeholder akses atas informasi perusahaan yang relevan, memadai, dan dapat diandalkan secara tepat waktu dan berkala.					
	138	Terdapat media untuk penyediaan Informasi Publik agar dapat diperoleh dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana.	Telah terdapat website yang dikelola oleh perusahaan, juga terdapat kebijakan tentang pengelolaan dan pemutakhirkan website. Pengelolaan website telah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan secara konsisten.	0,322	100%	0,322
	139	Website perusahaan mempublikasikan kebijakan dan informasi penting perusahaan.	Telah terdapat kebijakan yang dipublikasikan, antara lain: Pedoman Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik (GCG *Code*), Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*), dan Program Pengendalian Gratifikasi Perusahaan. Namun belum terdapat kebijakan yang dipublikasikan mengenai penerapan *board manual*. Telah terdapat informasi penting yang dipublikasikan : Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan yang antara lain berisi profil perusahaan yaitu sejarah Sarinah, visi dan misi, manajemen (BOC dan BOD), GCG, anak perusahaan, bisnis (ritel, perdagangan, properti), berita, PKBL, lelang).	0,572	100%	0,572
	140	Perusahaan menyediakan media lain untuk mengkomunikasikan kebijakan informasi penting perusahaan.	Telah terdapat Buletin Fokus (internal) yang terbit setiap bulan, mading yang memuat informasi-informasi, serta intranet. Telah terdapat pertemuan/gathering dengan stakeholders dan bentuk lainnya. **Kelemahan:** ▪ Pelaksanaan gathering dengan pemasok *Belum* mensosialisasikan kebijakan perusahaan. **Hambatan:**	0,427	87,50%	0,374

Indikator/Parameter			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG) - HAMBATAN & REKOMENDASI	KESIMPULAN/PENILAIAN		
				BOBOT	%	SKOR
			- **Rekomendasi:** ▪ Direksi agar mensosialisasikan kebijakan perusahaan yang relevan kepada pemasok.			
	141	Informasi yang disediakan dalam website Perusahaan dan bumn.go.id dimutahirkan secara berkala.	Informasi yang disediakan dalam website perusahaan dan bumn.go.id telah dimutahirkan secara berkala.	0,427	100%	0,427
	142	Tingkat kemudahan akses terhadap kebijakan dan informasi penting perusahaan yang disediakan dalam website perusahaan.	Informasi yang dimuat dalam website perusahaan mudah diakses dan diunduh (*download*). Berdasarkan konfirmasi, tidak terdapat permintaan/permohonan untuk memperoleh Informasi Publik yang tidak dipenuhi oleh perusahaan.	0,572	100%	0,572
40	Perusahaan mengungkapkan informasi penting dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.					

Indikator/Parameter			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG) - HAMBATAN & REKOMENDASI	KESIMPULAN/PENILAIAN		
				BOBOT	**%**	**SKOR**
	143	Laporan Tahunan memenuhi ketentuan umum penyajian Laporan Tahunan.	Laporan Tahunan telah disajikan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris secara berdampingan. Laporan Tahunan telah dicetak pada kertas yang berwarna terang dan mudah dibaca secara jelas. Laporan Tahunan telah mencantumkan identitas perusahaan dengan jelas, identitas perusahaan berupa nama perusahaan (bukan nama Group) di samping (yang dicetak dengan huruf yang jelas, mudah terbaca), halaman belakang (sampul) dan identitas perusahaan di setiap halaman. Laporan Tahunan tahun 2017 telah tersedia di website.	0,291	100%	0,291
	144	Laporan Tahunan memuat mengenai Ikhtisar Data Keuangan Penting.	Perusahaan telah menyajikan informasi keuangan (laporan posisi keuangan, laporan laba rugi komprehensif, rasio-rasio keuangan secara umum dan yang relevan dengan industri perusahaan) dalam bentuk perbandingan selama 5 (lima) tahun buku. Karena Sarinah bukan perusahaan terbuka maka dalam Laporan Tahunan Perusahaan : - tidak memuat harga saham tertinggi, terendah, dan penutupan serta jumlah saham yang diperdagangakan (dicatatkan) untuk setiap masa triwulan dalam 2 (dua) tahun terakhir, - tidak memuat informasi jumlah obligasi atau obligasi konvertibel yang diterbitkan yang masih beredar, tingkat bunga dan tanggal jatuh tempo dalam 2 (dua) tahun buku terakhir, namun Sarinah telah memberi penjelasan tersebut di dalam Laporan Tahunan tahun 2015.	0,073	100%	0,073

Indikator/Parameter			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG) - HAMBATAN & REKOMENDASI	KESIMPULAN/PENILAIAN		
				BOBOT	**%**	**SKOR**
	145	Laporan Tahunan memuat Laporan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan Laporan Direksi.	**Laporan Dewan Komisaris telah memuat:** - penilaian kinerja direksi mengenai pengelolaan perusahaan. - pandangan atas prospek usaha perusahaan yang disusun oleh Direksi. - perubahan komposisi Dewan Komisaris. - Komite-Komite yang berada dibawah pengawasan Dewan Komisaris. **Laporan Direksi telah memuat:** - kinerja perusahaan mencakup antara lain Analisa Kinerja perusahaan, pengelolaan sumber daya manusia, komitmen membangun Tata Kelola Perusahaan Tanggung Jawab sosial perusahaan , dan prospek Usaha Tahun 2016. - mengenai prospek usaha perusahaan. - mengenai Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik yang telah dilaksanakan oleh perusahaan; - mengenai Perubahan komposisi Direksi. Laporan Tahunan telah ditandatangani seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi PT Sarinah (Persero) di Jakarta pada bulan Mei 2016 dengan menyebutkan nama dan jabatannya yang dituangkan pada lembaran tersendiri. Tidak terdapat anggota Dewan Komisaris atau Direksi yang tidak menandatangani laporan tahunan. Laporan Tahunan telah memuat pernyataan bahwa Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi laporan tahunan.	0,291	100%	0,291

Indikator/Parameter			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG) - HAMBATAN & REKOMENDASI	KESIMPULAN/PENILAIAN		
				BOBOT	%	SKOR
	146	Laporan Tahunan memuat profil perusahaan secara lengkap	Laporan Tahunan telah memuat: - nama dan alamat perusahaan, antara lain mencakup informasi tentang nama dan alamat, kode pos, no. Telp & atau no. Fax, email, dan website. - riwayat singkat perusahaan yang mencakup antara lain: tanggal/tahun pendirian, nama dan perubahan nama perusahaan - bidang usaha meliputi jenis produk dan atau jasa yang dihasilkan. - struktur organisasi dalam bentuk bagan, meliputi nama dan jabatan. - Visi dan Misi Perusahaan yang mencakup: (a) Penjelasan tentang visi perusahaan; (b) Penjelasan tentang misi perusahaan. - nama, jabatan, dan riwayat hidup singkat anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas (umur, pendidikan dan pengalaman kerja). - nama, jabatan, dan riwayat hidup singkat anggota Direksi (umur, pendidikan dan pengalaman kerja). - jumlah karyawan untuk masing-masing level organisasi - jumlah karyawan untuk masing-masing tingkat pendidikan. - uraian mengenai Pelatihan karyawan yang telah dan akan dilakukan; - uraian mengenai adanya persamaan kesempatan kepada seluruh karyawan; Tidak terdapat direktur dan komisaris yang memiliki saham di PT Sarinah (Persero), dikarenakan PT Sarinah (Persero) hanya memiliki satu pemegang saham (100%) yaitu Pemerintah Republik Indonesia. Telah terdapat informasi mengenai Nama Anak Perusahaan/Perusahaan Asosiasi; Telah terdapat informasi mengenai % Kepemilikan Saham Telah terdapat informasi mengenai Keterangan tentang bidang usaha anak perusahaan atau perusahaan asosiasi; Telah terdapat informasi mengenai Keterangan status operasi perusahaan anak atau perusahaan asosiasi (telah beroperasi atau belum beroperasi). - Dikarenakan Sarinah bukan perusahaan listed maka :: tidak terdapat kronologis pencatatan saham, tidak terdapat jenis tindakan perusahaan yang menyebabkan perubahan jumlah saham, tidak terdapat perubahan jumlah saham dari awal	0,145	100%	0,145

Indikator/Parameter			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG) - HAMBATAN & REKOMENDASI	KESIMPULAN/PENILAIAN		
				BOBOT	%	SKOR
			pencatatan sampai dengan akhir tahun buku, tidak terdapat nama bursa dimana saham perusahaan dicatatkan - - Dikarenakan Sarinah bukan perusahaan listed maka :: tidak terdapat kronologis pencatatan efek lainnya, tidak terdapat jenis tindakan perusahaan yang menyebabkan perubahan jumlah efek lainnya,, tidak terdapat perubahan jumlah efek lainnya dari awal pencatatan sampai dengan akhir tahun buku, tidak terdapat nama bursa dimana efek lainnya perusahaan dicatatkan, , tidak terdapat peringkata efek lainnya. - Dikarenakan Sarinah tidak menerbitkan saham dan obligasi maka tidak terdapat nama dan alamat BAE dan perusahaan pemeringkat efek. Uraian telah memuat keterangan mengenai Berapa periode audit akuntan publik telah mengaudit laporan keuangan perusahaan; Uraian telah memuat keterangan mengenai Berapa periode audit kantor akuntan publik telah mengaudit laporan keuangan perusahaan dan Besarnya fee audit; terdapat sertifikasi Uraian telah memuat Nama penghargaan/sertifikasi (berskala nasional) Uraian telah memuat Tahun perolehan; Uraian telah memuat Badan pemberi penghargaan/sertifikasi; Telah terdapat Nama dan alamat anak perusahaan dan atau kantor cabang.			
	147	Laporan Tahunan memuat bagian tersendiri mengenai Analisa dan Pembahasan Manajamen atas Kinerja Perusahaan.	Telah terdapat tinjauan operasi per segmen usaha, telah memuat uraian mengenai: penjualan/ pendapatan usaha; dan profitabilitas untuk masing-masing segmen usaha; Telah terdapat uraian atas Kinerja Keuangan Perusahaan yakni analisis kinerja keuangan yang mencakup perbandingan antara kinerja keuangan tahun yang bersangkutan dengan tahun sebelumnya (dalam bentuk narasi dan tabel) , antara lain mengenai: (1) aktiva lancar, aktiva tidak lancar, dan jumlah aktiva kewajiban lancar, kewajiban tidak lancar, dan jumlah kewajiban ; (3) penjualan/pendapatan usaha; (4) beban usaha; (5) laba/rugi bersih. Telah terdapat bahasan dan analisis tentang kemampuan membayar hutang dan tingkat	1,234	88,20%	1,089

Indikator/Parameter			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG) - HAMBATAN & REKOMENDASI	KESIMPULAN/PENILAIAN		
				BOBOT	%	SKOR
			kolektibilitas piutang Perusahaan antara lain memuat penjelasan tentang: (1) kemampuan membayar hutang; (2) tingkat kolektibilitas piutang. Telah terdapat bahasan tentang struktur modal (capital structure), kebijakan manajemen atas struktur modal (capital structure policies), dan tingkat likuiditas perusahaan (liquidity) antara lain penjelasan atas: (1) struktur modal (capital structure); (2) kebijakan manajemen atas struktur modal (capital structure policies); (3) tingkat likuiditas perusahaan (liquidity). Belum terdapat bahasan mengenai ikatan yang material untuk investasi barang modal memuat antara lain penjelasan tentang: (1) tujuan dari ikatan tersebut; (2) sumber dana yang diharapkan untuk memenuhi ikatan-ikatan tersebut: (3) mata uang yang menjadi denominasi; (4) langkah-langkah yang direncanakan perusahaan untuk melindungi risiko dari posisi mata uang asing yang terkait. Tidak Terdapat terdapat bahasan dan analisis tentang informasi keuangan yang telah dilaporkan yang mengandung kejadian yang sifatnya luar biasa dan jarang terjadi. Telah terdapat uraian tentang komponen-komponen substansial dari pendapatan dan beban lainnya, untuk dapat mengetahui hasil usaha perusahaan. Telah terdapat uraian mengenai tidak terdapat fakta material yang terjadi setelah tanggal akuntan. Telah terdapat uraian tentang prospek usaha perusahaan sehubungan dengan perekonomian nasional didukung dengan data dari Aprindo Telah terdapat uraian tentang aspek pemasaran atas produk dan jasa perusahaan, antara lain meliputi pangsa pasar. Telah terdapat uraian mengenai kebijakan dividen dan tanggal serta jumlah dividen kas per Saham dan jumlah dividen per tahun yang diumumkan untuk tahun buku 2013 - 2014. Telah terdapat uraian yang menyatakan tidak terdapat informasi material terkait investasi.Tidak terdapat transaksi material yang mengandung benturan kepentingan dan/atau transaksi dengan pihak afiliasi di 2015. Telah terdapat uraian yang menyatakan bahwa tidak terdapat perubahan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh signifikan terhadap Sarinah di 2015. Telah terdapat uraian mengenai perubahan kebijakan akuntansi, alasan dan dampaknya			

Indikator/Parameter			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG) - HAMBATAN & REKOMENDASI	KESIMPULAN/PENILAIAN		
				BOBOT	%	SKOR
			terhadap laporan keuangan. **Kelemahan:** ▪ Laporan Tahunan 2015 *Belum* membahas informasi terkait ikatan yang material untuk investasi barang modal. ▪ Belum mencantumkan besarnya deviden untuk masing-masing tahun dan Belum dijelaskan berapa besarnya *Payout Ratio***.** **Hambatan:** - **Rekomendasi:** ▪ Laporan Tahunan sebaiknya memuat informasi terkait ikatan yang material untuk investasi barang modal. ▪ Laporan Tahunan sebaiknya memuat informasi terkait besarnya deviden untuk masing-masing tahun dan jumlah *Payout Ratio.*			
	148	Laporan Tahunan memuat pengungkapan praktik Tata Kelola Perusahaan yang Baik.	Telah terdapat uraian mengenai Dewan Komisaris yang memuat antara lain: (1). Uraian pelaksanaan tugas Dewan Komisaris; (2) Pengungkapan prosedur penetapan dan besarnya remunerasi anggota Dewan Komisaris; (3) Frekuensi pertemuan; (4)Tingkat kehadiran Dewan Komisaris dalam pertemuan. Telah terdapat uraian mengenai Direksi yang memuat antara lain: (1) Ruang lingkup pekerjaan dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi; (2) Pengungkapan prosedur penetapan dan besarnya remunerasi anggota direksi, yang meliputi gaji, fasilitas, dan/atau tunjangan lain yang diterima dari perusahaan yang bersangkutan dan anak perusahaan/perusahaan patungan perusahaan yang bersangkutan; (3) Frekuensi pertemuan; (4) tingkat kehadiran anggota direksi dalam pertemuan; (5) Program pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi direksi. Telah terdapat uraian mengenai Komite Audit yang mencakup antara lain: (1) Nama, jabatan, dan riwayat hidup singkat anggota Komite audit; (2) Uraian tugas dan tanggung jawab; (3)	0,944	100%	0,944

Indikator/Parameter			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG) - HAMBATAN & REKOMENDASI	KESIMPULAN/PENILAIAN		
				BOBOT	%	SKOR
			Frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran Komite audit; (4) Laporan singkat pelaksanaan kegiatan Komite audit; (5) Independensi anggota Komite audit. Telah terdapat uraian mengenai Komite Manajemen Risiko mencakup antara lain: (1) Nama dan jabatan, sedangkan riwayat hidup singkat ketua dan anggota komite pemantauan resiko dijelaskan; (2) Uraian tugas dan tanggung jawab; (3) Uraian pelaksanaan kegiatan Komite pemantauan resiko; (4) Frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran Komite pemantauan resiko. Telah terdapat uraian tugas dan fungsi Sekretaris Perusahaan mencakup antara lain: (1) Nama sekretaris dekom ; (2) Uraian pelaksanaan tugas sekretaris dekom. Telah terdapat uraian mengenai pelaksanaan pengawasan dan pengendalian intern (internal audit and control). Telah terdapat uraian tentang unit audit internal / satuan pengawas intern (SPI) mencakup antara lain: (1) Informasi tentang keberadaan Unit Audit Internal; (2) Penjelasan tentang Piagam Audit Internal; (3) Penjelasan mengenai tugas dan tanggung jawab Unit Audit Internal; (4) Uraian pelaksanaan kegiatan Unit Audit Internal; (5) Nama dan riwayat hidup singkat kepala Unit Audit Internal. Telah terdapat uraian mengenai manajemen risiko perusahaan mencakup antara lain: (1) Penjelasan mengenai risiko-risiko yang dihadapi perusahaan (2) Upaya untuk mengelola risiko tersebut. Telah terdapat uraian mengenai aktivitas dan biaya yang dikeluarkan berkaitan dengan tanggung jawab sosial perusahaan terutama mengenai komitmen perusahaan terhadap perlindungan konsumen mencakup antara lain informasi tentang: (1) Program peningkatan layanan kepada konsumen; Telah terdapat uraian mengenai aktivitas dan biaya yang dikeluarkan berkaitan dengan tanggung jawab sosial perusahaan terutama mengenai “community development program” yang telah dilakukan, mencakup antara lain informasi tentang: (1) Mitra Usaha binaan Perusahaan; (2) Program pengembangan pendidikan; (3) Program perbaikan kesehatan; (4)			

Indikator/Parameter			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG) - HAMBATAN & REKOMENDASI	KESIMPULAN/PENILAIAN		
				BOBOT	%	SKOR
			Program pengembangan seni budaya; (5) Biaya yang telah dikeluarkan. Telah terdapat uraian mengenai aktivitas dan biaya yang dikeluarkan berkaitan dengan tanggung jawab sosial perusahaan terutama aktivitas lingkungan, mencakup antara lain informasi tentang (1) Aktivitas pelestarian lingkungan (2) Aktivitas pengelolaan lingkungan; (3) sertifikasi atas pengelolaan lingkungan (Per 31 Desember 2015, Sarinah belum memiliki sertifikasi di bidang lingkungan); (4) Biaya yang telah dikeluarkan. Telah terdapat uraian mengenai perkara penting yang sedang dihadapi oleh perusahaan, Direksi dan anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang sedang menjabat dan klaim material yang diajukan oleh dan/atau terhadap perusahaan, dan perkara yang ada di badan peradilan atau badan arbitrase yang melibatkan perusahaan, mencakup antara lain: (1) Materi perkara/gugatan; (2) posisi Perusahaan; (2) status perkara/gugatan; (4) pengaruh perseroan. Berita terbaru dan informasi umum tentang perseroan dapat dilihat di website perseroan www.sarinah.co.id dan www.bumn.go.id/sarinah. Telah terdapat uraian mengenai Etika Perusahaan yang memuat uraian antara lain: (1) Keberlakuan Code Etik ; (2) Penegakan Kode Etik; (3) Jenis sanksi pelanggaran kode etik (4) Pernyataan Budaya Perusahaan (5) Isi kode Etik.			

Indikator/Parameter			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG) - HAMBATAN & REKOMENDASI	KESIMPULAN/PENILAIAN		
				BOBOT	**%**	**SKOR**
	149	Laporan Tahunan memuat bagian tersendiri mengenai Laporan Keuangan.	Terdapat Surat Pernyataan Direksi tentang Tanggung Jawab Direksi atas Laporan Keuangan sesuai dengan peraturan Bapepam pada Laporan Tahunan 2017 Terdapat opini akuntan atas laporan keuangan adalah wajar dalam semua material Laporan tahun 2017 Terdapat deskripsi Auditor Independen di Opini antara lain: (1) Nama & tanda tangan; (2) Tanggal Laporan Audit; (3) No. ijin KAP (jika ada) pada Laporan Tahunan 2017 Telah terdapat Laporan keuangan yang lengkap, yaitu: neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan serta disajikan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terakhir. Penyajian laporan keuangan sudahsepenuhnya sesuai dengan ketentuan Pedoman Penyajian Laporan Keuangan yang diterbitkan Bapepam & LK dan/atau institusi yang berwenang.	0,363	100%	0,363
41	Perusahaan memperolah penghargaan atau award dalam bidang GCG dan bidang-bidang lainnya.					
	150	Perusahaan mengikuti Annual Report Award (ARA).	Sarinah telah mengikuti ajang *Annual Report Award tahun 2015 dan menjadi pemenang dalam Annual Report Award (ARA).*	1,452	100%	1,452
	151	Perusahaan memperoleh penghargaan atau award lainnya.	Perusahaan belum berpartisipasi dan belum memperoleh penghargaan dalam CSR (*Sustainability Reporting Award*) dan sejenisnya. Perusahaan tidak memiliki penghargaan lain di bidang publikasi dan keterbukaan informasi.	1,452	0%	0
	JUMLAH			9,00	79,79%	**7,18**